KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

PANDUAN
SISTEM AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2021

DAFTAR ISI

1 **Pendahuluan**

2 **Dasar Hukum dan Amanah Permenhub No 85/2020**

3 **Penyelenggaraan SAKIP**

A. Penyusunan Rencana Strategis
B. Penyusunan Indikator Kinerja
C. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
D. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
E. Penyusunan Perjanjian Kinerja Unit Kerja, Berjenjang & Rencana Aksi
F. Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan & Monitoring Rencana Aksi
G. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
H. Reviu dan Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP

4 **Aplikasi dalam Pengelolaan Data Kinerja**

5 **Penutup**

BAB 01

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** adalah:

- Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan tersedianya Panduan Penyelenggaraan SAKIP ini diharakan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk dapat mewujudkan tercapainya sistem pemerintahan yang baik (*good governance).*

"Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya"

B. AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA :

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

ASAS AKUNTABILITAS :

Setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara **harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat** atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keselarasan ***(Aligment)***

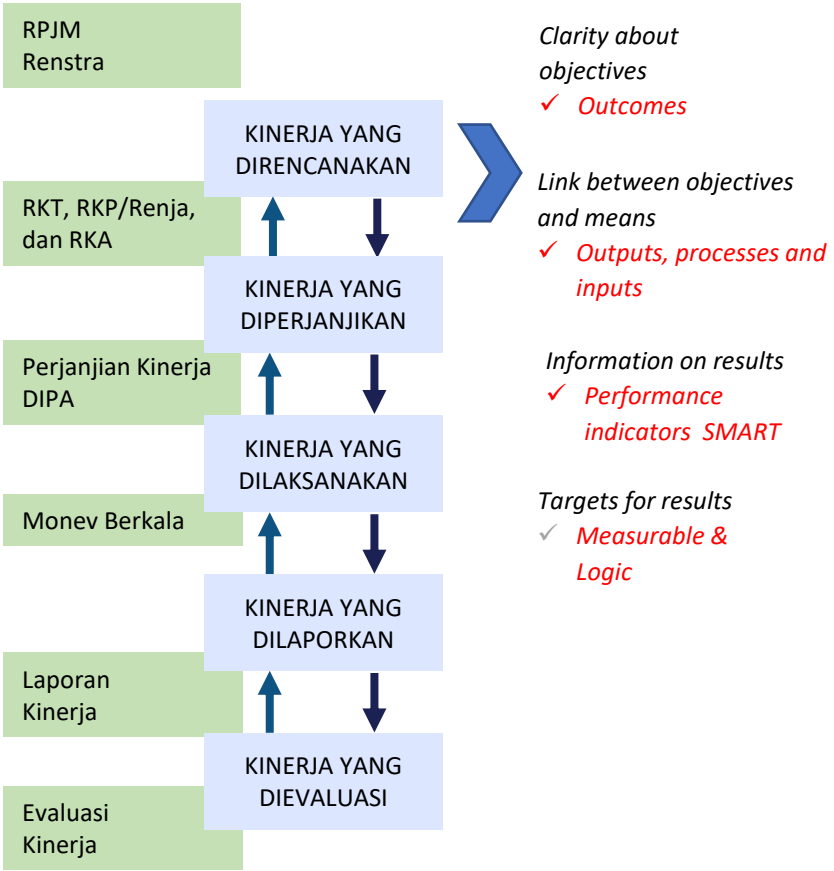

Lanjutan ... (ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI)

01

Komitmen pimpinan instansi di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi &pungli masih lemah

02

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih lemah

03

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah

07

Lemahnya penegakkan hukum & tumpang tindih peraturan

04

Penerapan *e-government* belum terintegrasi & Merata

05

Inefisiensi penggunaan anggaran

06

Inovasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum dilakukan secara merata

10

Akuntabilitas Kinerja masih rendah

08

Organisasi gemuk, fragmented, tumpang tindih

09

Rendahnya Kompetensi ASN, mindset & culture set birokrasi yang kurang baik

ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

Lanjutan ... (KINERJA VS KEUANGAN)

AA (90-100)
A (80-90)
BB (70-80)
B (60-70)
CC (50-60)
C (30-50)
D (0-30)

WTP
WDP
TIDAK WAJAR
DISCLAIMER OPINION

C. KOMPONEN SAKIP

PERPRES 29/2014	PERMENPAN 12/2015	SUBKOMPONEN EVALUASI SAKIP
RENCANA STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA	PERENCANAAN KINERJA	• RPJM • RENCANA STRATEGIS • RENCANA KINERJA TAHUNAN • PERJANJIAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN DATA KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	• INDIKATOR KINERJA UTAMA • MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
PELAPORAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	LAPORAN KINERJA
REVIU DAN EVALUASI KINERJA	EVAUASI INTERNAL	• PEDOMAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL • PEMANTAUAN PENCAPAIAN KINERJA • EVALUASI PROGRAM
	CAPAIAN KINERJA	• PENCAPAIAN TARGET • KEANDALAN INFORMASI KINERJA • *BENCHMARK* KINERJA • KINERJA MENURUT *STAKEHOLDERS*

Lanjutan… (SIKLUS SAKIP)

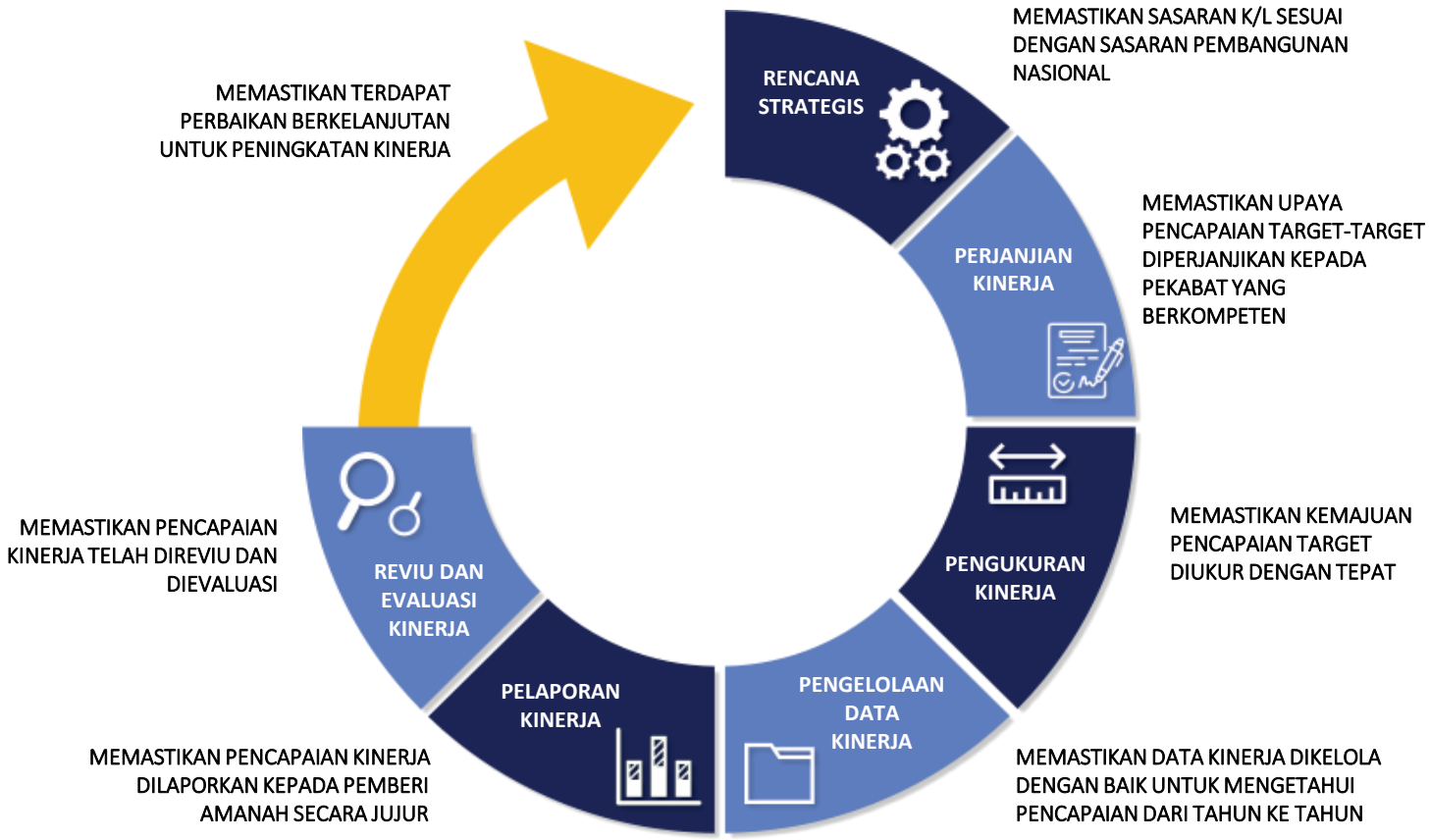

Lanjutan… (PELAPORAN SAKIP)

PERJANJIAN KINERJA	RENCANA AKSI
MONITORING CAPAIAN KINERJA BULANAN (E-PERFORMANCE)	MONITORING RENCANA AKSI SETIAP BULAN
LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINJERJA TRIWULAN	LAPORAN KINERJA

**) Pelaporan Kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja.*

10

BAB 02

DASAR HUKUM DAN AMANAH PM 85 TAHUN 2020

A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SAKIP

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil

Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Permenhub Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

Permenhub Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis kementerian Perhubungan tahun 2020-2024

Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

B. AMANAH PM 85 TAHUN 2020

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan agar tercapai keselarasan dan kesesuaian dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan **Permenhub nomor PM 85 Tahun 2020** untuk dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pembangunan perhubungan serta menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Permenhub nomor PM 85 Tahun 2020 merupakan acuan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

PM 85 Tahun 2020 mengamanahkan penyelenggaraan SAKIP di Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh :

1. Kementerian Perhubungan;
2. Unit Kerja Eselon I;
3. Unit Kerja setingkat Eselon II; dan
4. Satuan Kerja.

(Pasal 2 ayat 2)

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Pengelolaan Data Kinerja;
5. Pelaporan Kinerja, dan
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

(Pasal 3)

Lanjutan... (TAHAPAN PELAPORAN KINERJA)

1

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun berjenjang oleh:

a. Kementerian;
b. Unit Kerja Eselon I;
c. Unit Kerja setingkat Eselon II; dan
d. Satuan Kerja.

(Pasal 4)

2

Perjanjian Kinerja merupakan Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja yang disusun secara berjenjang oleh:

a. Menteri;
b. Pejabat JPT Madya;
c. Pejabat JPT Pratama;
d. Pejabat JA Administrator;
e. Pejabat JA Pengawas;
f. Pimpinan Satuan Kerja;
g. Pejabat Fungsional; dan
h. Pejabat Pelaksana.

(Pasal 12)

Lanjutan ... (TAHAPAN PELAPORAN KINERJA)

3

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran, dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan. Cakupan Pengukuran Kinerja meliputi:

a. Sasaran;
b. Indikator kinerja;
c. Target;
d. Realisasi;
e. Pagu Anggaran; dan
f. Realisasi anggaran.

(Pasal 20)

4

Pengelolaan Data Kinerja adalah kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja yang mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah yang mencakup:

a. Penetapan data dasar;
b. Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
c. Penatausahaan dan penyimpanan data; dan
d. Pengkompilasian dan perangkuman.

(Pasal 22)

Lanjutan ... (TAHAPAN PELAPORAN KINERJA)

5

Pelaporan Kinerja refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun secara berjenjang oleh:

a. Kementerian;
b. Unit Kerja Eselon I;
c. Unit Kerja Eselon II; dan
d. Satuan Kerja

(Pasal 24)

6

Reviu adalah penelaah oleh APIP atas Laporan Kinerja Kementerian untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas sebelum disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja Pemerintah.

Reviu Laporan Kinerja Kementerian dilaksanakan dengan ketrentuan sebagai berikut:

a. Laporan Kinerja Kementerian diserahkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Inspektur Jenderal untuk dilakukan Reviu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tahun anggaran berakhir; dan
b. Hasil Reviu Laporan Kinerja Kementerian disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri dengan tembusan seluruh Pejabat JPT Madya, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Laporan Kinerja Kementerian diserahkan oleh Sekretaris Jenderal.

(Pasal 29)

Lanjutan ... (TAHAPAN PELAPORAN KINERJA)

7

Instrumen Pengukuran dan pengelolaan kinerja berbasis situs web dilakukan untuk transparansi penyampaian data capaian kinerja dan mendukung kecepatan penyusunan Laporan Kinerja. Penanggung jawab pengisian data capaian kinerja dalam Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja meliputi :

1. Biro Perencanaan untuk Kementerian dan Unit Kerja Sekretariat Jenderal;
2. Sekretatriat Direktorat Jenderal untuk Unit Kerja Direktorat Jenderal;
3. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Unit Kerja Inspektorat Jenderal;
4. Sekretariat Badan untuk Unit Kerja Badan;
5. Masing-masing Unit Kerja Eselon II, III, dan IV serta Satuan Kerja untuk Unit Kerja Eselon II, II dan IV serta Satuan kerja;
6. Masing-masing Pejabat Fungsional dan Pejabat pelaksana.

(Pasal 31)

8

Penghargaan:

1. Penghargaan diberikan terhadap ketaatan atas pelaksanaan proses penyusunan sistem akuntabilitas pada unit kerja di lingkungan Kementerian melalui penilaian oleh APIP;
2. Penghargaan diberikan terhadap ketaatan atas pelaksanaan proses penerapan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian.

(Pasal 38 & 39)

Lanjutan...

- Permenhub nomor PM 85 Tahun 2020 juga mengamanahkan instrumen pengukuran dan pengelolaan data kinerja secara elektronik berupa Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian.

- Sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan SAKIP, dalam Permenhub nomor PM 85 tahun 2020 mengatur terkait penghargaan dalam rangka ketaatan atas pelaksanaan proses penyusunan SAKIP pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penghargaan diberikan melalui penilaian APIP dengan memberikan peringkat menggunakan metodologi yang ditetapkan.

- Penghargaan diberikan terhadap ketaatan atas pelaksanaan proses penyusunan sistem akuntabilitas pada unit kerja di lingkungan Kementerian melalui penilaian oleh APIP. Proses termasuk dimulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Penginputan Data Kinerja hingga penyusunan Laporan Kinerja sesuai tahapan waktu.

Sumber : Permenhub Nomor 85 Tahun 2020

BAB
03

PENYELENGGARAAN
SAKIP

A. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Renstra menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP dalam mengukur dan mengevaluasi capaian setiap tahunnya yang dituangkan dalam Laporan Kinerja **(Pasal 5 ayat 1)**

UNIT	PENYUSUN	BATAS WAKTU	LEGALISASI	TARGET DAN INDIKATOR KINERJA	REVISI
Eselon I	Sekretariat Unit Kerja (Pasal 4 ayat 3)	1 Bulan setelah Renstra Kementerian	Keputusan Pimpinan Unit Kerja	Menggambarkan dampak, *outcome* dari output unit kerja di bawahnya yang dihasilkan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Unit Kerja Eselon I	Menyesuaikan dengan Renstra Kementerian selambat - lambatnya 3 bulan
Eselon II dan UPT	Masing- masing unit kerja Eselon II dan Satuan Kerja (Pasal 4 ayat 4)	2 Bulan setelah Renstra Eselon I	Keputusan Pimpinan Unit Kerja	Menggambarkan *outcome* yang dihasilkan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja	Menyesuaikan dengan Renstra Eselon I, selambat - lambatnya 3 bulan

Sumber: Permenhub nomor 85 tahun 2020 & Permenhub nomor 80 tahun 2020

Dalam hai terdapat perubahan target tahunan dalam Renstra, dapat dituangkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kementerian **(Pasal 6)**

Lanjutan ... (PENYUSUNAN RENSTRA)

OUTLINE RENSTRA 2020-2024
BAB I PENDAHULUAN I.1 Kondisi Umum I.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN /LEMBAGA II.1 Visi Kementerian/Lembaga II.2 Misi Kementerian/Lembaga II.3 Tujuan Kementerian/Lembaga II.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN , STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN III.1 Arahan Kebijakan dan Strategi Nasional III.2 Arahan Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga III.3 Kerangka Regulasi III.4 Kerangka Kelembagaan
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN IV.1 Target Kinerja IV.2 Kerangka Pendanaan
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

Sumber: Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2019

Lanjutan ... (STRUKTUR RENSTRA)

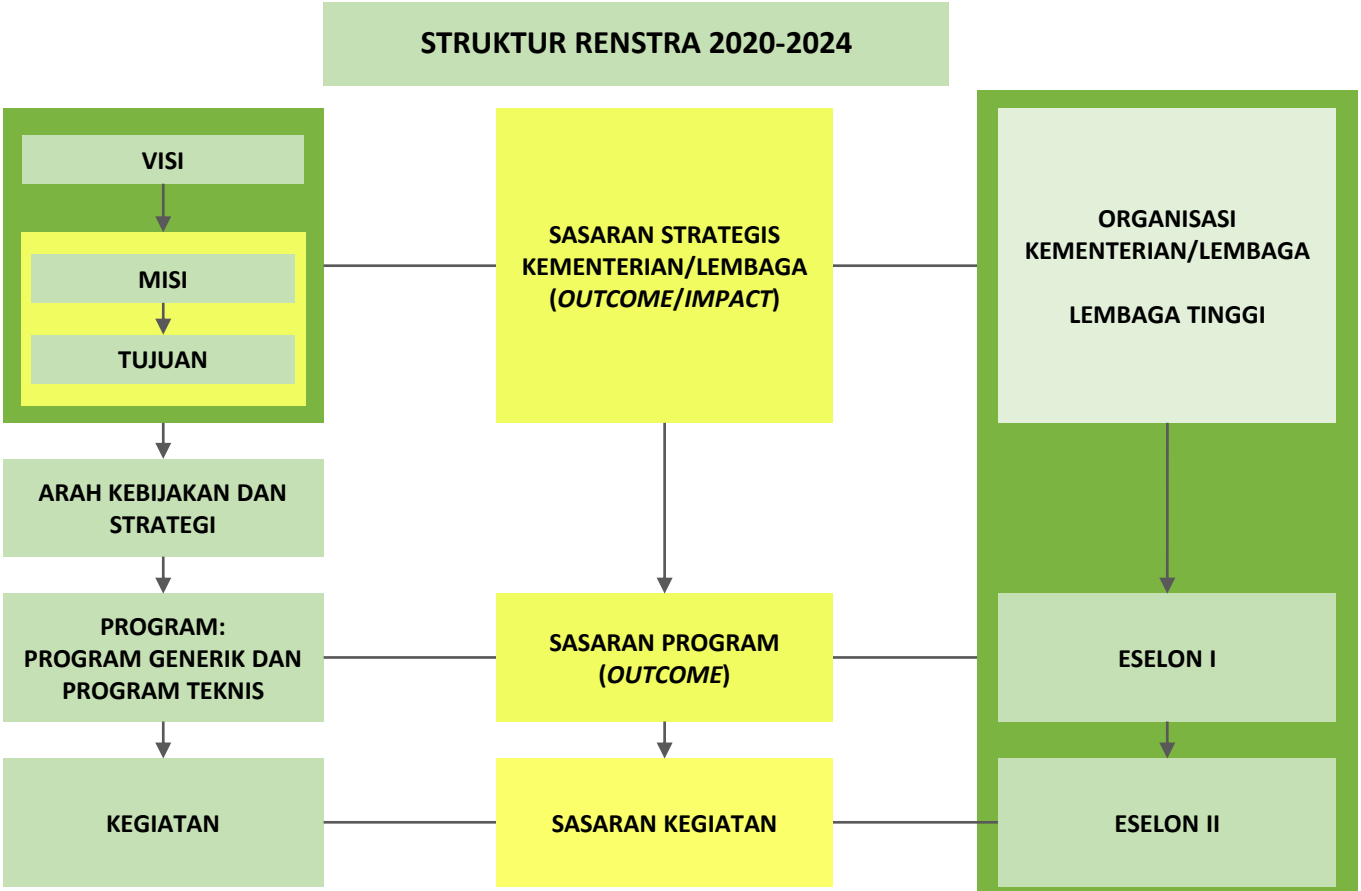

Sumber: Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2019

Lanjutan ... (HUBUNGAN STRUKTUR-SASARAN-INDIKATOR)

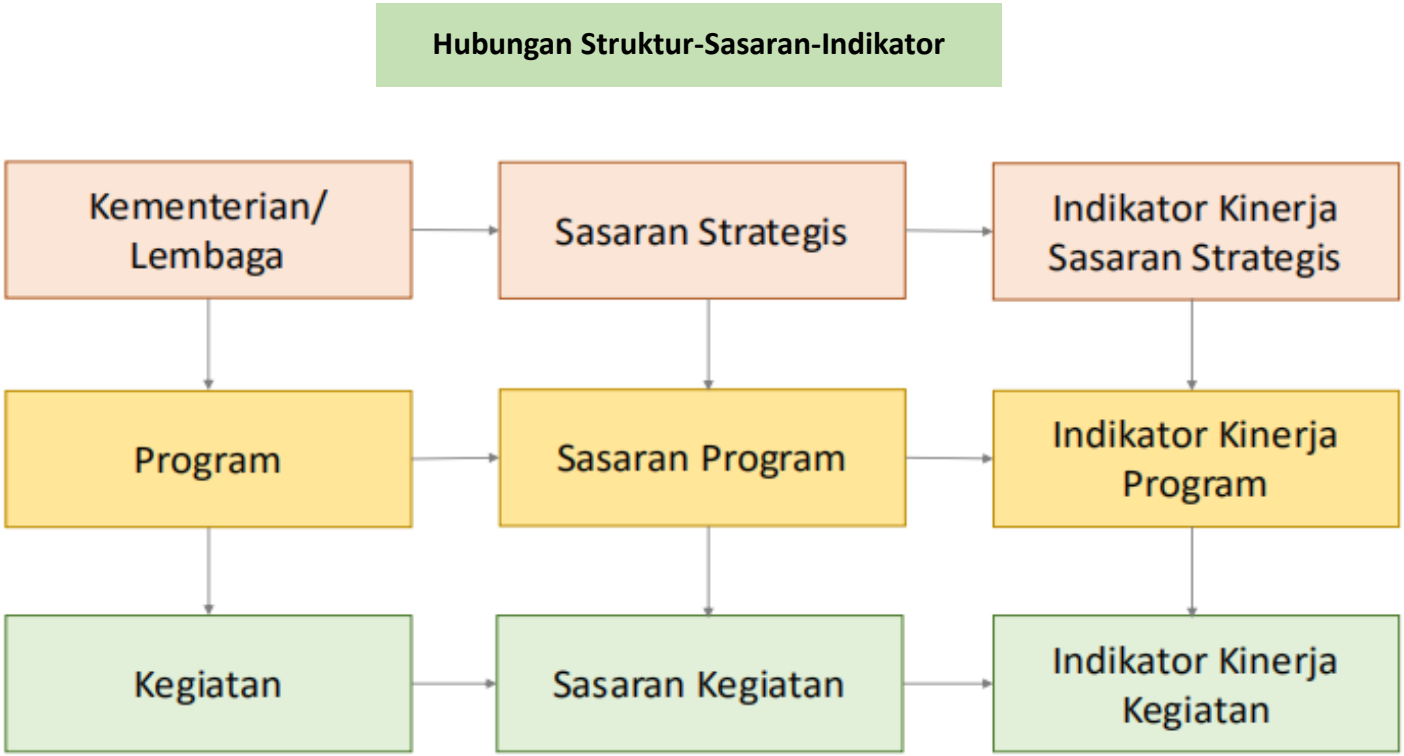

Lanjutan ... (VISI DAN MISI RENSTRA DJKA 2020-2024)

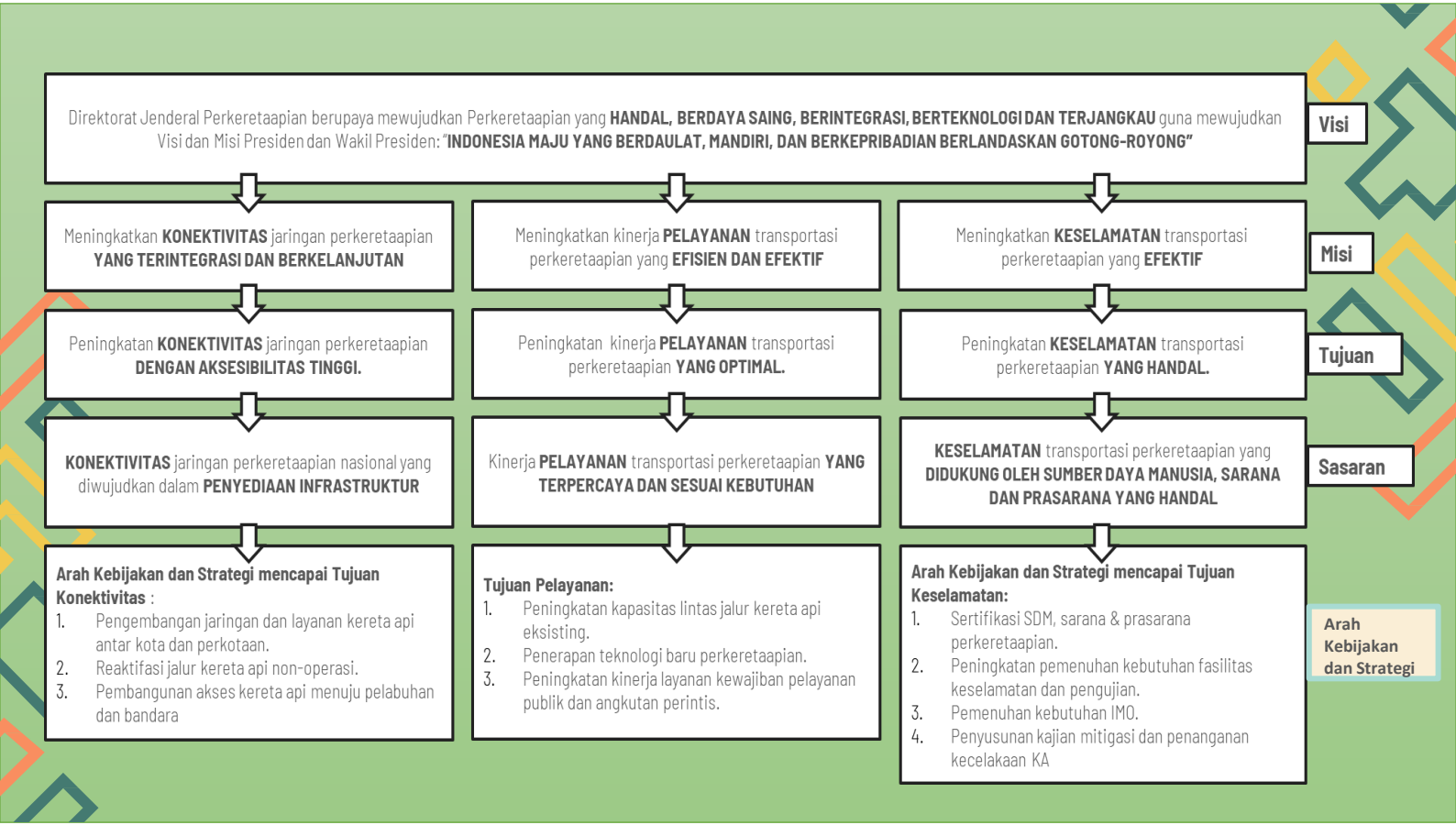

Lanjutan ... (STRUKTUR RENSTRA DJKA 2020 – 2024)

	KONEKTIVITAS	PELAYANAN	KESELAMATAN
SASARAN STRATEGIS	Terwujudnya Konektivitas Nasional IKS: Rasio Konektivitas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi IKS: OTP Pelayanan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi IKS: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi
SASARAN PROGRAM	Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional denngan Penyediaan Infrastruktur IKP: Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Terpercaya & Sesuai Kebutuhan IKP: Capaian OTP, Target Angkutan Penumpang, Target Angkutan Barang dan Jalur Sesuai TQI I dan II	Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan SDM, Sarana dan Prasara yang Handal IKP: Rasio Kejadian Kecelakaan (ROA)
SASARAN KEGIATAN	4 Sasaran Kegiatan 1. Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian 2. Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian 3. Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian 4. Meningkatnya Fasilitas Sarana Perkeretaapian Mendukung Konektivitas Wilayah	3 Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian 2. Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian 3. Meningkatnya Kapasitas Sarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	3 Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian 2. Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian 3. Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Lanjutan ... (MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN/LEMBAGA_____								xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Sasaran Strategis 1												
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
	Sasaran Strategis 2												
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
PROGRAM A:_____								xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Sasaran Program 1												
	- Indikator Kinerja Program		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
	- Indikator Kinerja Program		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
	Sasaran Program 2												
	- Indikator Kinerja Program		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
Kegiatan 1:_____								xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Sasaran Kegiatan 1	xxx											
	- Indikator Kinerja Kegiatan		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
	- Indikator Kinerja Kegiatan		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
	Sasaran Kegiatan 2	xxx											
	- Indikator Kinerja Kegiatan		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
	Sasaran Kegiatan 3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
	- Indikator Kinerja Kegiatan		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
Kegiatan 2:_____								xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Sasaran Kegiatan 1	xxx											
	- Indikator Kinerja Kegiatan		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
	- Indikator Kinerja Kegiatan		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
	Sasaran Kegiatan	xxx											
	- Indikator Kinerja Kegiatan		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						
Dst													

Sumber: Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2019

Lanjutan ... (MATRIKS KERANGKA REGULASI)

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian

Sumber: Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2019

Lanjutan ... (EVALUASI RENSTRA)

Evaluasi Renstra unit kerja dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yaitu yang pada pertengahan periode dan akhir periode.

UNIT KERJA	DISAMPAIKAN KE	KAPAN (Evaluasi Paruh Waktu)	KAPAN (Evaluasi Akhir)
Kementerian	Kepala Bappenas/ Men PPN	Bulan Juli tahun ketiga	Bulan Januari tahun kelima
Unit Kerja Eselon I	Sekretaris Jenderal	Bulan Juni tahun ketiga	Bulan Desember tahun keeempat
Unit Kerja Eselon II	Pejabat JPT Madya	Bulan Juni tahun ketiga	Bulan Desember tahun keeempat
Satuan Kerja	Atasan Langsung	Bulan Juni tahun ketiga	Bulan Desember tahun keeempat

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (Pasal 7)

B. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Instansi pemerintah **diwajibkan** menetapkan indikator kinerja utama.
- Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi**.**
- Indikator Kinerja Utama ditetapkan secara berjenjang sesuai tingkat entitas organisasi.

FUNGSI INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Memperjelas apa, berapa dan kapan suatu program/kegiatan dilaksanakan.
- Memperjelas siapa yang bertanggungjawab dan yang melaksanakan indikator dimaksud.
- Menciptakan konsensus yang dibangun bersama oleh pihak terkait untuk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya.
- Membangun dasar untuk pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

Lanjutan ... (PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA)

S ***Spesific*** – harus spesifik dan jelas

M ***Measurable*** – dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kualitatif/ kuantitatif

A ***Achievable*** – dapat dicapai dan menunjukkan pencapaian, *input, output, outcomes*, *impact* dan *benefit*

R ***Result-focused*** – fokus pada hasil, dapat diolah, dikumpulkan dan dianalisis

T ***Time-bond*** – ketepatan waktu, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan

INDIKATOR KINERJA YANG BAIK:

- **Spesifik (*Spesific*)**> IK dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur
- **Dapat diukur (*Measurable*)** > IK dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jika ada dua pihak atau lebih mengukur hasilnya akan sama
- **Dapat dicapai (*Attainable*)**> IK dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat
- **Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur (Relevan)** > IK harus menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan hasil apa yang akan diukur (*Input*- IK *Input, Output*-IK *Output, Outcome*- IK *Outcome*)
- **Berjangka waktu tertentu (*Time bound*)** > IK mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya
- **Dapat dipantau dan dikumpulkan (*Trackable*)** > Dapat ditelusur secara jelas sumber datanya

Lanjutan ... (*LOGIC MODEL*)

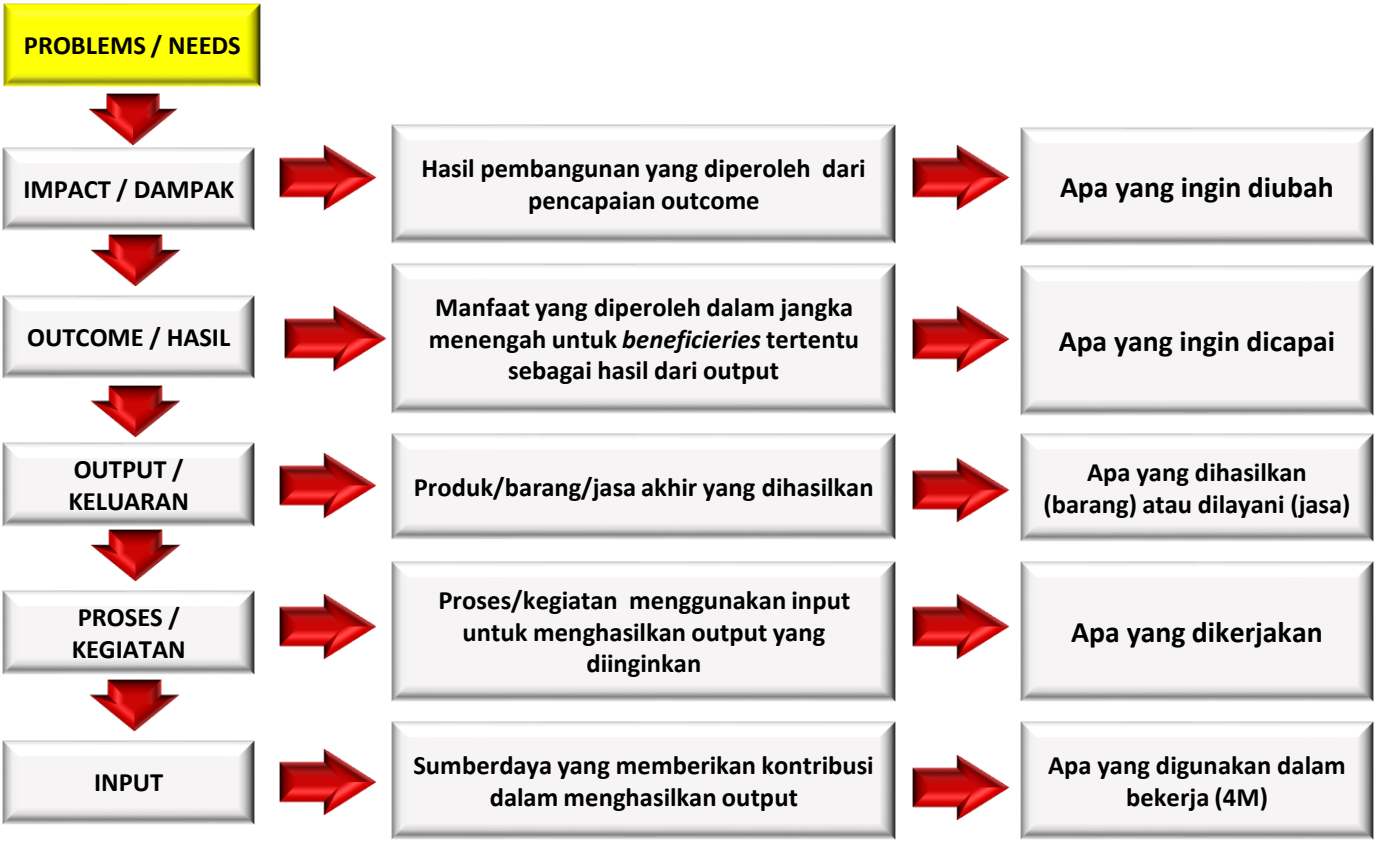

Lanjutan ... (PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA)

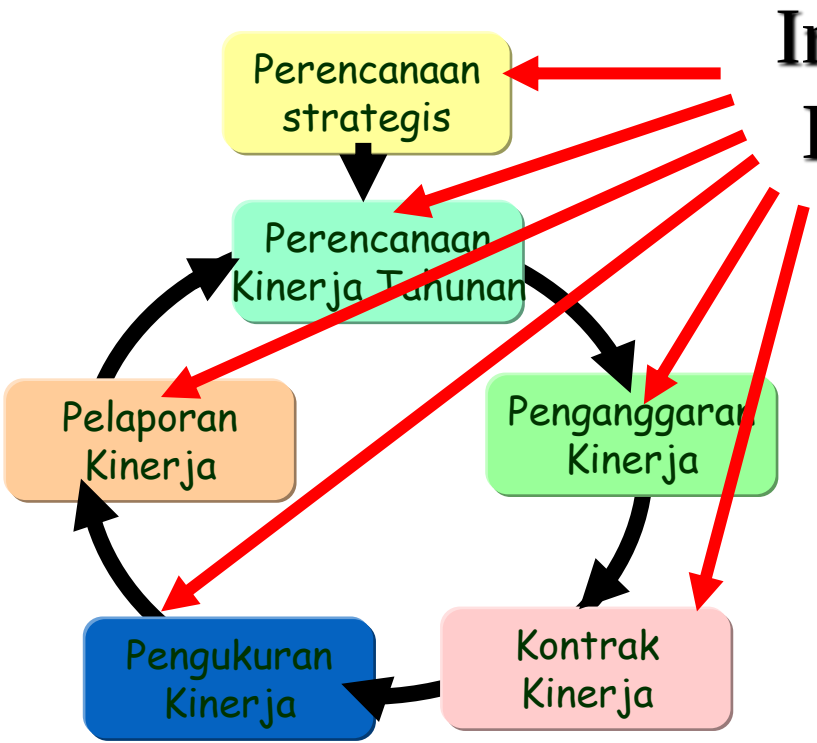

Indikator Kinerja merupakan ***unsur penting*** Akuntabilitas Kinerja

Lanjutan ... (PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA)

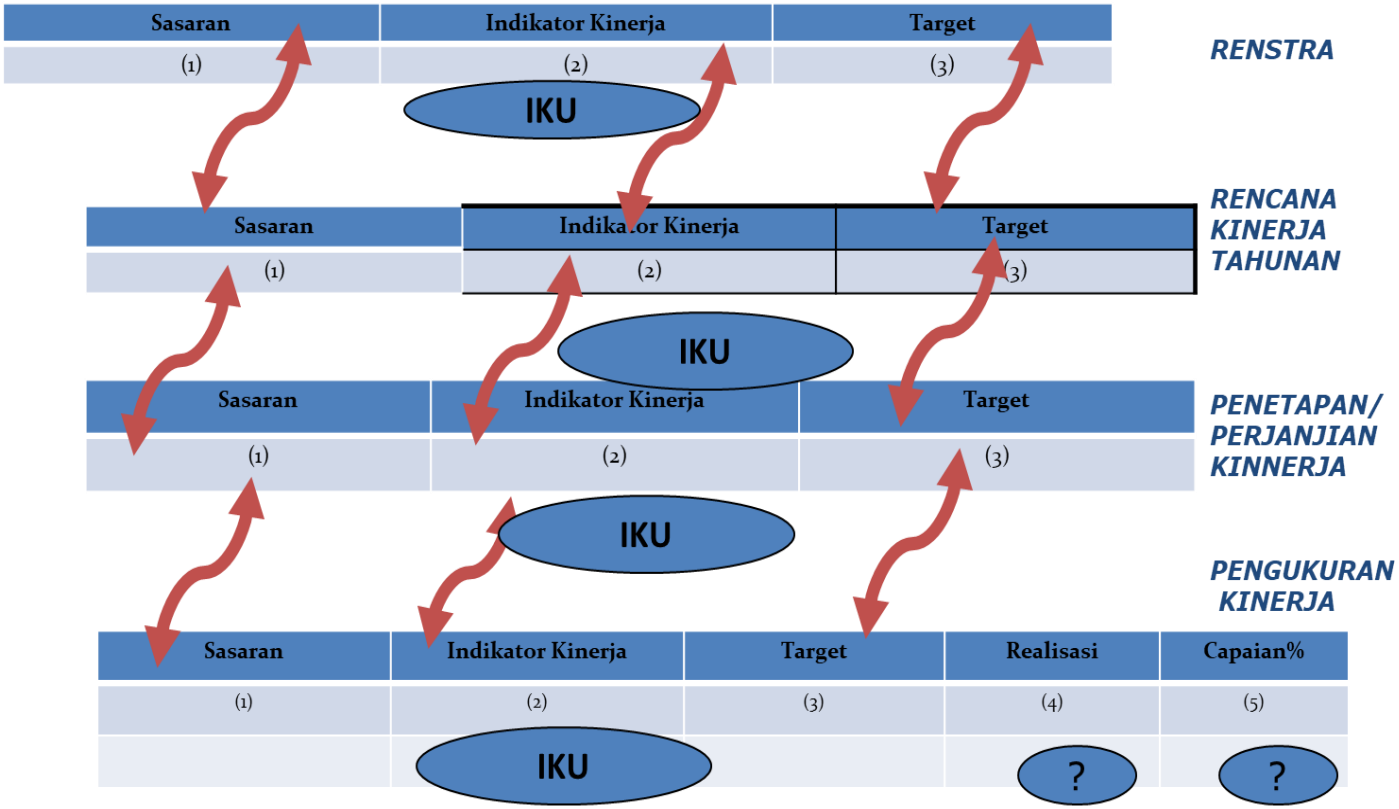

Lanjutan ... (*CASCADING* SASARAN PROGRAM & KEGIATAN DITJEN PERKERETAAPIAN)

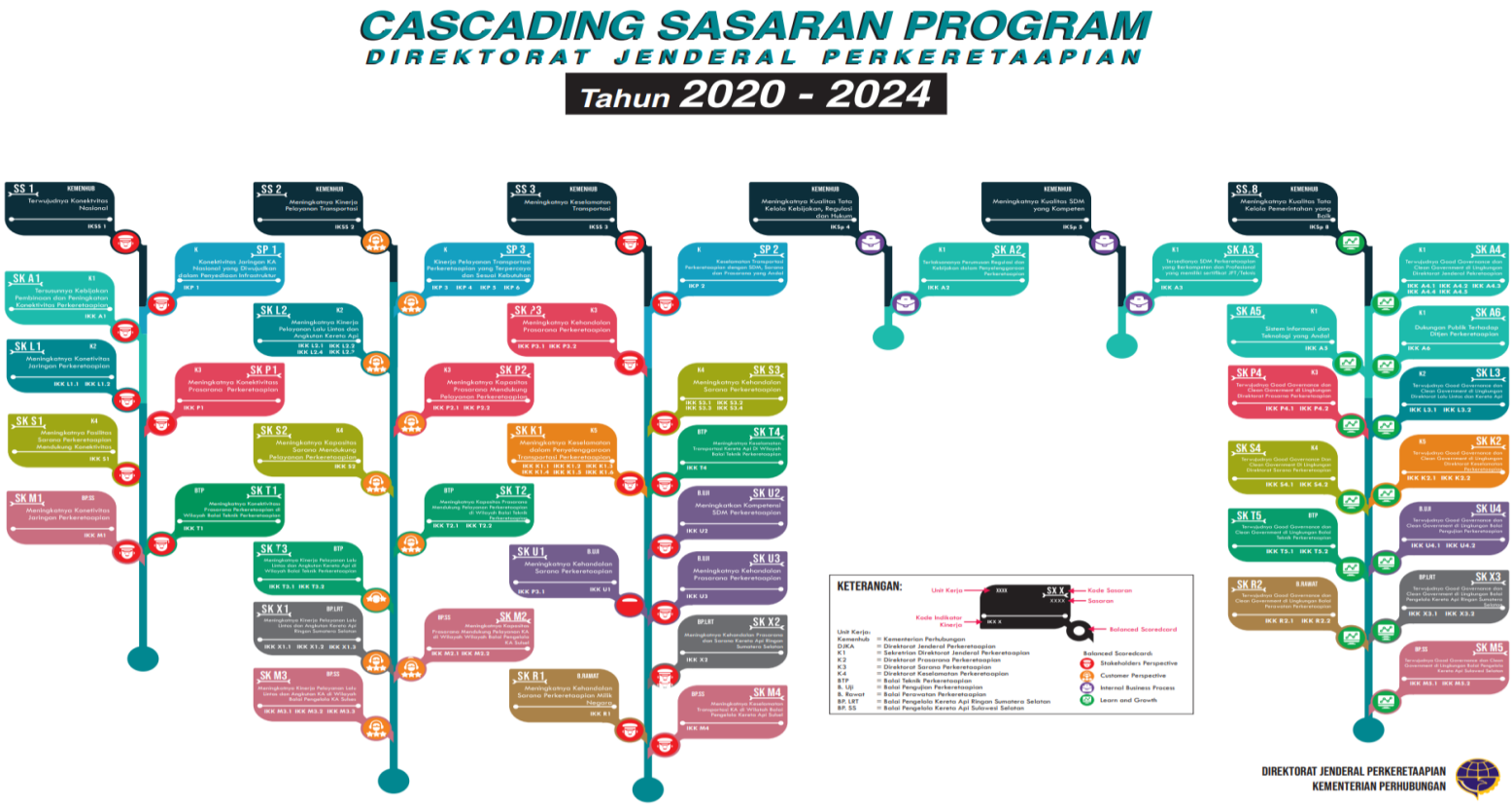

Lanjutan ... (INDIKATOR KINERJA PROGRAM & KEGIATAN DITJEN PERKERETAAPIAN)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 | TELP : (021) 3506204, 3856836 3505557, 3505558 3505559, 3506526 | FAX : (021) 3860758 3813972

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR : HK.209/2/6/DJKA/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan diperlukan penetapan indikator kinerja utama pada masing-masing tingkat Eselon I sampai dengan unit kerja di bawahnya melalui Keputusan Pejabat Eselon I;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian
Nomor : HK.209/2/6/DJKA/2021
Tanggal : 2021

A. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam Penyediaan infrastruktur	IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IKP2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api *(rate of accident)*	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh
SP3 Kinerja pelayanan Transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IKP3 Persentase capaian *on time performance* (OTP) transportasi kereta api	%
	IKP4 Persentase Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%
	IKP5 Persentase Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%
	IKP6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI I dan II	%

5. BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1.	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	%
2.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	%

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

Lanjutan ... (INDIKATOR KINERJA PROGRAM DITJEN PERKERETAAPIAN)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	MANUAL IKU
SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalamPenyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	Perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubungan dengan jalur KA s.d tahun berjalan dengan rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang akan terhubung dengan Jalur KA sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 Rasio Konektivitas antar wilayah = *Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubungan jalur KA s.d tahun berjalan* / *PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang akan terhubung dengan Jalur KA sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030*
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*)	Kejadian kecelakaan / 1 juta km tempuh	*Rate of Accident* (RoA) yang merupakan salah satu bentuk untuk menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah kejadian kecelakaan pada tahun berjalan dibagi dengan Km tempuh (Km *traveled*) pada tahun tersebut dalam satu juta Ratio Kejadian Kecelakaan = *Jumlah kejadian kecelakaan pada tahun berjalan* / *KM tempuh pada tahun berjalan* X 1.000.000
SP3 Kinerja pelayanan Transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian *on time performance* (OTP) transportasi kereta api	%	Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) transportas kereta api diperoleh dari Perbandingan antara jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan KA tepat waktu dan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan KA Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) sub sektor perkeretaapian = *Jumlah Realisasi kedatangan dan keberangkatan KA tepat waktu pada tahun berjalan* / *Jumlah Keseluruhan kedatangan dan keberangkatan KA pada tahun berjalan* x 100%

Lanjutan ... (INDIKATOR KINERJA PROGRAM DITJEN PERKERETAAPIAN)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	MANUAL IKU
SP3 Kinerja pelayanan Transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK4 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api yang diukur melalui perbandingan antara jumlah produksi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target jumlah angkutan penumpang moda transportasi perkeretaapian s.d tahun 2024 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api = *Jumlah produksi angkutan penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan* / *Jumlah (target) angkutan penumpang moda transportasi perkeretaapian tahun 2024`* X 100%
	IK5 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	Pemenuhan target angkutan barang kereta api yang diukur melalui perbandingan antara jumlah produksi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target jumlah angkutan barang moda transportasi perkeretaapian s.d tahun 2024 Pemenuhan target angkutan barang kereta api = *Jumlah produksi angkutan barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan* / *Jumlah (target) angkutan barang moda transportasi perkeretaapian tahun 2024* X 100%
	IK6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI I dan II	%	Perbandingan antara Panjang jalur Kereta Api yang telah diukur menggunakan Kereta Ukur Katergori I dan II dengan Panjang total Jalur Kereta Api yang diukur per periode dalam tahun berjalan Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II = *Panjang jalur KA yang telah diukur kategori I dan II pada tahun berjalan* / *Total panjang jalur KA* X 100%

Lanjutan … (DAFTAR ISTILAH)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
3	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara
4	Simpul Transportasi	Suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda
5	Track Quality Index (TQI)	*Output* yang dihasilkan pengukuran jalur Kereta Api menggunakan dari kereta ukur berdasarkan geometrinya TQI Kategori I : Kondisi jalur Kereta api “NYAMAN” dapat dilalui dengan kecepatan 100-120 Km/jam TQI Kategori II : Kondisi jalur Kereta api “AMAN” dapat dilalui dengan kecepatan 80 - 100 Km/jam TQI Kategori III : Kondisi jalur Kereta api “WASPADA” dapat dilalui dengan kecepatan 60-80 Km/jam TQI Kategori IV : Kondisi jalur Kereta api “BAHAYA” dapat dilalui dengan kecepatan <60 Km/jam
6	Sumber Daya Manusia Perkeretaapian (SDM Perkeretaapian)	Meliputi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, petugas penanganan kecelakaan, petugas pemeriksa kecelakaan, petugas analisis kecelakaan, asesor, dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian.
7	Kecelakaan Kereta Api	Kecelakaan kereta api yang dimaksud dalam hal ini adalah kecelakaan KA dengan KA, terguling, anjlogan dan lain-lain (terbakar dan faktor alam)

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SETDITJEN)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti/dilegalkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun 5 tahun terakhir *Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti* = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang sudah ditindaklanjuti/ dilegalkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun 5 tahun terakhir}}$ X 100%
2.	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	Perbandingan antara jumlah capaian legalisasi dibagi dengan jumlah target legalisasi bidang perkeretaapian *Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian* = $\frac{\text{Jumlah capaian legalisasi bidang perkeretaapian}}{\text{Jumlah target legalisasi bidang perkeretaapian 2020-2024}}$ X 100%
3.	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian Tertentu	Perbandingan antara jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki kertifikat kompetensi/keahlian tertentu dibagi dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian *Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian Tertentu* = $\frac{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki kertifikat kompetensi/keahlian tertentu}}{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian}}$ X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SETDITJEN)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
4.	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Target Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	Perbandingan antara realisasi rencana induk TIK bidang perkeretaapian tahun berjalan dibagi dengan jumlah (target) rencana induk TIK bidang perkeretaapian tahun 2020-2024 *Persentase Pemenuhan Target Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian* = $\frac{\text{Realisasi rencana induk TIK bidang perkeretaapian}}{\text{Jumlah (target) rencana induk TIK bidang perkeretaapian}}$ X 100%
5.	Dukungan Publik terhadap Ditjen Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	Perbandingan antara jumlah publikasi Ditjen Perkeretaapian tahun berjalan dibagi dengan jumlah (target) publikasi Ditjen Perkeretaapian tahun 2020-2024 *Persentase Pemenuhan Target Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian* = $\frac{\text{Jumlah publikasi Ditjen Perkeretaapian tahun berjalan}}{\text{Jumlah (target) publikasi Ditjen Perkeretaapian tahun 2020-2024}}$ X 100%
6.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian
		Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	Perbandingan antara Realisasi realisasi penerimaan PNBP Bidang Perkeretaapian dibagi target penerimaan PNBP Bidang Perkeretaapian pada tahun berjalan *Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian* = $\frac{\text{Realisasi penerimaan PNBP Bidang Perkeretaapian}}{\text{Target penerimaan PNBP Bidang Perkeretaapian pada tahun berjalan}}$ X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SETDITJEN)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian (%)	Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian kinerja output dengan bobot 50% *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran* = *Persentase realisasi penyeraan anggaran* + *Persentase realisasi capaian kinerja output* Persentase realisasi penyeraan anggaran : $\text{Persentase realisasi penyeraan anggaran} = \frac{\text{Realisasi penyerapan anggaran}}{\text{Keseluruhan anggaran tahun berjalan}} \times 100\%$ Persentase realisasi capaian kinerja output $\text{Persentase realisasi capaian kinerja output} = \frac{\text{Realisasi capaian kinerja output}}{\text{Target kinerja output tahun berjalan}} \times 100\%$

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. LLAKA)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti/dilegalkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun periode 2020-2024 $\text{Rasio Konektivitas Antar Wilayah} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Studi Perencanaan yg disusun}} \times 100\%$ Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti berupa *policy brief* dan dokumen teknis persetujuan/ penetapan trase (Keputusan Menteri, Berita Acara Evaluasi, Surat Dirjen Perkeretaapian ke Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan & Surat Persetujuan Menteri).
		Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian	Perbandingan antara jumlah kerjasama yang telah selesai/ditindaklanjuti dengan target kerjasama alternatif pembiayaan pembangungan infrastruktur periode 2020-2024 $\text{Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kerjasama yg ditindaklanjuti}}{\text{Target Kerjasama Alternatif pembiayaan pembangungan infrastruktur Perkeretaapian}} \times 100\%$ Target kerjasama pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur (SP, OBC,FBC, Renstra, Proposal Minat Badan Usaha).
2.	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Ap	Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA	Perbandingan antara jumlah realisasi frekuensi perjalanan KA dengan jumlah program frekuensi perjalanan KA yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA} = \frac{\text{Jumlah realisasi frekuensi perjalanan KA}}{\text{jumlah program frekuensi perjalanan KA yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan}} \times 100\%$

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. LLAKA)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
		Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA tepat waktu	Perbandingan antara jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan KA tepat waktu dan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan KA Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) sub sektor perkeretaapian = (*Jumlah Realisasi kedatangan dan keberangkatan KA tepat waktu pada tahun berjalan* / *Jumlah Keseluruhan kedatangan dan keberangkatan KA pada tahun berjalan*) x 100%
		Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Penjumlahan antara pemenuhan angkutan penumpang dan pemenuhan angkutan barang dengan bobot masing-masing 50% Pemenuhan target angkutan KA = Pemenuhan target angkutan penumpang + pemenuhan target angkutan barang Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi Angkutan Penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api = (Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun berjalan / Target Pemenuhan Angkutan Penumpang dan Barang Kereta Api s.d 2024) X 50% Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi Angkutan Barang Kereta Api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan Angkutan Barang Kereta Api s.d 2024 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api = (Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun berjalan / Target Pemenuhan Angkutan Barang Kereta Api s.d 2024) X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. LLAKA)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
		Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA	Perbandingan antara jumlah NSPK yang telah disusun dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang LLAKA sesuai peraturan perundangan. Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian = (Jumlah NSPK yang sudah disusun pada tahun berjalan / Jumlah kebutuhan NSPK bidang prasarana pperkeretaapian) X 100%
3.	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat LLAKA	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA	Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian kinerja output dengan bobot 50% Persentase kualitas pelaksanaan anggaran = Persentase realisasi penyeraan anggaran + Persentase realisasi capaian kinerja output Persentase realisasi penyeraan anggaran : Persentase realisasi penyeraan anggaran = (Realisasi penyerapan anggaran / Keseluruhan anggaran tahun berjalan) X 50% Persentase realisasi capaian kinerja output Persentase realisasi capaian kinerja output = (Realisasi capaian kinerja output / Target kinerja output tahun berjalan) X 50%
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA	Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA = (Realisasi realisasi penerimaan PNBP / Target penerimaan PNBP Direktorat Sarana pada tahun berjalan) X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. PRASARANA)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubungan dengan jalur KA s.d tahun berjalan dengan rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang akan terhubung dengan Jalur KA sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 Rasio Konektivitas antar wilayah = *Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubungan jalur KA s.d tahun berjalan* / *PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang akan terhubung dengan Jalur KA sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030*
2.	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II	Perbandingan antara Panjang jalur Kereta Api yang telah diukur menggunakan Kereta Ukur Katergori I dan II dengan Panjang total Jalur Kereta Api yang diukur per periode dalam tahun berjalan Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II = (Panjang jalur KA yang telah diukur kategori I dan II pada tahun berjalan / Total panjang jalur KA) X 100%
3.	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal	Perbandingan antara jumlah unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi eksisting Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal = (Unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik yang dibangun/ditingkatkan / jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi) X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. PRASARANA)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
4.	Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian	Persentase prasarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan (jalur, bangunan, fasilitas operasi)	Perbandingan antara jumlah prasarana (jalur, bangunan, fasilitas operasi) yang sudah sertifikasi kelaikan dengan Jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian Persentase prasarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan (jalur, bangunan, fasilitas operasi) = (jumlah prasarana yang sudah sertifikasi kelaikan pada tahun berjalan / Jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian 2020 - 2024) X 100%
5.	Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	Perbandingan antara jumlah NSPK yang sudah disusun s.d tahun berjalan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundangan Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian = (Jumlah NSPK yang sudah disusun pada tahun berjalan / Jumlah kebutuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian s.d Tahun 2024) X 100%
6.	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian kinerja output dengan bobot 50% Persentase kualitas pelaksanaan anggaran = Persentase realisasi penyeraaan anggaran + Persentase realisasi capaian kinerja output Persentase realisasi penyerapan anggaran : Persentase realisasi penyeraan anggaran = (Realisasi penyerapan anggaran / Keseluruhan anggaran tahun berjalan) X 50%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. PRASARANA)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			Persentase realisasi capaian kinerja output $\text{Persentase realisasi capaian kinerja output} = \frac{\text{Realisasi capaian kinerja output}}{\text{Target kinerja output tahun berjalan}} \times 50\%$
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang prasarana perkeretaapian	Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan $\text{Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi realisasi penerimaan PNBP}}{\text{Target penerimaan PNBP Direktorat Prasarana pada tahun berjalan}} \times 100\%$

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. SARANA)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun dengan jumlah yang sudah ditindaklanjuti/ dilegalkan pada periode 2020-2024 Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti = Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun` / Jumlah yang sudah ditindaklanjuti/ dilegalkan X 100%
2.	Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian	Pemenuhan sarana penugasan untuk pelayanan perkeretaapian	Perbandingan antara jumlah realisasi revitalisasi sarana penugasan dengan total sarana penugasan untuk pelayanan perkeretaapian Pemenuhan sarana penugasan untuk pelayanan perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti = Jumlah realisasi sarana penugasan untuk pelayanan / Total sarana penugasan untuk pelayanan perkeretaapian X 100%
3.	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	Pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara	Perbandingan antara realisasi pengadaan dan pengoperasian Sarana Milik Negara dengan jumlah total pengadaan dan pengoperasian Sarana Milik Negara secara keseluruhan (tahun 2021 s.d 2024) Pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara = Jumlah realisasi pengadaan dan pengoperasian Sarana Milik Negara pada tahun berjalan / Jumlah pengadaan dan pengoperasian Sarana Milik Negara 2020 - 2024 X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. SARANA)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
		Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan	Perbandingan antara jumlah sarana yang sudah sertifikasi kelaikan dengan jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian Pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara = (jumlah sarana yang sudah sertifikasi kelaikan pada tahun berjalan / Jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian 2020 - 2024) X 100%
		Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan *Rampcheck* dengan hasil baik/ temuan minor	Perbandingan antara jumlah sarana yang dilakukan *rampcheck* hasil baik/temuan minor dengan jumlah sarana yang dilakukan *rampcheck* Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor = (Jumlah sarana yang dilakukan *rampcheck* hasil baik/temuan minor pada tahun berjalan / Jumlah sarana yang dilakukan rampcheck pada tahun berjalan) X 100%
		Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	Perbandingan antara jumlah NSPK yang sudah disusun dengan jumlah kebutuhan NSPK sesuai amanah peraturan perundangan Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian = (Jumlah NSPK yang sudah disusun pada tahun berjalan / Jumlah kebutuhan NSPK bidang sarana pperkeretaapian) X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. SARANA)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bidang sarana perkeretaapian	Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian kinerja output dengan bobot 50% Persentase kualitas pelaksanaan anggaran = Persentase realisasi penyeraan anggaran + Persentase realisasi capaian kinerja output Persentase realisasi penyeraan anggaran : Persentase realisasi penyeraan anggaran = (Realisasi penyerapan anggaran / Keseluruhan anggaran tahun berjalan) X 50% Persentase realisasi capaian kinerja output Persentase realisasi capaian kinerja output = (Realisasi capaian kinerja output / Target kinerja output tahun berjalan) X 50%
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian	Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA = (Realisasi realisasi penerimaan PNBP / Target penerimaan PNBP Direktorat Sarana pada tahun berjalan) X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. KESELAMATAN)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Perbandingan realisasi penerapan SMKP pada operator Perkeretaapian pada tahun berjalan dengan target pemenuhan kriteria SMKP pada tahun berjalan Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) = (Realisasi penerapan SMKP Operator perkeretaapian pada tahun berjalan / Kriteria SMKP pada tahun berjalan) X 100%
		Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	Perbandingan jumlah realisasi sertifikat kompetensi SDM regulator perkeretaapian pada tahun berjalan dengan jumlah target SDM regulator perkeretaapian pada tahun berjalan Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS) = (Realisasi sertifikat kompetensi SDM regulator perkeretaapian pada tahun berjalan / jumlah target SDM regulator pekeretaapin pada tahun berjalan) X 100%
		Presentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	Perbandingan jumlah realisasi sertifikat kompetensi SDM operator perkeretaapian pada tahun berjalan dengan jumlah target SDM operator perkeretaapian pada tahun berjalan Presentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS) = (Realisasi sertifikat kompetensi SDM operator perkeretaapian pada tahun berjalan / Jumlah target SDM operator perkeretaapian pada tahun berjalan) X 100%
		Persentase rekomendasi keamanan dan keselamatan yang menjadi kebijakan stakeholder/ sudah diimplementasikan/ ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun dengan jumlah yang sudah ditindaklanjuti/ dilegalkan pada periode 2020-2024 Persentase rekomendasi keamanan dan keselamatan yang menjadi kebijakan stakeholder/sudah diimplementasikan/ ditindaklanjuti = (Jumlah yang sudah ditindaklanjuti/ dilegalkan / Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun) X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. KESELAMATAN)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
		Persentase Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Perbandingan antara jumlah NSPK yang telah disusun dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang sarana sesuai ketentuan peraturan perundangan Persentase Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian = (Jumlah NSPK yang sudah disusun pada tahun berjalan / Jumlah kebutuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian) X 100%
		Persentase sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	Perbandingan antara realisasi sertifikat akeditasi lembaga pendidikan perkeretaapian pada tahun berjalan dengan jumlah target sertifikat akeditasi lembaga pendidikan perkeretaapian pada tahun berjalan Persentase sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian = (Realisasi sertifikat lembaga pendidikan perkeretaapian pada tahun berjalan / Jumlah target sertifikat akeditasi lembaga pendidikan perkeretaapian pada tahun berjalan perkeretaapian) X 100%
2.	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit.Keselamatan	Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian kinerja output dengan bobot 50% Persentase kualitas pelaksanaan anggaran = Persentase realisasi penyeraan anggaran + Persentase realisasi capaian kinerja output Persentase realisasi penyerapan anggaran : Persentase realisasi penyeraan anggaran = (Realisasi penyerapan anggaran / Keseluruhan anggaran tahun berjalan) X 50%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. KESELAMATAN)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			Persentase realisasi capaian kinerja output $\text{Persentase realisasi capaian kinerja output} = \frac{\text{Realisasi capaian kinerja output}}{\text{Target kinerja output tahun berjalan}} \times 50\%$
		Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan $\text{Persentase pemenuhan target perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisas penerimaan PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian}}{\text{Target penerimaan PNBP Direktorat Keselamatan pada tahun berjalan}} \times 100\%$

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BTP)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya KONEKTIVITAS prasarana di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Perbandingan antara wilayah yang telah ditetapkan sebagai PKN/PKW/PKSN/KSN/Pelabuhan/Bandara dan sudah terhubung dengan jalur KA sampai dengan tahun berjalan dengan keseluruhan wilayah PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara yang ada di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian selama periode RIPNAS 2030 *Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian* = *Jumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara dan sudah terhubung dengan jalur KA s.d tahun berjalan* / *Target PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara yang akan terhubung jalur KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian selama periode RIPNAS 2030* x 100%
2.	Meningkatnya KAPASITAS prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Teknik	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II	Perbandingan antara panjang jalur Kereta Api yang telah diukur menggunakan Kereta Ukur Katergori I dan II dengan Panjang total Jalur Kereta Api yang diukur per periode dalam tahun berjalan Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik = *Panjang jalur KA yang telah diukur kategori I dan II* / *Total panjang jalur KA* x 100%
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian	Perbandingan antara JUMLAH unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi eksisting Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian = Jumlah unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik / Jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi x 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BTP)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
3.	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN lalu lintas dan angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik	Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian	Penjumlahan antara pemenuhan angkutan penumpang dan pemenuhan angkutan barang dengan bobot masing-masing 50% Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik = *Pemenuhan target angkutan penumpang* + *pemenuhan target angkutan barang* Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi Angkutan Penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api = $\frac{\textit{Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\textit{Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024}}$ X 100% Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi Angkutan Barang Kereta Api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan Angkutan Barang Kereta Api s.d 2024 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api = $\frac{\textit{Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\textit{Target Pemenuhan Angkutan Barang Kereta Api s.d 2024}}$ X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BTP)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
		Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian	Perbandingan antara realisasi perjalanan KA perintis pada tahun berjalan dengan target perjalanan KA perintis pada tahun berjalan *Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian* = $\frac{\textit{Realisasi perjalanan KA perintis pada tahun berjalan}}{\textit{Target perjalanan KA perintis pada tahun berjalan}}$ X 100%
4.	Meningkatnya KESELAMATAN transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian	Perbandingan antara selisih kejadian kecelakaan tahun berjalan dan kejadian kecelakaan tahun sebelumnya dengan kejadian kecelakaan tahun sebelumnya di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Persentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian = $\frac{\text{Selisih kejadian kecelakaan tahun berjalan dan kejadian kecelakaan tahun sebelumnya}}{\text{Kejadian kecelakaan tahun sebelumnya}}$ X 100% Keterangan : • Jenis kecelakaan yang dlakukang penghitungan antara lain tabrakan KA dengan KA, Anjlokan, Terguling, Terbakar • Jika tahun sebelumnya tidak terjadi kecelakaan, maka target 2021 adalah 0 kecelakaan (100%)
5.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian kinerja output dengan bobot 50% Persentase kualitas pelaksanaan anggaran = *Persentase realisasi penyeraan anggaran* + *Persentase realisasi capaian kinerja output*

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BTP)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			Persentase realisasi penyerapan anggaran : $\text{Persentase realisasi penyeraan anggaran} = \frac{\text{Realisasi penyerapan anggaran}}{\text{Keseluruhan anggaran tahun berjalan}} \times 100\%$ Persentase realisasi capaian kinerja output $\text{Persentase realisasi capaian kinerja output} = \frac{\text{Realisasi capaian kinerja output}}{\text{Target kinerja output tahun berjalan}} \times 100\%$
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Balai Teknik perkeretaapian	Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan $\text{Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi realisasi penerimaan PNBP}}{\text{Target penerimaan PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada tahun berjalan}} \times 100\%$

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGUJIAN)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya KEHANDALAN sarana perkeretaapian	Pemenuhan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian	Perbandingan antara jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan pengujian dengan jumlah kebutuhan/target pengujian sarana perkeretapaaian sesuai Renstra 2020-2024 *Pemenuhan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian* = *Realisasi sarana perkeretaapian yang dilakukan pengujian* / *Target Pengujian Sarana Perkeretaapian 2020-2024* x 100%
2.	Meningkatnya KOMPETENSI SDM Perkeretaapian	Pemenuhan pengujian kompetensi SDM perkeretaapian	Perbandingan antara jumlah SDM perkeretaapian dilakukan pengujian dengan jumlah kebutuhan/target kompetensi SDM perkeretaapian sesuai Renstra 2020-2024 Pemenuhan pengujian kompetensi SDM perkeretaapian = *Realisasi SDM Perkeretaapian yang dilakukan pengujian* / *Target SDM perkeretaapian yang dilakukan pengujian 2020-2024* x 100%
3.	Meningkatnya KEHANDALAN prasarana perkeretaapian	Pemenuhan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian	Perbandingan antara jumlah prasarana yang dilakukan pengujian dengan jumlah kebutuhan/target pengujian prasarana sesuai Renstra 2020-2024 Pemenuhan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian = Realisasi prasarana perkeretapian yang dilakukan pengujian / Target prasarana perkeretaapian yang dilakukan pengujian 2020-2024 x 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGUJIAN)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
4.	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Perbandingan antara jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan pengujian dengan jumlah kebutuhan/target pengujian sarana perkeretapaaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran = *Persentase realisasi penyeraan anggaran* + *Persentase realisasi capaian kinerja output* Persentase realisasi penyeraan anggaran : *Persentase realisasi penyerapan anggaran* = $\frac{\textit{Realisasi penyerapan anggaran}}{\textit{Keseluruhan anggaran tahun berjalan}}$ X 100% Persentase realisasi capaian kinerja output *Persentase realisasi capaian kinerja output* = $\frac{\textit{Realisasi capaian kinerja output}}{\textit{Target kinerja output tahun berjalan}}$ X 100%
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan *Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik perkeretaapian* = $\frac{\textit{Realisasi realisasi penerimaan PNBP}}{\textit{Target penerimaan PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada tahun berjalan}}$ X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PERAWATAN)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	Perbandingan jumlah sarana yang siap operasi dan jumlah seluruh sarana milik negara *Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi* = *Jumlah realisasi sarana yang dilakukan perawatan/siap operasi* / *Jumlah seluruh sarana milik negara* X 100%
2.	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian kinerja output dengan bobot 50% Persentase kualitas pelaksanaan anggaran = *Persentase realisasi penyeraan anggaran* + *Persentase realisasi capaian kinerja output* Persentase realisasi penyerapan anggaran : *Persentase realisasi penyeraan anggaran* = *Realisasi penyerapan anggaran* / *Keseluruhan anggaran tahun berjalan* X 100% Persentase realisasi capaian kinerja output *Persentase realisasi capaian kinerja output* = *Realisasi capaian kinerja output* / *Target kinerja output tahun berjalan* X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKARSS)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi Kereta Api Ringan di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Pemenuhan target angkutan penumpang Kereta Api Ringan Sumatera Selatan diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi Angkutan Penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api sesuai renstra periode 2020-2024 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan = *Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun berjalan* / *Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024* X 50%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Perbandingan antara realisasi dan target dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat berupa indeks kepuasan masyarakat (nilai 1-5)
		OTP LRT Sumatera Selatan	Perbandingan antara jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan LRT tepat waktu dan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan LRT Sumatera Selatan Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan sumatera selatan tepat waktu = Jumlah Realisasi kedatangan dan keberangkatan LRT Sumsel tepat waktu / Jumlah Keseluruhan kedatangan dan keberangkatan LRT Sumatera Selatan X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKARSS)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
2.	Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang selesai ditindaklanjuti	Perbandingan antara realisasi/penyelesaian tindak lanjut terhadap gangguan keamanan yang terjadi baik operasi, sarana dan prasarana Persentase Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang selesai ditindaklanjuti = *Realisasi Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang selesai ditindaklanjuti* / *Jumlah Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang selesai* x 100%
3	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 40% dengan jumlah capaian kinerja output dengan bobot 60% Persentase kualitas pelaksanaan anggaran = *Persentase realisasi penyeraan anggaran* + *Persentase realisasi capaian kinerja output* Persentase realisasi penyeraan anggaran : *Persentase realisasi penyeraan anggaran* = *Realisasi penyerapan anggaran* / *Keseluruhan anggaran tahun berjalan* x 100% Persentase realisasi capaian kinerja output *Persentase realisasi capaian kinerja output* = *Realisasi capaian kinerja output* / *Target kinerja output tahun berjalan* x 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKARSS)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan = $\frac{\textit{Realisasi realisasi penerimaan PNBP}}{\textit{Target penerimaan PNBP BPKARSS pada tahun berjalan}}$ X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKA SULSEL)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya KONEKTIVITAS prasarana perkeretaapian	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Perbandingan antara wilayah yang telah ditetapkan sebagai PKN/PKW/PKSN/KSN/Pelabuhan/Bandara dan sudah terhubung dengan jalur KA sampai dengan tahun berjalan dengan keseluruhan wilayah PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara yang ada di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian selama periode RIPNAS 2030 *Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Pengelola Kereta Api* = *Jumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara dan sudah terhubung dengan jalur KA s.d tahun berjalan* / *Target PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara yang akan terhubung jalur KA di wilayah Balai Pengelola Kereta Api selama periode RIPNAS 2030* x 100%
2.	Meningkatnya KAPASITAS prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Perbandingan antara panjang jalur Kereta Api yang telah diukur menggunakan Kereta Ukur Katergori I dan II dengan Panjang total Jalur Kereta Api yang diukur per periode dalam tahun berjalan Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Pengelola Kereta Api = *Panjang jalur KA yang telah diukur kategori I dan II* / *Total panjang jalur KA* x 100%
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Perbandingan antara JUMLAH unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi eksisting Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Pengelola Kereta Api = Jumlah unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik / Jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi x 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKA SULSEL)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
3.	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN lalu lintas dan angkutan KA di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Pemenuhan target angkutan KA Sulawesi Selatan	Penjumlahan antara pemenuhan angkutan penumpang dan pemenuhan angkutan barang dengan bobot masing-masing 50% Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik = *Pemenuhan target angkutan penumpang* + *pemenuhan target angkutan barang* Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi Angkutan Penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api = *Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun berjalan* / *Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024* X 100% Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi Angkutan Barang Kereta Api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan Angkutan Barang Kereta Api s.d 2024 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api = *Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun berjalan* / *Target Pemenuhan Angkutan Barang Kereta Api s.d 2024* X 100%

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKA SULSEL)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Perbandingan antara realisasi dan target dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat berupa indeks kepuasan masyarakat (nilai 1-5)
		Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu dan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan Kereta Api Sulawesi Selatan Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan sumatera selatan tepat waktu = (Jumlah Realisasi kedatangan dan keberangkatan LRT Sumsel tepat waktu / Jumlah Keseluruhan kedatangan dan keberangkatan LRT Sumatera Selatan) X 100%
4	Meningkatnya KESELAMATAN transportasi kereta api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Persentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Perbandingan antara selisih kejadian kecelakaan tahun berjalan dan kejadian kecelakaan tahun sebelumnya dengan kejadian kecelakaan tahun sebelumnya di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Persentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan = (Selisih kejadian kecelakaan tahun berjalan dan kejadian kecelakaan tahun sebelumnya / Kejadian kecelakaan tahun sebelumnya) X 100% Keterangan : • Jenis kecelakaan yang dlakukang penghitungan antara lain tabrakan KA dengan KA, Anjlokan, Terguling, Terbakar • Jika tahun sebelumnya tidak terjadi kecelakaan, maka target 2021 adalah 0 kecelakaan (100%)

Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKA SULSEL)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
5.	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan = $\frac{\textit{Realisasi realisasi penerimaan PNBP}}{\textit{Target penerimaan PNBP BPKARSS pada tahun berjalan}}$ X 100%
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian kinerja output dengan bobot 50% Persentase kualitas pelaksanaan anggaran = *Persentase realisasi penyeraan anggaran* + *Persentase realisasi capaian kinerja output* Persentase realisasi penyerapan anggaran : *Persentase realisasi penyerapan anggaran* = $\frac{\textit{Realisasi penyerapan anggaran}}{\textit{Keseluruhan anggaran tahun berjalan}}$ X 100% Persentase realisasi capaian kinerja output *Persentase realisasi capaian kinerja output* = $\frac{\textit{Realisasi capaian kinerja output}}{\textit{Target kinerja output tahun berjalan}}$ X 100%

Lanjutan ... (RUMUS PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA)

1. Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus A:

$$Capaian\ Kinerja = \left[\frac{Realisasi}{Target}\right] \times 100\%$$

2. Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus B:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%

Sumber : Permenhub No. PM 85 tahun 2020

C. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

- Permenhub Nomor PM.69 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2020

Merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

- Disusun paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan.
- Dapat direvisi atau dilakukan penyesuaian terhadap Renstra yang telah direvisi/disesuaikan

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT KERJA ESELON I / II / SATUAN KERJA

RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT KERJA ESELON I / II / SATUAN KERJA
TAHUN 20XX

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

.....,.....20xx

PIMPINAN UNIT KERJA (6)

((7))

Lanjutan... (FORMAT RKT)

RENSTRA

Visi	Misi	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	IKSS/ IKP/ IKK	Baseline (Tahun ke-1)	Target Kinerja					Rencana Anggaran				
						Tahun ke1	Tahun ke2	Tahun ke3	Tahun ke4	Tahun ke5	Tahun ke1	Tahun ke2	Tahun ke3	Tahun ke4	Tahun ke5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

RKT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Lanjutan ... (*OUTLINE* RKT)

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN
1. 1 Dasar Hukum
1. 2 Latar Belakang
1. 3 Maksud dan Tujuan
1. 4 Organisasi dan Tusi Ditjen Perkeretaapian

BAB II RENCANA STRATEGIS
2. 1 Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional
2. 2 Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Perhubungan
   2.2.1 Visi
   2.2.2 Misi
   2.2.3 Tujuan
   2.2.4 Sasaran Strategis
2. 3 ....

Lanjutan ... (*OUTLINE* RKT)

2. 3 Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- 2.3.1 Visi
- 2.3.2 Misi
- 2.3.3 Tujuan dan Sasaran
- 2.3.4 Arah Kebijakan dan Strategi
- 2.3.5 Target Kinerja

2.4 Rencana Kerja (RENJA)

BAB III KONDISI/CAPAIAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN

3. 1 Evaluasi Pembiayaan/Pendanaan
3. 2 Capaian Pembangunan Perkeretaapian
3. 3 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan (IKP/IKK)
3. 4 Capaian *Output* Unit Kerja

BAB IV RENCANA KINERJA TAHUNAN

4. 1 Isu-Isu Strategis Pembangunan Perkeretaapian
4. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Perkeretaapian
4. 3 Program Prioritas Pembangunan Perkeretaapian
4. 4 Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan
4. 5 Rencana Kinerja

BAB V PENUTUP

D. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA) adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga.

- Peraturan Menteri Keuangan No.208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanl No.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Perhubungan No.80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 186 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
- Peraturan Direktur Jenderal Perkekretaapian No.HK.207/SK.32/DJKA/ 2018 tentang Pedoman Kompoisisi Kebutuhan Personil dan Non Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.006/A.589/DJKA/X/19 tentang Tata Cara Pengusulan Kegiatan Swakelola pada Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Lanjutan... (HUBUNGAN DOK. PERENCANAAN & PENGANGGARAN)

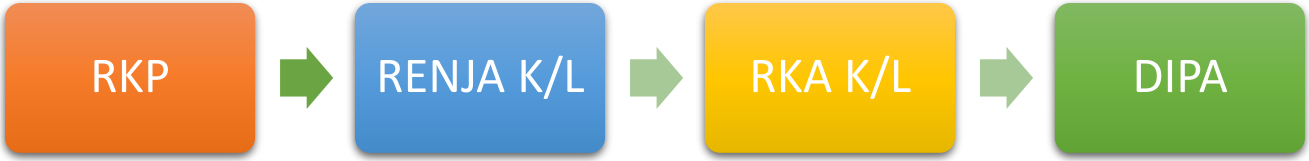

Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Ekspektasi dari kebijakan tersebut adalah hasil/kinerja secara nasional (*national outcomes*). Kemudian disusun

a) Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, dan hasil pada Unit Eselon I sesuai dengan tugas-fungsinya;
b) Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan keluaran pada Unit pengeluaran (*spending* unit) pada tingkat Satker atau Eselon II di lingkungan Unit Eselon I sesuai Program yang menjadi tanggung jawabnya.

Sumber : Kepmenhub No. KM 186/2020

Lanjutan … (PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN)

Secara garis besar, proses pentahapan penyusunan anggaran terbagi atas:

- **Penyusunan RKA Pagu Kebutuhan**
- **Penyusunan RKA Pagu Indikatif**
- **Penyusunan RKA Pagu Anggaran**
- **Penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran**
- **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)**

Sumber : Kepmenhub No. KM 186/2020

Lanjutan ... (RUANG LINGKUP)

Berdasarkan prinsip RSPP, ruang lingkup dalam penyusunan RKA K/L:

RUANG LINGKUP PROGRAM :

a. Program Generik (bersifat pendukung)
Program Generik merupakan program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintah (birokrasi).

b. Program Teknis
Program teknis merupakan program yang didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP.

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

a. Kegiatan Generik (bersifat pendukung)
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan internai Kementerian/Lembaga (dukungan manajemen internai) yang digunakan oleh Unit Kerja Eselon II

b. Kegiatan Teknis
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga serta mendukung sasaran pembangunan nasional.

RUANG LINGKUP *OUTPUT* :

a. Klasifikasi Rincian *Output* (KRO)
Kumpulan keluaran (*output*) K/L atau rincian *output* yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (*output*) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/ bidang/jenis tertentu secara sistematis.

b. Rincian *Output* (RO)
Keluaran *output riil* yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut.

Sumber : Kepmenhub No. KM 186/2020

Lanjutan... (REDESAIN SISTEM PERENCANAAN & PENGANGGARAN)

022.GA

Program: Infrastruktur Konektivitas

27 KRO
103 RO

1. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian
3. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian

022.WA

Program: Dukungan Manajemen

13 KRO
19 RO

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
5. Legislasi dan Ligitasi Transportasi Perkeretaapian

Lanjutan... (URAIAN KLASIFIKASI RINCIAN *OUTPUT*/KRO KEGIATAN DITJEN PERKERETAAPIAN)

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
3. Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian
4. Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian
5. OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian
6. OM Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian
7. Akreditasi Lembaga
8. Sertifikasi Produk
9. Sertifikasi Profesi dan SDM
10. Layanan Data dan Informasi
11. Layanan Hukum
12. Layanan Kehumasan dan Protokoler
13. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internan
14. Layanan Monitoring Dan Evaluasi Internal
15. Layanan Operasi dan Tata Kelola Internal
16. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Interna
17. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
18. Layanan Perkantoran
19. Layanan Prasarana Internal
20. Layanan Sarana Internal
21. Layanan Sumber Daya Manusia
22. Layanan Umum
23. Pelayanan Publik Lainnya

Lanjutan ... (FORMAT RKA)

a. Rencana kinerja Satuan Kerja

BAGIAN A

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

A.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: (XXX).....	*(Berisikan Nama K/L beserta kodenya)*
B.	UNIT ORGANISASI	: (XXXXXX).....	*(Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)*
C.	SATUAN KERJA	: (XX).....	*(Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)*
D.	PROPINSI	: (XX).....	*(Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)*
E.	KABUPATEN/KOTA	: (XX).....	*(Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)*

Halaman :

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/HASIL/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN TA 20XX			
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
xxx.xx.xx	Program..... *(Berisikan uraian nama Program)*		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Indikator Kinerja Utama Program				
	1				
	2				
	Hasil				
	Hasil ..... (Berisikan uraian Hasil Program)				
xxxx	Kegiatan 1... *(Berisikan uraian nama Kegiatan)*		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	1				
	2				
	Output 1....*(Berisikan uraian Output Kegiatan)*	99 sat	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 2....*(Berisikan uraian Output Kegiatan)*	99 sat	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 3....*(Berisikan uraian Output Kegiatan)*	99 sat	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Dst.....				
xxxx	Kegiatan 2... *(Berisikan uraian nama Kegiatan)*		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	1				
	2				
	Output 1....*(Berisikan uraian Output Kegiatan)*				
	Output 2....*(Berisikan uraian Output Kegiatan)*				
	Output 3....*(Berisikan uraian Output Kegiatan)*				
	Dst.....				

b. Rincian Belanja Satuan Kerja

BAGIAN B

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

A.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:(XXX).....	*(Berisikan Nama K/L beserta kodenya)*
B.	UNIT ORGANISASI	:(XXXXXX).....	*(Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)*
C.	SATUAN KERJA	:(XX).....	*(Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)*
D.	PROPINSI	:(XX).....	*(Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)*
E.	KABUPATEN/KOTA	:(XX).....	*(Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)*

Halaman :

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/HASIL/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN TA 20XX				SD/CP	KP/KD/DK/TP
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
xxx.xx.xx	Program..... *(Berisikan uraian nama Program)*		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Indikator Kinerja Utama Program						
	1						
	2						
	Hasil						
	Hasil ..... (Berisikan uraian Hasil Program)						
xxxx	Kegiatan 1... *(Berisikan uraian nama Kegiatan)*		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Indikator Kinerja Kegiatan						
	1						
	2						
xxx.xx.xx	Output 1....*(Berisikan uraian Output Kegiatan)*	99 sat	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	Suboutput 1....*(berisikan uraian Suboutput)*		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	Komponen 1....*(berisikan uraian komponen)*		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Jumlah Komponen...*(Utama/Pendukung)*		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	Komponen 2....*(berisikan uraian komponen)*		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	dst.....						
xxx	Suboutput 2....*(berisikan uraian Suboutput)*		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	dst.....						
xxx.xx.xx	Output 2....*(Berisikan uraian Output Kegiatan)*	99 sat	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	Suboutput 1....*(berisikan uraian Suboutput)*	99 sat	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Dst.....		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	Kegiatan 2... *(Berisikan uraian nama Kegiatan)*		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Dst.....		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
			9.999.999	9.999.999	9.999.999		

PAGU	T.A 20XX		
	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
RM			
RMP			
PNBP			
BLU			
PLN			
HLN			
PDN			
HLN			
PBS			
TOTAL			

Lanjutan ... (FORMAT RKA)

c. Target Pendapatan Satuan Kerja

BAGIAN C

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (XXX)..... *(Berisikan Nama K/L beserta kodenya)*
B. UNIT ORGANISASI : (XXXXXX)..... *(Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)*
C. SATUAN KERJA : (XX)..... *(Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)*
D. PROPINSI : (XX)..... *(Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)*
E. KABUPATEN/KOTA : (XX)..... *(Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)*

KODE	PROGRAM KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/AKUN PENDAPATAN	TARGET	
		20XX - 1	20XX
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program..... *(Berisikan uraian nama Program)*	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 1... *(Berisikan uraian nama Kegiatan)*	9.999.999	9.999.999
	PERPAJAKAN	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	PNBP	9.999.999	9.999.999
	Umum	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Fungsional	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 2... *(Berisikan uraian nama Kegiatan)*	9.999.999	9.999.999
	Dst....		

TOTAL	TARGET TA 20XX - 1	TARGET TA 20XX
PERPAJAKAN		
PNBP		
1. UMUM		
2. FUNGSIONAL		

d. Prakiraan Maju Belanja dan Target

BAGIAN D

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (XXX)..... *(Berisikan Nama K/L beserta kodenya)*
B. UNIT ORGANISASI : (XXXXXX)..... *(Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)*
C. SATUAN KERJA : (XX)..... *(Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)*
D. PROPINSI : (XX)..... *(Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)*
E. KABUPATEN/KOTA : (XX)..... *(Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)*

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

KODE	PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT (VOL-SAT)	TA 20XX - 1	TA 20XX	TA 20XX + 1	TA 20XX + 2	TA 20XX + 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program..... *(Berisikan nama Program)*	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 1... *(Berisikan nama Kegiatan)*	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 1 *(Berisikan Output Kegiatan)*	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	(Volume Satuan Output)	(99 satuan)	(99 satuan)	(99 satuan)	(99 satuan)	(99 satuan)
	Output 2 *(Berisikan Output Kegiatan)*	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	(Volume Satuan Output)	(99 satuan)	(99 satuan)	(99 satuan)	(99 satuan)	(99 satuan)
	Output 3 *(Berisikan Output Kegiatan)*	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	(Volume Satuan Output)	(99 satuan)	(99 satuan)	(99 satuan)	(99 satuan)	(99 satuan)
	Dst....					
	Kegiatan 2... *(Berisikan nama Kegiatan)*					
	Dst....					

II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT (VOL-SAT)	20XX - 1	20XX	20XX + 1	20XX + 2	20XX + 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program..... *(Berisikan uraian nama Program)*	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 1... *(Berisikan uraian nama Kegiatan)*	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	PERPAJAKAN	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	PNBP	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	1. UMUM	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	2. FUNGSIONAL	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 2... *(Berisikan uraian nama Kegiatan)*					
	Dst....					

PAGU SATKER	BELANJA	TARGET PENDAPATAN
T.A. 20XX		
T.A. 20XX		
T.A. 20XX + 1		
T.A. 20XX + 2		
T.A. 20XX + 3		

E. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA, BERJENJANG & RENCANA AKSI

Lanjutan … (TUJUAN PERJANJIAN KINERJA)

Sumber: Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014

Lanjutan … (WAKTU PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA)

Kementerian

01

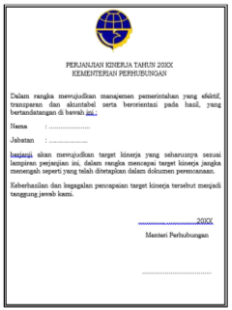

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

kegiatan akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

20XX
Menteri Perhubungan

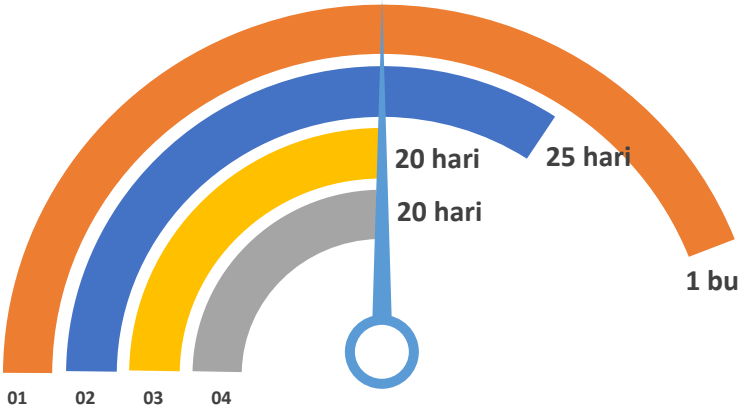

Unit Eselon I

02

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON I/ /II/ III / IV/ SATUAN KERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Pihak Pertama

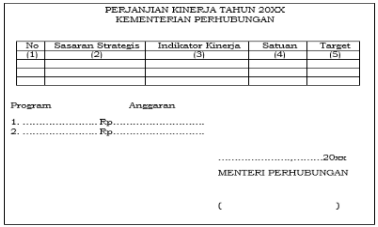

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Program Anggaran
1. ..... Rp.....
2. ..... Rp.....

.....,.....20xx
MENTERI PERHUBUNGAN

( )

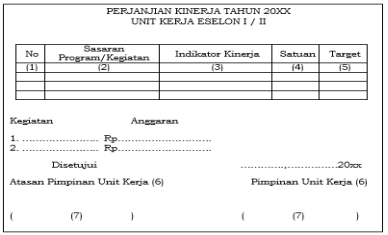

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON I / II

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kegiatan Anggaran
1. ..... Rp.....
2. ..... Rp.....

Disetujui .....,.....20xx
Atasan Pimpinan Unit Kerja (6) Pimpinan Unit Kerja (6)

((7)) ((7))

03 Unit Eselon II, III, dan IV, UPT

04 Fungsional/ Pelaksana

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020

Lanjutan…(FORMAT PERJANJIAN KINERJA)

a. **Pernyataan Perjanjian Kinerja Unit Kerja**
b. **Lampiran,** yang berisi:
   - ***Sasaran*** yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*);
   - ***Ukuran-ukuran kinerja*** yang jelas berupa: Indikator Kinerja *Output /Outcome*; dan Rencana tingkat capaian (Target) untuk tiap indikator;
   - ***Anggaran*** untuk setiap Program Utama.
   - ***Rencana Aksi*** untuk mencapai target kinerja

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020

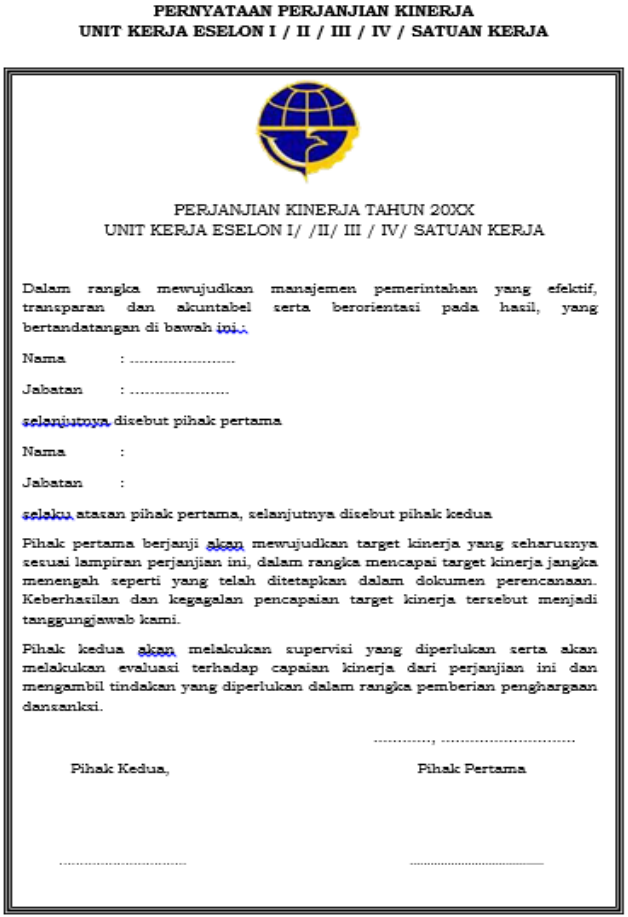

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA ESELON I / II / III / IV / SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON I/ /II/ III / IV/ SATUAN KERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

....., ...

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Lanjutan... (FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA)

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA ESELON I / II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON I / II

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kegiatan Anggaran

1. ..... Rp.....
2. ..... Rp.....

Disetujui .....,.....20xx

Atasan Pimpinan Unit Kerja (6) Pimpinan Unit Kerja (6)

((7)) ((7))

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kegiatan Anggaran

1 ..... Rp.....
2 ..... Rp.....

Disetujui .....,.....20xx

Atasan Pimpinan Satker (6) Pimpinan Satker (6)

((7)) ((7))

Lanjutan... (PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG)

Format Perjanjian Kinerja Berjenjang Eselon III dan IV

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON I/ /II/ III / IV/ SATUAN KERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

....., ...

Pihak Kedua, Pihak Pertama

....

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
BAGIAN/BIDANG/SUBDIT .....

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Disetujui .....,.....20xx

Atasan Langsung (6) Kepala Bagian/Bidang/Subdit (6)

((7)) ((7))

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA ESELON IV

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SUBBAGIAN/SUBBIDANG/SEKSI .....

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Disetujui .....,.....20xx

Atasan Langsung (6) Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi (6)

((7)) ((7))

Lanjutan... (PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG)

Format Perjanjian Kinerja Berjenjang Pelaksana/Staf/Fungsional

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
JABATAN PELAKSANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dansanksi.

....., ...

Pihak Kedua, Pihak Pertama

....

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
JABATAN PELAKSANA
UNIT KERJA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Disetujui .....,.....20xx

Atasan Langsung (7) Pelaksana (7)

((8)) ((8))

Lanjutan... (PERTIMBANGAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA)

- Cek kembali kamus/manual perhitungan indikator kinerja
- Memperhatikan capaian tahun sebelumnya sebagai baseline
- Cek kegiatan pendukung dan besaran anggaran pada DIPA/POK
- Tidak ada target kinerja Nol (0)
- Sinkronisasi dengan target Unit Pusat (Setditjen/Direktorat)

LANJUTAN... (*OUTLINE* PERJANJIAN KINERJA)

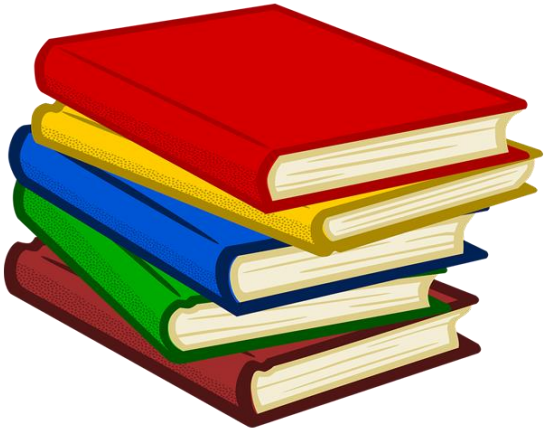

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA (TTD DIRJEN)

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Tugas dan Fungsi
- Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- Struktur Organisasi

BAB II RENCANA STRATEGIS

- Tujuan
- Sasaran
- Indikator Kinerja
- Program dan Kegiatan

BAB III RENCANA KINERJA

- Pengukuran Indikator Kinerja (Manual Indikator Kinerja)
- Target Perjanjian Kinerja
- Alokasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja (TTD DIRJEN)
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Lanjutan…(REVISI PERJANJIAN KINERJA)

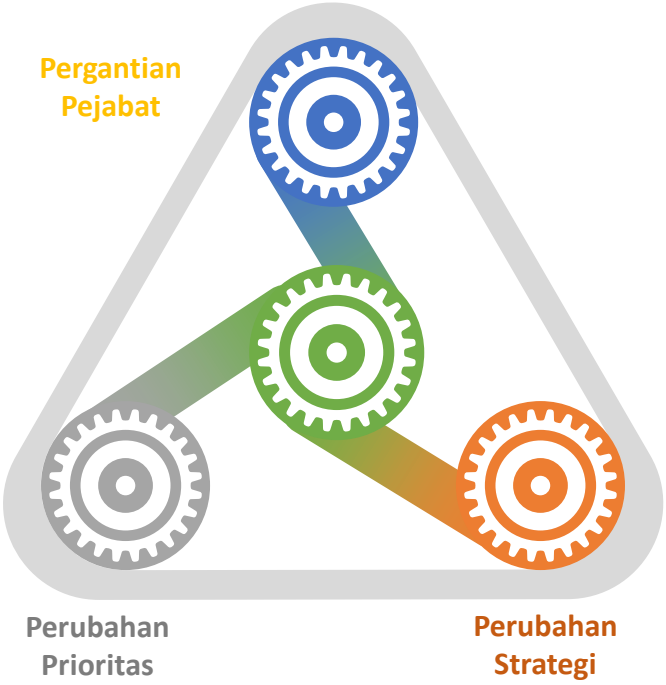

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020

Revisi Perjanjian Kinerja dilakukan **apabila**:

Pergantian / Mutasi Pejabat

Perubahan penanggung jawab target kinerja

Perubahan Prioritas

Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan Sasaran

Perubahan dalam Strategi

Yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan Sasaran berupa perubahan Renstra, struktur organisasi, Program, Kegiatan, dan alokasi anggaran

Lanjutan... (RENCANA AKSI)

Rencana Aksi merupakan penjabaran dari target Perjanjian Kinerja secara periodik dan upaya pencapaiannya yang disusun secara berjenjang

RENCANA AKSI	DIKOORDINASIKAN	DITANDATANGANI
Kementerian	Sekretariat Jenderal	Menteri
Unit Kerja Eselon I		
Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Inspektorat Jenderal Badan	Biro Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Badan	Pejabat JPT Madya
Unit Kerja Eselon II	Sub Bagian Tata Usaha Unit Kerja	Pejabat JPT Pratama
Satuan Kerja	Sub Bagian Tata Usaha Unit Kerja	Pimpinan Satuan Kerja

Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi setiap bulan. Rencana Aksi dapat dilakukan perubahan dengan syarat Revisi Perjanjian Kinerja telah ditandatangai.

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (Pasal 15-19)

Lanjutan... (FORMAT RENAKSI ESELON I)

Unit Kerja Eselon I

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON I

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

.....,.....20xx

PIMPINAN UNIT KERJA (21)

((22))

No Urut

IK Program/ Kegiatan Unit Es. I

Satuan IKp

Target PK Es. I

Sasaran program/kegiatan unit kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target IKp dan SSp

Rencana pelaksanaan target tiap bulan kegiatan untuk mencapai target IKp dan SSp unit kerja

Persetujuan Pimpinan Es. I

Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target IKp

Pejabat penanggung jawab pencapaian target IKp (Es. II)

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020

Lanjutan... (FORMAT RENAKSI ESELON II/SATUAN KERJA)

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

UNIT KERJA ESELON II / SATUAN KERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

.....,.....20xx

PIMPINAN UNIT KERJA (21)

No Urut

IK Kegiatan Unit Es. II

Satuan IKk

Target PK Es. II/ Satuan Kerja

Rencana pelaksanaan target tiap bulan kegiatan untuk mencapai target IKk dan SSk unit kerja

Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target IKk

Pejabat penanggung jawab pencapaian target IKk (Es. III)

Sasaran kegiatan unit kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target IKk dan SSk

Persetujuan Pimpinan Es. II / Satuan Kerja

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020

F. PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN & MONITORING RENCANA AKSI

Disusun sebagai penjabaran pencapaian target Kinerja Kementerian dan unit kerja Eselon I, II dan Satuan Kerja tiap triwulan

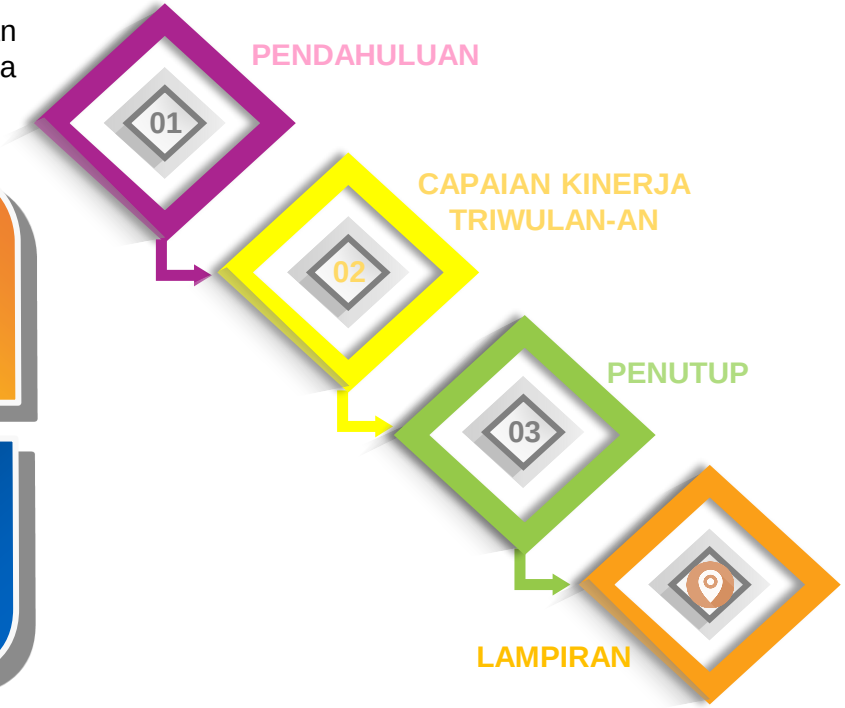

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020

Lanjutan ... (WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN)

LAPORAN TRIWULAN	DITANDATANGANI	KAPAN
Kementerian	Menteri	1 bulan
Unit Kerja Eselon I	Pejabat JPT Madya	25 hari
Unit Kerja Eselon II	Pejabat JPT Pratama	20 hari
Satuan Kerja	Pimpinan Satuan Kerja	20 hari

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (Pasal 36)

Lanjutan... (*OUTLINE* LAPORAN TRIWULAN)

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Tugas dan Fungsi
4. Struktur Organisasi
5. Perjanjian Kinerja Unit Kerja (Sasaran, Indikator, Target, Anggaran)

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN
1. Tahap Pengukuran Kinerja
2. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan
   Masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
   A.Capaian Kinerja
   B.Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagallan
   C.Upaya Peningkatan Kinerja
3. Capaian Lainnya (apabila ada)
4. Realisasi Anggaran (Unit Kerja, Per Indikator Kinerja)

BAB III PENUTUP
1. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya
2. Kesimpulan
3. Rekomendasi

LAMPIRAN
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja termasuk Renaksi
Lampiran 2. Komitmen Pimpinan terkait Rekomendasi Peningkatan Kinerja
Lampiran 3. Monitoring Rencana Aksi Per Bulan
Lampiran 4. Data Dukung Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)

Lanjutan... (FORMAT *MANDATORY* LAPORAN TRIWULAN)

BAB 1: Target Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV

BAB 1: Alokasi Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Berdasarkan PK

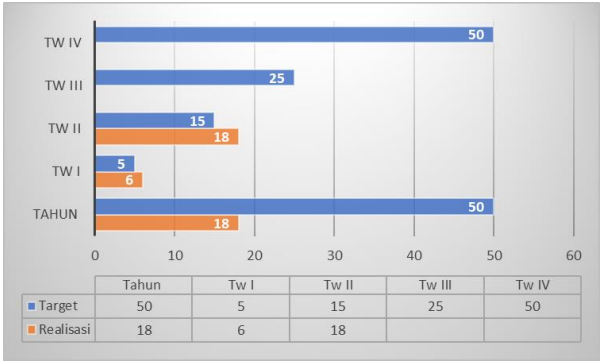

BAB 2: Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	

Lanjutan... (FORMAT *MANDATORY* LAPORAN TRIWULAN)

BAB 2: Realisasi Anggaran Unit Kerja

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai						
2	Belanja Barang						
3	Belanja Modal						
	a. Rupiah Murni						
	b. SBSN						
	c. PHLN						
	d. BLU						

BAB 2: Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Pagu Sesuai PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1								
2								
3								

Lanjutan... (FORMAT *MANDATORY* LAPORAN TRIWULAN)

BAB 3: Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut

BAB 3: Kesimpulan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Kinerja Triwulan (%)

Lanjutan... (FORMAT MONITORING RENAKSI ESELON I)

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

UNIT KERJA ESELON I

BULAN.... TAHUN ....

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan-n				Realisasi Bulan-n		% Capaian Bulan-n		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

No Urut

Kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan

IK Program/ Kegiatan Unit Es. I

Satuan IKp

Target PK Es. I

Kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencapai target IKp dan SSp

IK dari kegiatan dimaksud

Target IK kegiatan tahunan dimaksud

Besaran volume target IK kegiatan

Persentase dari target IK kegiatan

Besaran anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target IK kegiatan

Persentase dari target anggaran IK kegiatan

Realisasi volume target IK kegiatan

Realisasi anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk mencapai target IK kegiatan

Persentase realisasi target IK kegiatan

Persentase realisasi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target IK kegiatan

Evaluasi singkat dari capaian IK kegiatan

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan pencapaian target IK kegiatan

Pejabat penanggung jawab pencapaian target IK kegiatan (Es.II)

Lanjutan... (FORMAT MONITORING RENAKSI ESELON II/SATUAN KERJA)

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

UNIT KERJA ESELON II / SATUAN KERJA

BULAN.... TAHUN ....

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-n				Realisasi Bulan-n		% Capaian Bulan-n		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

No Urut

Kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan

IK Kegiatan Unit Es. II / Satuan Kerja

Satuan IKk

Target PK Es. II/ Satuan Kerja

Kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencapai target IKk dan SSk

IK dari kegiatan dimaksud

Target IK kegiatan tahunan dimaksud

Besaran volume target IK kegiatan

Persentase dari target IK kegiatan

Besaran anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target IK kegiatan

Persentase dari target anggaran IK kegiatan

Realisasi volume target IK kegiatan

Realisasi anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk mencapai target IK kegiatan

Persentase realisasi target IK kegiatan

Persentase realisasi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target IK kegiatan

Evaluasi singkat dari capaian IK kegiatan

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan pencapaian target IK kegiatan

Pejabat penanggung jawab pencapaian target IK kegiatan (Es.III)

G. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kerangka Berpikir

Direncanakan → **Dilaksanakan** → **Diukur** → **Dievaluasi** → **Dilaporkan**

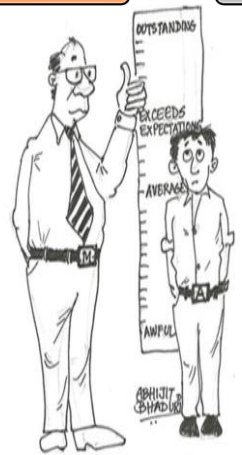

Mengapa Kinerja Harus Diukur?

TIDAK DIUKUR

BERHASIL?		***GAGAL?***
Reward	Tidak dapat meningkatkan kinerja	Punishment
Tidak dapat mempertahankan keberhasilan	Sumber daya sia-sia	Tetap melakukan kesalahan

Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan VISI, MISI dan STRATEGI Instansi Pemerintah.

Lanjutan… (DEFINISI DAN TUJUAN)

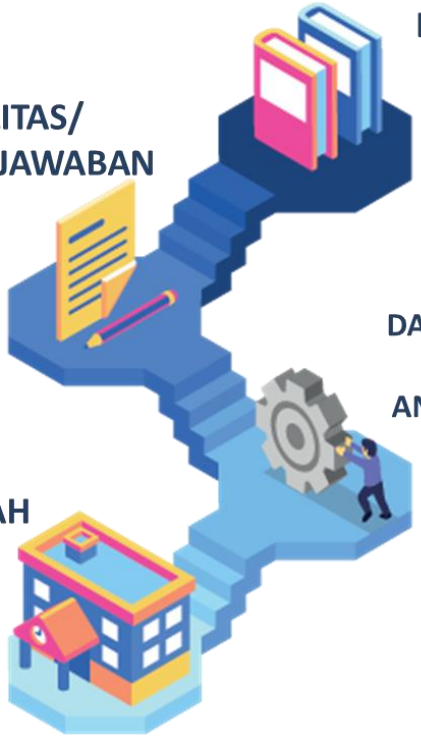

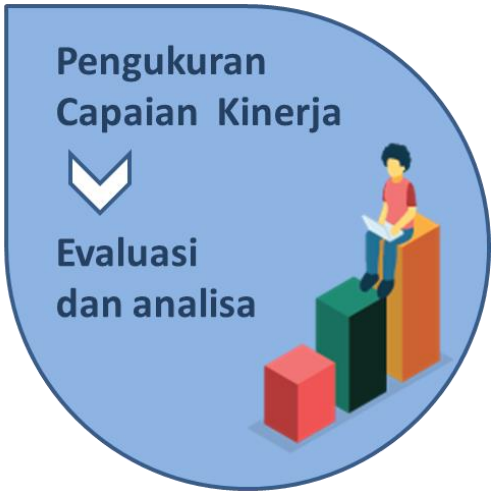

Merupakan dokumen yang berisi **gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja**, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik

FUNGSI LAPORAN KINERJA:

- ✓ Media hubungan kerja organisasi
- ✓ Media akuntabilitas
- ✓ Media informasi umpan balik perbaikan kinerja

TUJUAN LAPORAN KINERJA:

- ✓ Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- ✓ Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Lanjutan ... (WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA)

LAPORAN KINERJA	DISUSUN	DITANDATANGANI	DISAMPAIKAN KE	KAPAN
Kementerian	Sesjen c.q Kepala Biro Perencanaan	Menteri	• Menteri Keuangan • Kepala Bappenas/ Men PPN • Menteri PAN & RB	2 bulan
Unit Kerja Eselon I	Pimpinan Tinggi Madya	Pejabat JPT Madya	Menteri Perhubungan	45 hari
Unit Kerja Eselon II	Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat JPT Pratama	Pejabat JPT Madya	30 hari
Satuan Kerja	Pimpinan Satuan Kerja	Pimpinan Satuan Kerja	Atasan Langsung	25 hari

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (Pasal 24-26)

Lanjutan ... (FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang
1. 2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja
1. 3 Struktur Organisasi
1. 4 Sumber Daya Manusia
1. 5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
1. 6 Sistematika Laporan

Berisi penjelasan organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2. 1 Uraian Singkat Rencana Strategis
(Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran, Target Kinerja)
2. 2 Perjanjian Kinerja

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020

Lanjutan ... (FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1 Tahapan Pengukuran Kinerja

3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja

- A. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Revisi PK dilengkapi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang perlu dilakukan
- B. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- C. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Kinerja Pada Tahun bersangkutan Dalam Periode Renstra Kemenhub
- D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target nasional (jika ada);

3. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

3. 4 Capaian Keberhasilan Lainnya

3. 5 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja oganisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020

Evaluasi dan analisis setiap sasaran strategis dan kondisi terakhir yang dicapai yang juga mencakup efisiensi sumber daya

Lanjutan ... (FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

BAB IV PENUTUP

4. 1 Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Sebelumnya

4. 1 Kesimpulan (diantaranya meliputi simpulan pencapaian kinerja dan prestasi unit kerja)

4. 3 Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah di masa akan datang untuk meningkatkan kinerja organisasi

LAMPIRAN

Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran II. Perjanjian Kerja (revisi terakhir)

Lampiran III. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Lampiran IV. Monitoring Rencana Aksi

Lampiran V. Data Dukung Capaian Kinerja Yang Valid

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)

Lanjutan... (FORMAT *MANDATORY* LAPORAN TAHUNAN/LKIP)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran 1	IKP 1	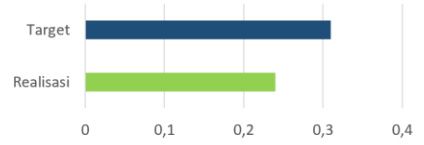	100

BAB 2.1: Rencana Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024

BAB 2.2: Perjanjian Kinerja (Sasaran, Indikator dan Target Kinerja)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV

BAB 2.2: Perjanjian Kinerja (Alokasi Anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Berdasarkan PK

Lanjutan... (FORMAT *MANDATORY* LAPORAN TAHUNAN/LKIP)

BAB 3.2: Pengukuran Capaian Kinerja (Capaian Kinerja)

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	

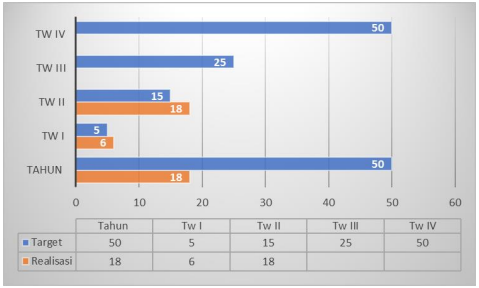

BAB 3.2: Pengukuran Capaian Kinerja (Perbandingan 3 Tahun Terakhir)

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		H-3	H-2	H-1	H	H-3	H-2	H-1	H

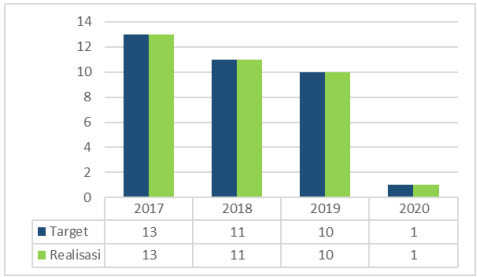

BAB 3.2: Pengukuran Capaian Kinerja (Perbandingan dengan Target Renstra)

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024

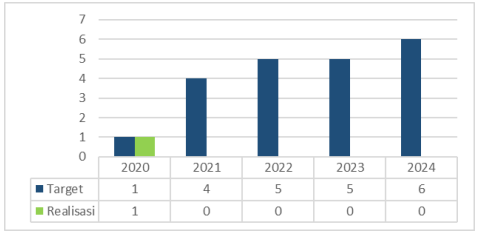

Lanjutan... (FORMAT *MANDATORY* LAPORAN TAHUNAN/LKIP)

BAB 3.3: Analisis Efisiensi Sumber Daya

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capian Kinerja (%) tahun	Target	Realisasi	Capian Kinerja (%) tahun	Efisiensi/ Sisa Anggaran	

BAB 3.5: Realisasi Anggaran Unit Kerja

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai						
2	Belanja Barang						
3	Belanja Modal						
	a. Rupiah Murni						
	b. SBSN						
	c. PHLN						
	d. BLU						

BAB 3.5: Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Pagu Sesuai PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1								
2								
3								

Lanjutan... (FORMAT *MANDATORY* LAPORAN TAHUNAN/LKIP)

BAB 4.1: Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut

BAB 4.2: Kesimpulan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Kinerja Triwulan (%)

H. REVIU DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SAKIP

Laporan Kinerja Kementerian dilakukan Reviu oleh APIP atau Tim yang dibentuk sebelum disampaikan ke menteri

Selain melakukan Reviu, APIP atau Tim yang dibentuk juga melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau Kinerja Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja diserahkan Sekretariat Jenderal kepada Inspektur Jenderal (45 hari setelah tahun anggaran berakhir)

Hasil Reviu Laporan Kinerja kementerian kemudian disampaikan ke Menteri (5 hari setelah Laporan Kinerja diterima Irjen)

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 Pasal 28-30

Lanjutan ... (TUJUAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP)

01 Memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP

02 Menilai tingkat implementasi SAKIP

03 Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

04 Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP periode sebelumnya

Sumber : Permenhub No. PM 55/2018

Lanjutan ... (PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA)

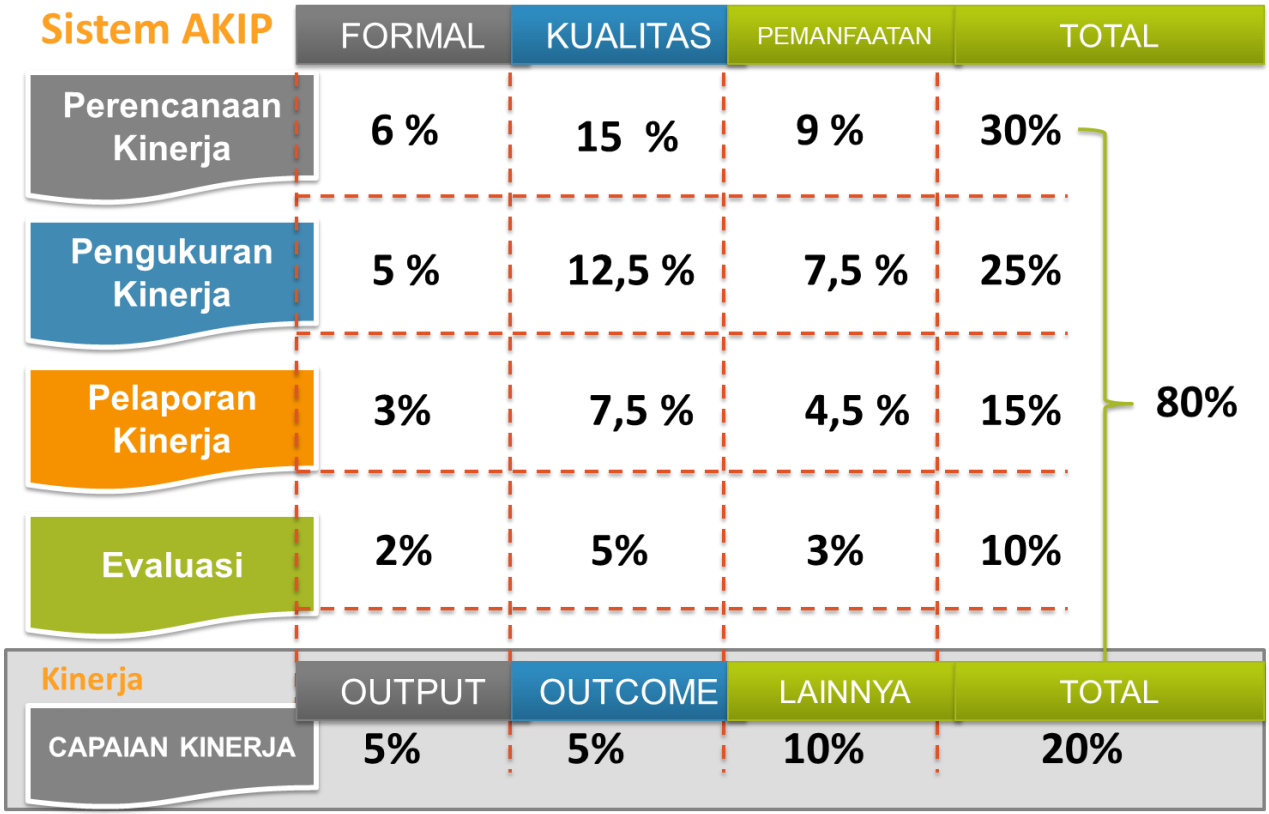

Sumber : Permenhub No. PM 55/2018

Lanjutan ... (ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA)

Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan target kinerja,
2. Menyelaraskan apa yang akan dikerjakan dengan target kinerja,
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan,
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja,
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Akuntabilitas kinerja yang baik:

1. Budaya kinerja telah menjadi budaya organisasi;
2. Seluruh Unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya;
3. Cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah;
4. Pengintegrasian antara Perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran;
5. Setiap anggota organisasi memiliki ukuran kinerja yang jelas dan merupakan usaha mencapai kinerja organisasi;
6. Sistem monev dilakukan secara berkala dan mampu memitigasi risiko ketidaktercapaian kinerja;
7. Sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang andal;
8. Sistem pelaporan telah mampu menyajikan kinerja yang seharusnya dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja;
9. Capaian kinerja telah dijadikan dasar *reward and punishment*.

Sumber : Permenhub No. PM 55/2018

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
A. PERENCANAAN KINERJA		**15%**
1.	PERENCANAAN STRATEGIS	5%
a.	PEMENUHAN RENSTRA	1%
	1) Renstra telah disusun	
	2) Renstra telah memuat tujuan	
	3) Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan	
	4) Tujuan/hasil program telah disertai target keberhasilannya	
	5) Dokumen Renstra telah memuat sasaran	
	6) Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	
	7) Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	
	8) Renstra telah menyajikan IKU	
	9) Renstra telah dipublikasikan	
b.	KUALITAS RENSTRA	2,5%
	10) Tujuan/hasil program telah berorientasi hasil	
	11) Ukuran keberhasilan tujuan (*outcome*)/hasil program telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	
	12) Sasaran telah berorientasi hasil	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
	13) Indikator kinerja sasaran (*outcome* dan *output*) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	
	14) Target kinerja ditetapkan dengan baik	
	15) Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	
	16) Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMN/ dokumen Renstra atasannya	
	17) Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)	
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	1,5%
	18) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan	
	19) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	
	20) Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	
2.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10%
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	2%
	1) Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	
	2) Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	
	3) PK telah menyajikan IKU	
	4) PK telah dipublikasikaan	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
	5) Rencana Aksi atas kinerja sudah ada	
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	5%
	6) Sasaran telah berorientasi hasil	
	7) Indikator kinerja sasaran dan hasil program (*outcome*) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	
	8) Target kinerja ditetapkan dengan baik	
	9) Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	
	10) Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran	
	11) Dokumen PK telah selaras dengan Renstra	
	12) Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	
	13) Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	
	14) Recana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	3%
	15) Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	
	16) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	
	17) Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
	18) Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	
B. PENGUKURAN KINERJA		12,5%
1.	PEMENUHAN PENGUKURAN	2,5%
	1) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	
	2) Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	
	3) Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	
2.	KUALITAS PENGUKURAN	6,25%
	4) IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	
	5) IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	
	6) Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	
	7) Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	
	8) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester)	
	9) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	
3.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	3,75%
	10) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	
	11) IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
	12) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*	
	13) IKU telah direviu secara berkala	
	14) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	
C. PELAPORAN KINERJA		7,5%
1.	PEMENUHAN PELAPORAN	1,5%
	1) Laporan Kinerja telah disusun	
	2) Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	
	3) Laporan Kinerja telah dipublikasikan	
	4) Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP	
	5) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	
2.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	3,75%
	6) Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian Sasaran yang berorientasi *outcome*	
	7) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	
	8) Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	
	9) Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
	10) Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	
	11) Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	
	12) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	
3.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	2,25%
	13) Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	
	14) Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	
	15) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	
	16) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	
D. EVALUASI INTERNAL		10%
1.	PEMENUHAN EVALUASI	2%
	1) Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	
	2) Evaluasi program telah dilakukan	
	3) Evaluasi program telah dilakukan	
	4) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	
	5) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	
	6) Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
2.	KUALITAS EVALUASI	5%
	7) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB	
	8) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten	
	9) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap	
	10) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi	
	11) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	
	12) Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	
	13) Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	
	14) Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	
	15) Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	
	16) Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	
	17) Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode	
3.	PEMANFAATAN EVALUASI	3%
	18) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
	19) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	
	20) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja	
	21) Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang	
	22) Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	
	23) Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI		20%
1.	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	5%
	1) Target dapat dicapai	
	2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	
	3) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	
2.	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	12,5%
	4) Target dapat dicapai	
	5) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	
	6) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
3.	KINERJA LAINNYA	2,5%
	7) Inisiatif dalam pemberantasan korupsi	
	8) Inovasi dalam manajemen kinerja	
	9) Penghargaan-penghargaan lainnya	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA		**65%**

Sumber : Permen PAN-RB No. PM 12/2015

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
A. PERENCANAAN KINERJA		**15%**
1.	PERENCANAAN STRATEGIS	5%
a.	PEMENUHAN RENSTRA	1%
	1) Renstra telah disusun	
	2) Renstra telah memuat tujuan	
	3) Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan	
	4) Tujuan/hasil program telah disertai target keberhasilannya	
	5) Dokumen Renstra telah memuat sasaran	
	6) Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	
	7) Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	
	8) Renstra telah menyajikan IKU	
	9) Renstra telah dipublikasikan	
b.	KUALITAS RENSTRA	2,5%
	10) Tujuan/hasil program telah berorientasi hasil	
	11) Ukuran keberhasilan tujuan (*outcome*)/hasil program telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	
	12) Sasaran telah berorientasi hasil	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
	13) Indikator kinerja sasaran (*outcome* dan *output*) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	
	14) Target kinerja ditetapkan dengan baik	
	15) Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	
	16) Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMN/ dokumen Renstra atasannya	
	17) Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)	
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	1,5%
	18) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan	
	19) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	
	20) Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	
2.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10%
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	2%
	1) Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	
	2) Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	
	3) PK telah menyajikan IKU	
	4) PK telah dipublikasikaan	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
	5) Rencana Aksi atas kinerja sudah ada	
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	5%
	6) Sasaran telah berorientasi hasil	
	7) Indikator kinerja sasaran dan hasil program (*outcome*) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	
	8) Target kinerja ditetapkan dengan baik	
	9) Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	
	10) Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran	
	11) Dokumen PK telah selaras dengan Renstra	
	12) Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	
	13) Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	
	14) Recana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	3%
	15) Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	
	16) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	
	17) Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
	18) Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	
	19) Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	
B. PENGUKURAN KINERJA		12,5%
1.	PEMENUHAN PENGUKURAN	2,5%
	1) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	
	2) Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya	
	3) Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	
	4) Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	
2.	KUALITAS PENGUKURAN	6,25%
	5) IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	
	6) IKU telah ***cukup untuk mengukur*** kinerja	
	7) IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP	
	8) Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	
	9) Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	
	10) Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	
	11) Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
	12) Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	
	13) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	
	14) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	
3.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	3,75%
	15) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	
	16) IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	
	17) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	
	18) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment	
	19) IKU telah direviu secara berkala	
	20) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	
C. PELAPORAN KINERJA		7,5%
1.	PEMENUHAN PELAPORAN	1,5%
	1) Laporan Kinerja telah disusun	
	2) Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	
	3) Laporan Kinerja telah dipublikasikan	
	4) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT
2.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	3,75%
	5) Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian Sasaran yang berorientasi *outcome*	
	6) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	
	7) Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	
	8) Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan	
	9) Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	
	10) Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	
	11) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	
3.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	2,25%
	12) Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	
	13) Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	
	14) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	
	15) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA		**35%**

Sumber : Permen PAN-RB No. PM 12/2015

Lanjutan... (PENGHARGAAN CAPAIAN & PELAPORAN KINERJA)

Penghargaan dari Sekretariat Jenderal diberikan terhadap ketaatan atas pelaksanaan proses penerapan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dimulai dari pengisian Data Kinerja, Pengukuran Kinerja hingga penyampaian laporan capaian kinerja secara berkala

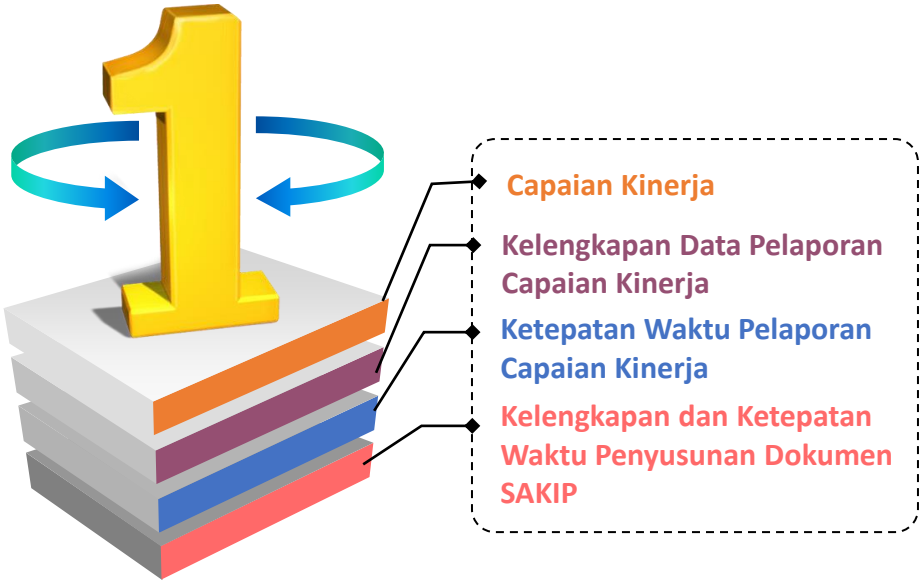

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (Pasal 38-39)

Lanjutan ... (PENGHARGAAN CAPAIAN & PELAPORAN KINERJA)

Penerapan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa penghargaan capaian dan pelaporan kinerja diberikan dalam bentuk piagam berdasarkan evaluasi mandiri Laporan Capaian Kinerja Triwulan

Penghargaan berdasarkan Capaian Kinerja (Rata –rata capaian kinerja berdasarkan target pada dokumen Perjanjian Kinerja

Penghargaan berdasarkan Kepatuhan Pelaporan Kinerja

Komponen Penilaian :
- ***Ketepatan Waktu Pengumpulan (20%)***
- ***Pemenuhan informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja (80%)***

Sumber : SOP 01/SOP/K1/DJKA 2019 tentang Pemberian *Reward* dan *Punishment* terhadap Capaian Kinerja Unit Kerja

BAB 04

APLIKASI DALAM PENGELOLAAN DATA KINERJA

A. PENGELOLAAN DATA KINERJA

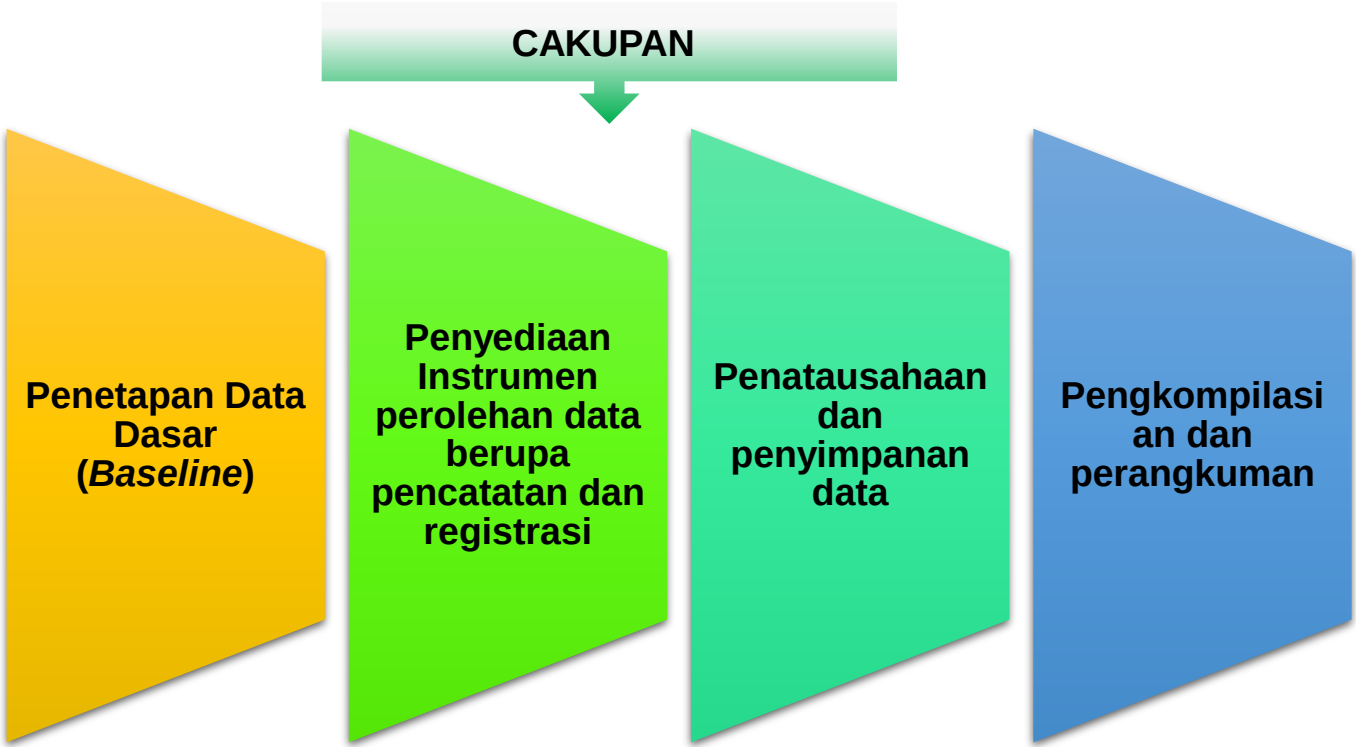

B. APLIKASI PENGELOLAAN DATA KINERJA

E-SAKIP

Aplikasi oleh Kementerian PANRB.

Balai/Satker *upload* Dokumen SAKIP (RENSTRA, RKT, PK, LKIP, Laporan Triwulan, Rencana Aksi) yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan sebagai data dukung evaluasi APIP Kemenhub dan KemenPANRB

E-MONEV

Aplikasi oleh Bappenas sebagai tindak lanjut PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Balai/Satker melakukan penginputan realisasi anggaran untuk masing-masing *output* dan komponen sebagaimana pada POK setiap Triwulan.

E-*PERFORMANCE*

Aplikasi oleh Kementerian Perhubungan.

Balai/Satker melakukan penginputan data capaian/realisasi kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja setiap awal bulan (tanggal 1 s.d 5).

SISTEM PELAPORAN KINERJA (SILAKI) PADA PORTAL APLIKASI DITJEN PERKEREETAAPIAN

C. APLIKASI E-SAKIP REVIU

Perintah Presiden

- Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Fokus pada manfaat untuk masyarakat
- Penyederhanaan Laporan

e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan sistem sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online

FITUR

1. **Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara interaktif**
2. **Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara *online***

Website : esr.menpan.go.id

Lanjutan ...

KOMPONEN E-SAKIP REVIU

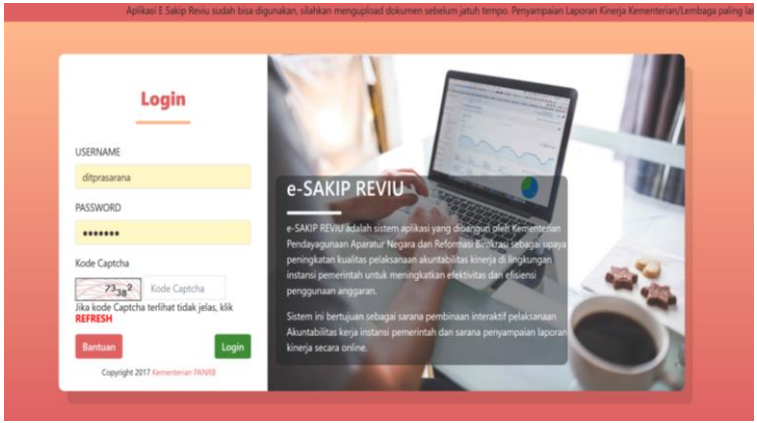

DASHBOARD

Lanjutan…

MASUK APLIKASI E-SAKIP REVIU

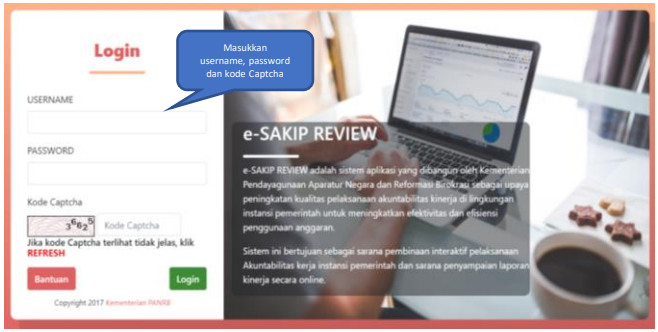

Sebelum mengakses e-SAKIP Reviu, **pastikan:**

1. Jaringan internet yang baik dan stabil
2. Memiliki web browser “Google Chrome”
3. File yang di-upload maksimal 35 MB
4. Format yang di upload sebaiknya dalam bentuk *.pdf

NO	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	EMAIL	USERNAME	PASSW
1	**Ditjen Perkeretaapian**	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	eval.bagrenka@gmail.com	djka.kemenhub	***
2	**Ditjen Perkeretaapian**	Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	bagrenka@gmail.com	setdjka.kemenhub	***
3	**Ditjen Perkeretaapian**	Direktorat Sarana Perkeretaapian	tu.ditsarana@gmail.com	ditsaranaka.kemenhub	***
4	**Ditjen Perkeretaapian**	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	ditpraska2@gmail.com	ditprasaranaka.kemenhub	***
5	**Ditjen Perkeretaapian**	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	sekretaris.dllaka@gmail.com	ditllaka.kemenhub	***
6	**Ditjen Perkeretaapian**	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	direktur.keselamatan@gmail.com	ditkeselamatanka.kemenhub	***
7	**Dst..**	Dst..	Dst..	Dst..	Dst..

Lanjutan…(MENU DOKUMEN SAKIP)

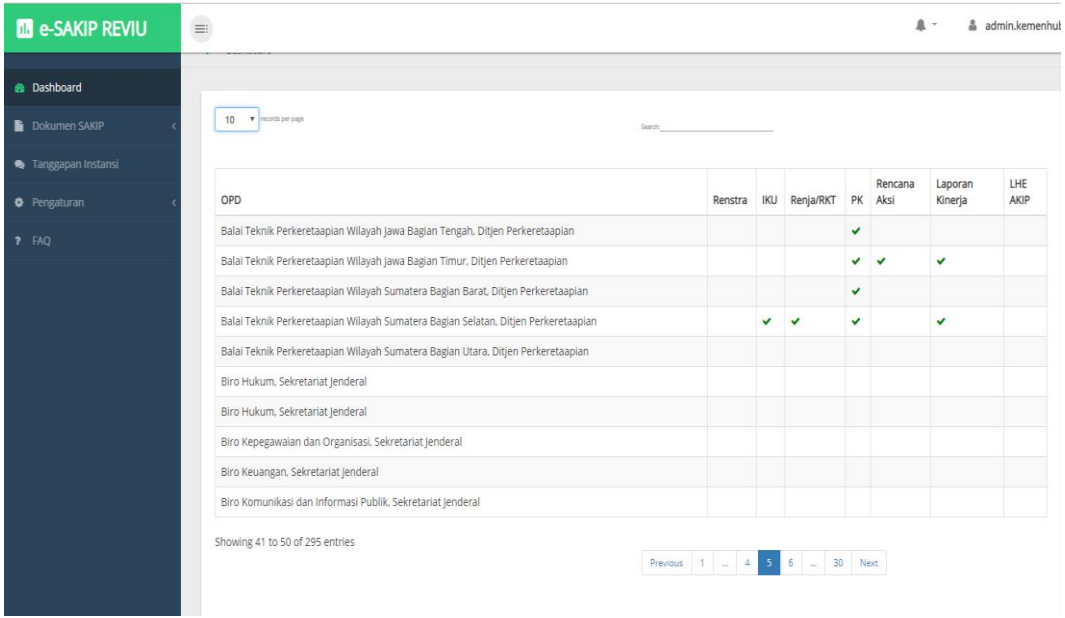

Setelah masuk pada aplikasi e-SAKIP Reviu maka akan masuk pada home(Tampilan muka) aplikasi e-SAKIP Reviu. Tampilan aplikasi e-SAKIP Reviu, terdapat menu: Dashboard, Dokumen SAKIP, Tanggapan Instansi, Pengaturan dan FAQ.

Pada item Dashboard, akan terlihat unit kerja mana yang sudah melakukan pengunggahan dokumen

Lanjutan… (CARA *UPLOAD* DOKUMEN SAKIP)

Dokumen yang di-upload adalah **dokumen yang terbaru** (Renstra, IKU, RKT, PK, Renaksi atas PK, LKIP, LKE)

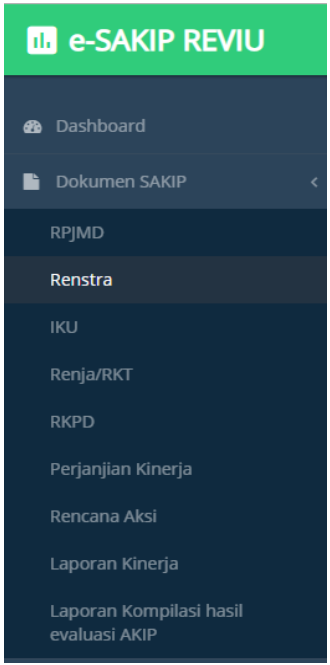

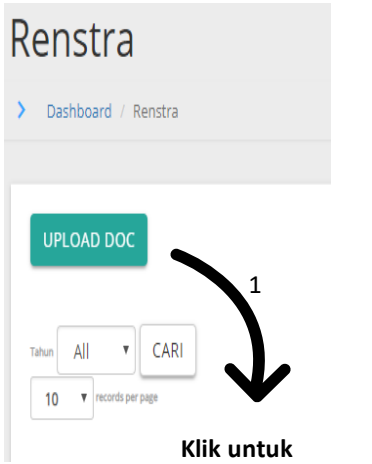

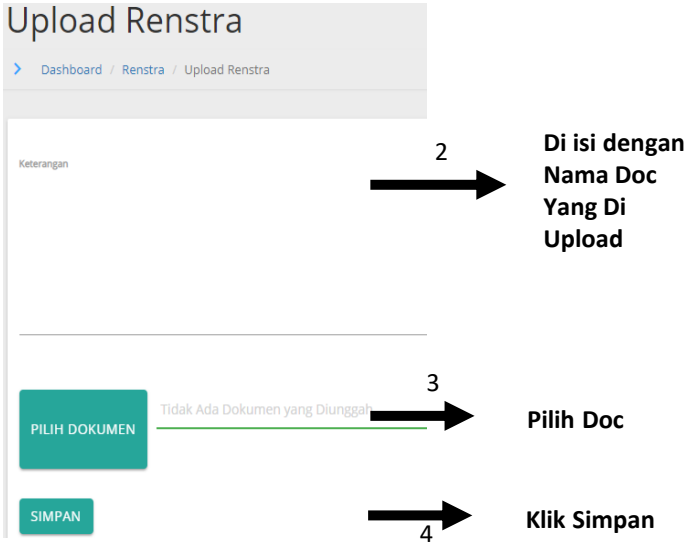

Lanjutan…(HASIL *UPLOAD)*

Tahun All CARI

10 records per page

Search:

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Ket	Tanggapan
1	setdjka.kemenhub	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	16 Mar 2018 14:02		Revu Renstra Kementerian Bidang Perkeretaapian 2015-2019	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Lanjutan… (MENU TANGGAPAN INSTANSI)

Terdapat dua menu tanggapan:

1) Tanggapan umum atas instansi pemerintah; dan
2) Tanggapan atas setiap dokumen.

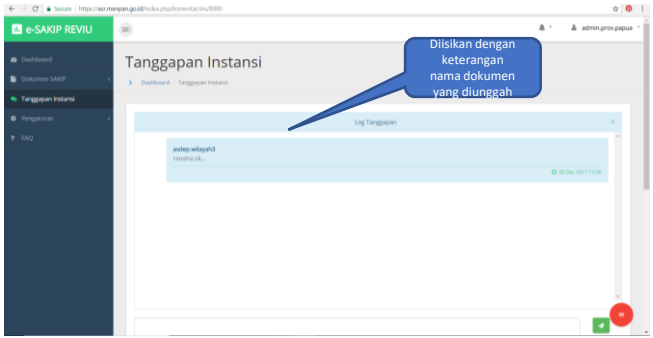

Tanggapan umum atas instansi pemerintah instansi.

Pada menu ini, tanggapan yang diberikan adalah tanggapan secara keseluruhan atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Kementerian/Lembaga/ pemerintah. Admin Kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dapat membaca tanggapan dari evaluator Kementerian PAN RB dan dapat membalas tanggapan.

Tanggapan atas setiap dokumen.

Tanggapan atas setiap dokumen dilihat pada setiap dokumen yang diunggah. Pada menu ini, admin Kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dan user satuan kerja dapat membaca tanggapan dari evaluator dan dapat membalas tanggapan.

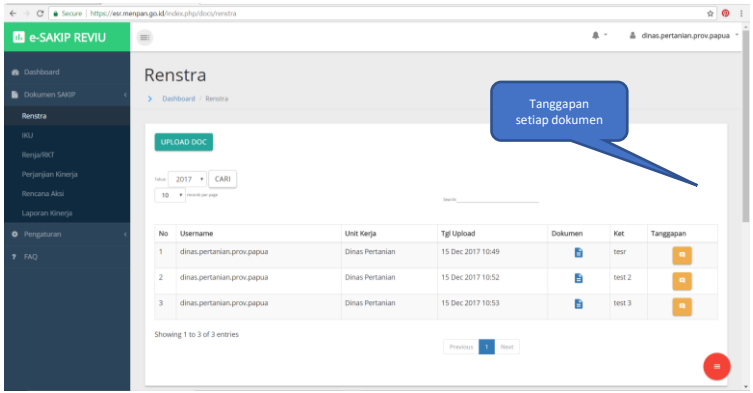

D. E-MONEV BAPPENAS

LATAR BELAKANG

(https://e-monev.bappenas.go.id/)

Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
4. Hasil Monevdal ter-internalisasi dalam rencana pembangunan (perencanaan)

OBJEK PEMANTAUAN

- Komponen → Realisasi anggaran; Realisasi fisik (capaian output); Permasalahan; Status pelaksanaan; Upload bukti pendukung
- Output →
- Indikator output → Capaian indikator; Permasalahan
- Indikator kinerja kegiatan →

Lanjutan ... (PROFIL DOKUMEN RKA K/L)

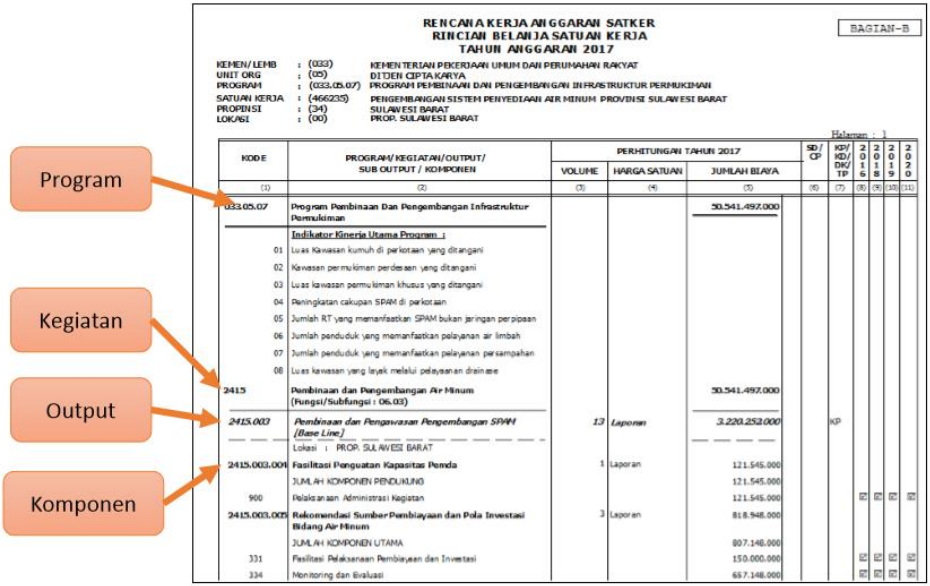

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2017

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORG : (05) DITJEN CIPTA KARYA
PROGRAM : (033.05.07) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SATUAN KERJA : (466235) PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI SULAWESI BARAT
PROPINSI : (34) SULAWESI BARAT
LOKASI : (00) PROP. SULAWESI BARAT

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN	PERHITUNGAN TAHUN 2017			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP	2016	2018	2019	2020
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
033.05.07	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman**			50.541.497.000						
	Indikator Kinerja Utama Program :									
01	Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani									
02	Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani									
03	Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani									
04	Peningkatan cakupan SPAM di perkotaan									
05	Jumlah RT yang memanfaatkan SPAM bukan jaringan perpipaan									
06	Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan air limbah									
07	Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan persampahan									
08	Luas kawasan yang layak melalui pelayanan drainase									
2415	**Pembinaan dan Pengembangan Air Minum (Fungsi/Subfungsi : 06.03)**			50.541.497.000						
2415.003	***Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM [Base Line]***	*13*	*Laporan*	*3.220.252.000*		KP				
	Lokasi : PROP. SULAWESI BARAT									
2415.003.009	**Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda**	1	Laporan	121.545.000						
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG			121.545.000						
900	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan			121.545.000			☑	☑	☑	☑
2415.003.005	**Rekomendasi Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Bidang Air Minum**	3	Laporan	818.948.000						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA			807.148.000						
331	Fasilitasi Pelaksanaan Pembiayaan dan Investasi			150.000.000			☑	☑	☑	☑
334	Monitoring dan Evaluasi			657.148.000			☑	☑	☑	☑

Program

Kegiatan

Output

Komponen

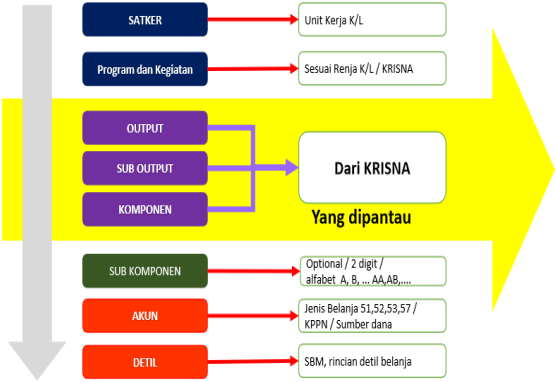

Lanjutan... (PEMANTAUAN DAN APLIKASI E-MONEV)

Pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan (intervensi pemerintah –Renja-KL)

Pemanfaatan data realisasi yang dilaporkanuntuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secaraberjenjang

Penekanan pada pemahaman bisnis prosesprogram dan kegiatan, sehingga data yang dilaporkan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya

Lanjutan... (ALUR PELAPORAN BERJENJANG)

Mekanisme penjenjangan pelaporan dalam aplikasi e-Monev (dapat pula digunakan sebagai mekanisme pengendalian berjenjang) sebagaimana diatur oleh PP 39/2006, pasal 4, 5,6,7 dan 8; adalah sebagai berikut:

Komponen	Rincian *Output* (RO) Satker	Rincian Output (RO)	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program
Pelaporan data realisasi pelaksanaan komponen	Pelaporan Data realisasi RO satker (data RO berdasarkan dokumen RKA-KL)	Pelaporan data realisasi RO	Pelaporan capaian indikator kinerja di level kegiatan (IKK)	Pelaporan capaian indikator kinerja di level program (IKP)
Pelaksana dan penanggung jawab komponen melaporkan pelaksanaan komponen	Pelaksana dan penanggung jawab RO dimasing-masing satker melaporkan realisasi RO	Pelaksana dan penanggung jawab RO (UKE 2) melaporkan realisasi RO berdasarkan data sebaran RO (satker) dan realisasi komponen	Pelaksana dan penanggung jawab Kegiatan (UKE 2) melaporkan realisasi IKK berdasarkan data realisasi komponen, RO (satker) dan RO	Pelaksana dan penanggung jawab Kegiatan (UKE 1) melaporkan realisasi IKP berdasarkan data realisasi komponen, RO satker, RO dan IKK

Lanjutan ... (VERIFIKASI LAPORAN)

- Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, data realisasi hasil pemantauan yang telah dientrikan oleh Satker/UKE-2/UKE-1 akan diverifikasi oleh Biro Perencanaan mewakili kementerian/Lembaga.
- Model verifikasi ini merujuk pada mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam PP 39/2006, pasal 9 ayat 4, dimana pimpinan kementerian /Lembaga menyampaikan laporan triwulanan kepada Bappenas paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir.
- Penyusunan laporan triwulanan akan menggunakan data yang telah diverifikasi tersebut.

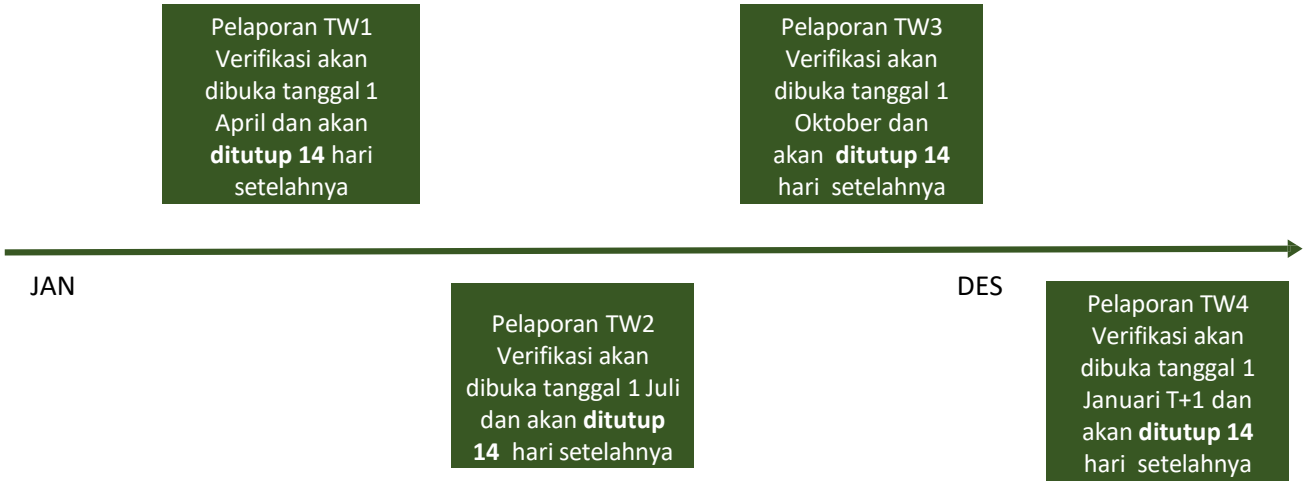

Lanjutan ... (PENGGUNA E-MONEV BAPPENAS)

USER	ORGANISASI	TUGAS
K4	Unit Kerja Eselon 1 (termasuk koordinator program lintas)	• Pengendalian pelaksanaan Renja-KL (program dan kegiatan dilingkupnya). • Entri data realisasi indikator kinerja program
K5	Unit Kerja Eselon 2 (termasuk koordinator program lintas)	• Pengendalian pelaksanaan Renja-KL (level kegiatan, RO, RO (satker) dan komponen • Entri data realisasi rincian output (RO) dan RO (satker) • Entri data realisasi indikator kinerja kegiatan
K8	Satuan Kerja	• Pemantauan pelaksanaan Renja-KL level komponen dan RO (satker) • Entri data realisasi komponen dan RO (satker)

KELOMPOK USER ENTRI DATA

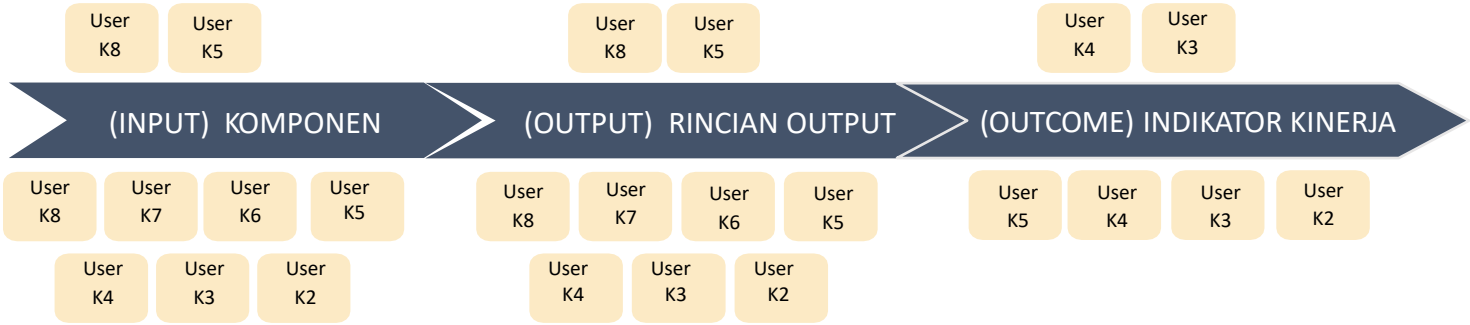

KELOMPOK USER PEMANFAAT DATA

Lanjutan ... (PROSES PENGISIAN E-MONEV BAPPENAS)

- **login** website

http://e-monev.bappenas.go.id/emon3/

K8_KODEBALAI
bhinnekatunggalika

Lanjutan ... (*LOGIN*)

Username & Password

Username	Penanggung Jawab Program	Penanggung Jawab Kegiatan	Password
K4_022.08	Ditjen Perkeretaapian		AYOCUCITANGAN
K5_022.08.02	Ditjen Perkeretaapian	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	AYOJAGAJARAK
K5_022.08.03	Ditjen Perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	AYOJAGAJARAK
K5_022.08.04	Ditjen Perkeretaapian	Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	AYOJAGAJARAK
K5_022.08.05	Ditjen Perkeretaapian	Direktorat Sarana Perkeretaapian	AYOJAGAJARAK
K5_022.08.06	Ditjen Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	AYOJAGAJARAK
K5_022.08.07	Ditjen Perkeretaapian	Ditjen Perkeretaapian	AYOJAGAJARAK

Untuk Akun Satker (K8)
Username : K8_kode satker
Password : AYOPAKAIMASKER

Lanjutan ...

step by step

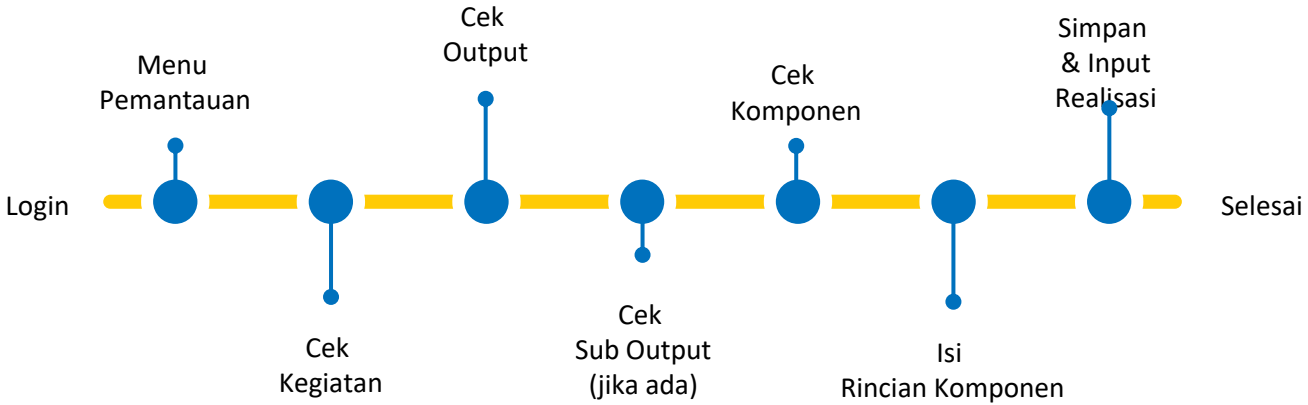

BAHAN PENDUKUNG

POK, TOR, RAB, LAPORAN DAYA SERAP (PER BULAN)

Lanjutan...

menu **pemantauan** & cek **kegiatan**

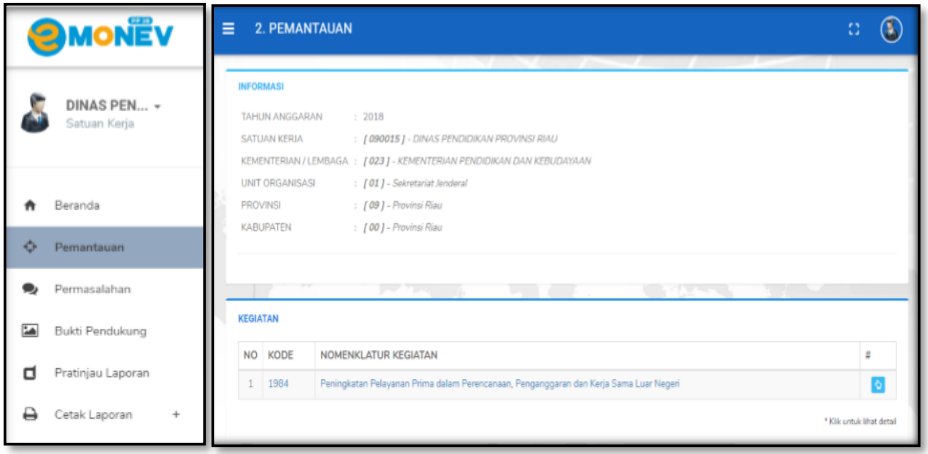

klik
menu pemantauan

Cek Kegiatan dan
klik baris kode dan/atau nomenklatur kegiatan

HAL YANG DIPERHATIKAN

1. Pastikan data dan informasi yang ditampilkan sesuai dengan data User K8
2. User K8 melanjutkan ke menu pemantauan berikutnya dengan mengklik baris kode dan/atau nomenklatur kegiatan atau ikon tangan untuk menuju halaman output dari kegiatan tersebut

Lanjutan ...

cek output

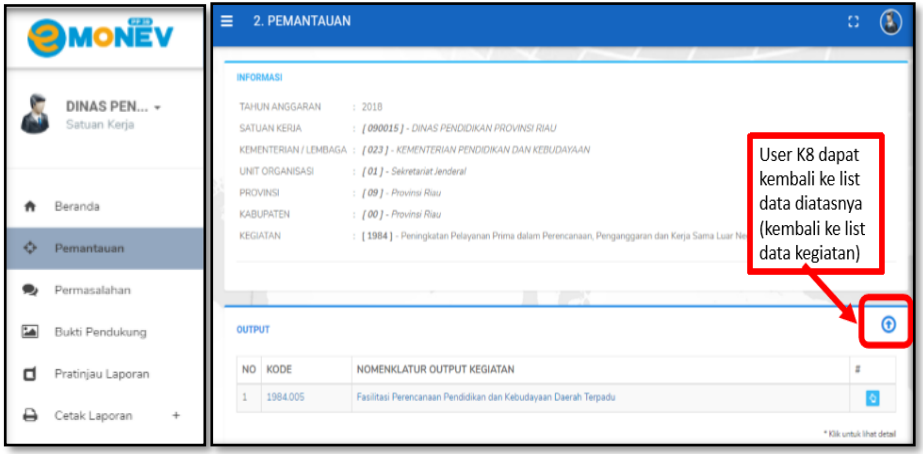

Cek Output dan klik baris kode dan/atau nomenklatur output kegiatan

HAL YANG DIPERHATIKAN

1. User K8 memilih output yang akan dipantau
2. Jika terdapat lebih dari satu output, User harus melakukan pemantauan dan menginput data realisasi pada semua output

LANJUTAN...

cek **sub output**

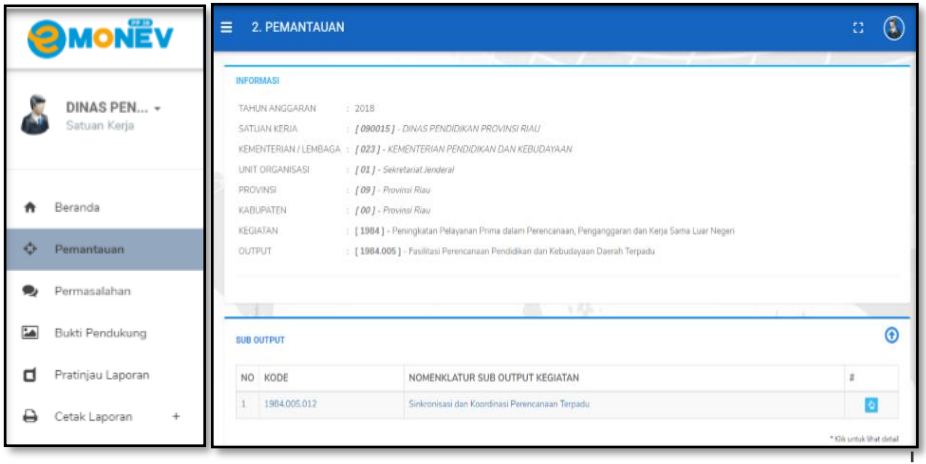

Cek Sub Output dan klik baris kode dan/atau nomenklatur sub output kegiatan

HAL YANG DIPERHATIKAN

1. User K8 memilih sub output yang akan dipantau
2. Jika terdapat lebih dari satu sub output, User harus melakukan pemantauan dan menginput data realisasi pada semua sub output

Catatan: Beberapa K/L memiliki sub output. Jika tidak ada, maka pada halaman ini akan muncul nomenklatur **"tanpa sub output"**

Lanjutan...

cek komponen

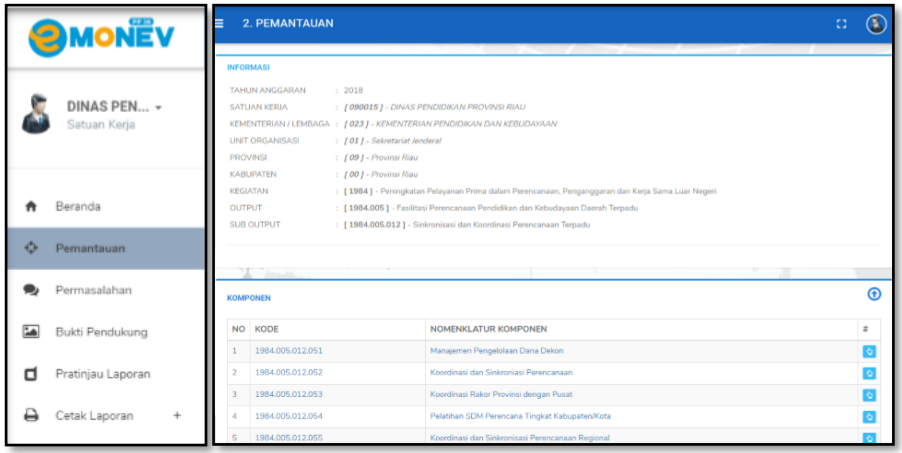

Cek Komponen dan klik baris kode dan/atau nomenklatur komponen

HAL YANG DIPERHATIKAN

Jika terdapat lebih dari satu komponen dalam satu sub output, User K8 harus melakukan pemantauan dan menginput data realisasi pada semua komponen

Lanjutan ...

isi **rincian komponen**

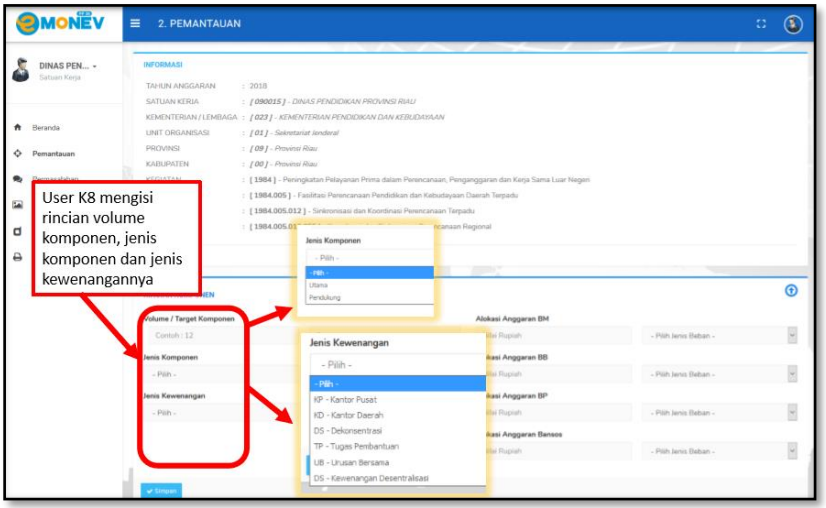

Lengkapi rincian komponen

HAL YANG DIPERHATIKAN

1. User harus melengkapi rincian komponen yang terdiri dari volume komponen, jenis komponen, jenis kewenangan dan alokasi anggarannya
2. User mengklik tombol **simpan** ketika seluruh proses input rincian komponen telah selesai dilakukan

Lanjutan...

Simpan & input **realisasi**

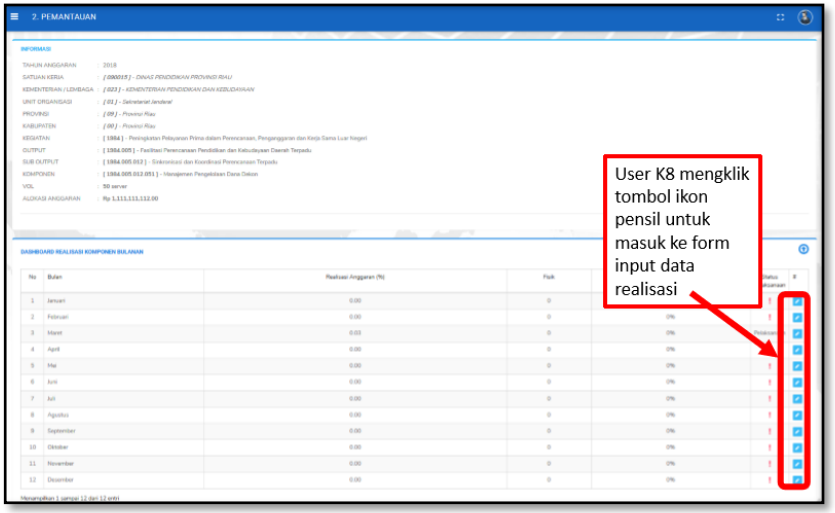

Isi Realisasi Komponen

HAL YANG DIPERHATIKAN

1. User mengklik tombol **realisasi** yang terletal di samping tombol simpan
2. User mengklik tombol pensil pada panel dashboard realisasi komponen bulanan, di baris bulan, untuk menginput realisasi bulan berikutnya
3. User mengisi data realisasi (fisik dan anggaran)
4. User dapat mengisi/memilih lebih dari 1 kategori masalah dan mengisi rincian permasalahan di kolom keterangan permasalahan
5. User mengisi status pelaksanaan
6. User mengisi url bukti pendukung dan mengklik tombol simpan, setelah input data selesai dilakukan

E. APLIKASI *E-PERFORMANCE*

- Data tidak terintegrasi
- Data susah dicari
- Kinerja susah diukur

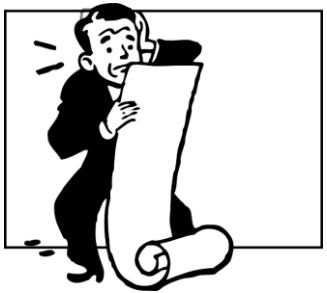

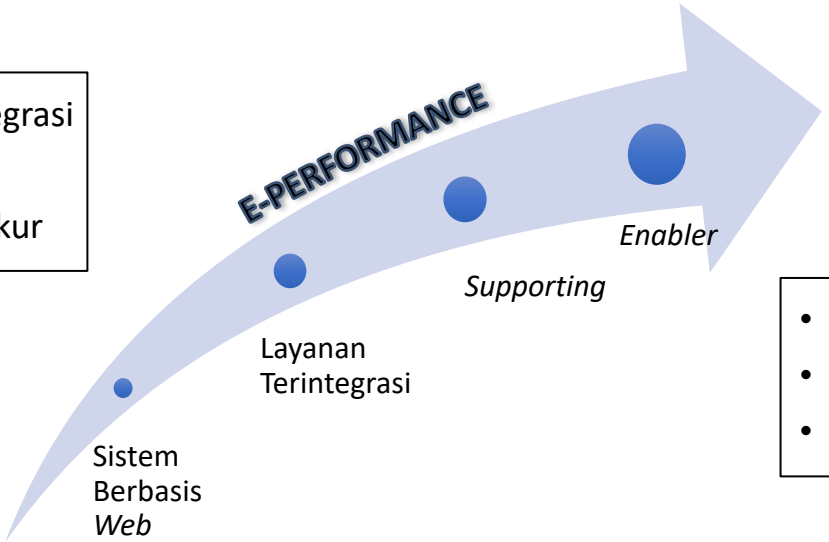

- Data terintegrasi
- Data mudah dicari
- Kinerja terukur

DASAR HUKUM:

- Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006
- Perpres nomor 29 Tahun 2014
- Permen PAN-RB nomor 53 Tahun 2014
- PM nomor 85 Tahun 2020

(http://eperformance.dephub.go.id/)

Lanjutan ... (TUJUAN)

Sistem aplikasi E-PERFORMANCE dibangun dengan tujuan :

1	Mendukung program reformasi birokrasi, khususnya pada proses pengukuran kinerja
2	Mempermudah proses pemantauan, evaluasi, pengendalian kinerja
3	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja
4	Mempermudah penyusunan LKIP

Lanjutan… (TAHAPAN PENGISIAN)

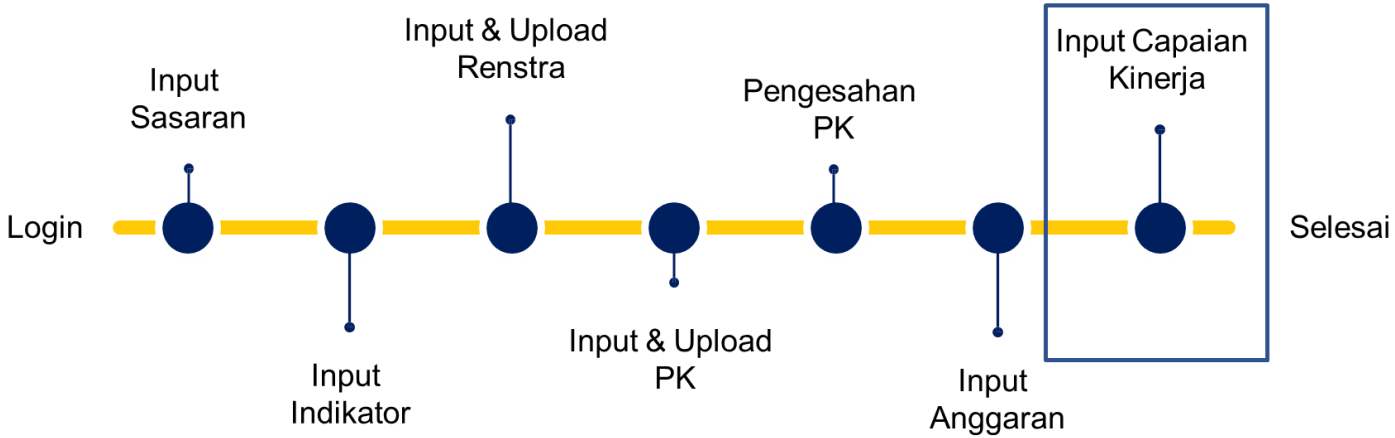

Penginputan data kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja, indikator dan target kinerja ke dalam Sistem Aplikasi E-Performance dan dilakukan paling lambat **5 (LIMA) HARI KERJA** sejak perjanjian kinerja ditandatangani.

BAHAN PENDUKUNG

Renstra, PK, POK, Data Capaian

BATAS WAKTU

- **Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama** dan **Satuan Kerja** pada **hari kerja ke 5** bulan berikutnya
- **Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya** pada **hari kerja ke 10** bulan berikutnya
- **Unit Kementerian** pada **hari kerja ke 15** bulan berikutnya

Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

- input sasaran

silahkan login akun operator

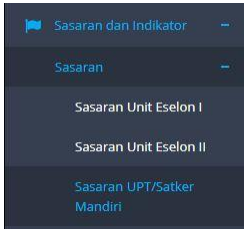

+ Tambah untuk menambah sasaran

klik menu sasaran

sesuaikan dan klik cari

untuk mengedit

fitur menghapus tidak ada tapi bisa di non-aktifkan

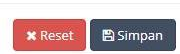

jangan lupa simpan

Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

input indikator

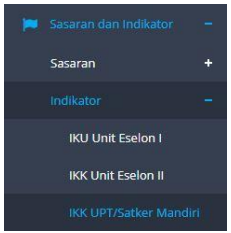

klik menu indikator

sesuaikan dan klik cari

+ Tambah untuk menambah sasaran

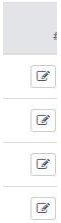

untuk mengedit

fitur menghapus tidak ada tapi bisa di non-aktifkan

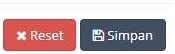

jangan lupa simpan

1. Indikator PK yang di masukkan dari PK Kepala Kantor
2. PK Kepala Kantor harus mencakup semua PK Kepala Seksi/Sub Bagian
3. Tidak ada perbedaan IKU dan IKK dan IK:
   - IKU – Indikator Kinerja Utama biasa untuk Es. I
   - IKK – Indikator Kinerja Kegiatan biasa untuk Es. II
   - IK – Indikator Kinerja biasa untuk Es. III/UPT/Balai

Program dan Kegiatan di lewati

Sementara dalam pengembangan integrasi dengan aplikasi *e-planning*

Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

input & upload **renstra**

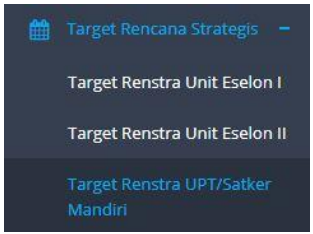

klik menu renstra

sesuaikan dan klik cari

kelola isian target renstra untuk mengisi

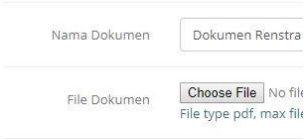

isi nama dokumen
& pilih dokumen renstra

Harus di isi
Jika tidak menu input PK tidak keluar

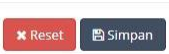

jangan lupa simpan

1. Renstra Es. II ke bawah harus mengikuti Renstra
   Es. I, tidak boleh keluar dari Renstra Es. I
2. Dokumen baru terupload saat mengklik simpan
3. Dokumen max. 20 Mb
4. Dokumen yang di upload pastikan sudah memiliki tanda tangan
5. Disarankan dokumen berbentuk pdf

Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

input & upload **pk**

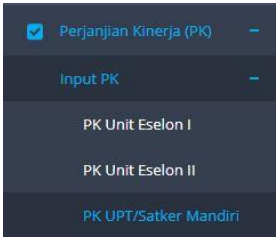

klik menu PK

sesuaikan dan klik cari

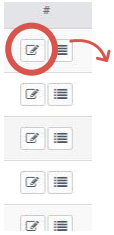

kelola isian PK untuk mengisi

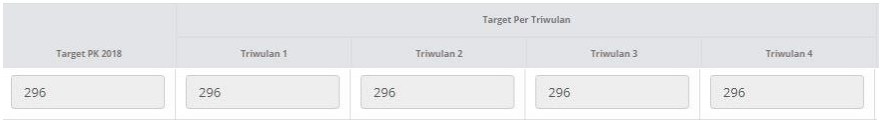

isi target pk dan triwulan

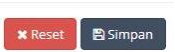

jangan lupa simpan

1. Isi target PK sesuai dengan PK Kepala Kantor
2. Isi dengan angka saja
3. Tidak perlu di titik untuk menunjukkan ribuan

Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

pengesahan pk

silahkan login akun pimpinan

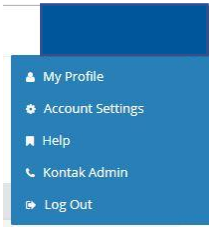

logout dari akun operator

login akun pimpinan

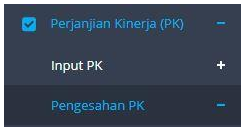

klik menu pengesahan PK

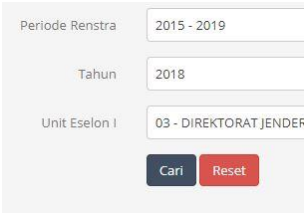

sesuaikan dan klik cari

klik pengesahan pk

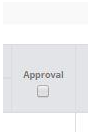

klik *approval* untuk *checklist* semua

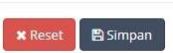

jangan lupa simpan

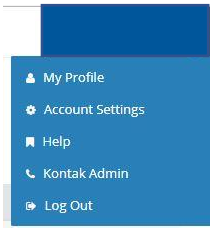

logout dari akun pimpinan

Approval boleh di lakukan oleh staf dengan syarat PK telah di tanda tangani oleh pimpinan

Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

input anggaran

silahkan login akun operator

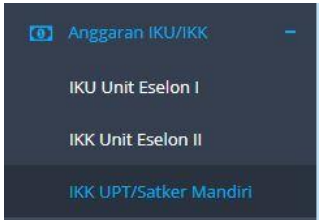

klik menu anggaran

sesuaikan dan klik cari

kelola isian anggaran

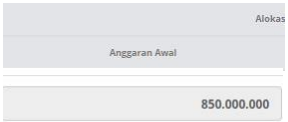

Isi Anggaran Awal

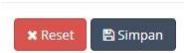

jangan lupa simpan

Isi sesuai anggaran pada POK

sementara dalam pengembangan integrasi dengan aplikasi e-monitoring

Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

input **capaian kinerja**

silahkan login akun operator

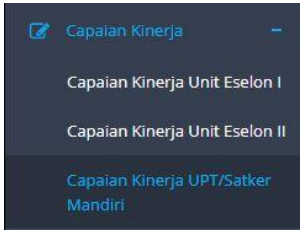

klik menu capaian kinerja

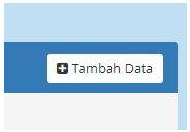

klik tambah data

sesuaikan dan klik cari

Input capaian
Dan isi capaian

jangan lupa simpan

1. Selalu input capaian kinerja di antara **tanggal 1 s.d 5 di awal bulan untuk unit kerja mandiri/UPT dan Eselon II**, serta maksimal **tanggal 10 untuk Eselon I**
2. Jika tidak, maka sedikit repot dengan pengajuan “unlock”
3. Jika data belum ada, silahkan di isi angka nol terlebih dalulu, lalu ketika data ada, silahkan di edit
4. Edit lebih mudah di bandingkan harus “unlock”
5. Jika memang belum terlaksana, di isi angka nol

Fitur Baru

Operator Unit Kerja Eselon I dapat mengakses menu **unlock capaian kinerja**, untuk unit kerja dibawahnya.

Lanjutan…(*DASHBOARD* PANTAUAN/STATUS PENGUMPULAN DATA)

CONTOH:

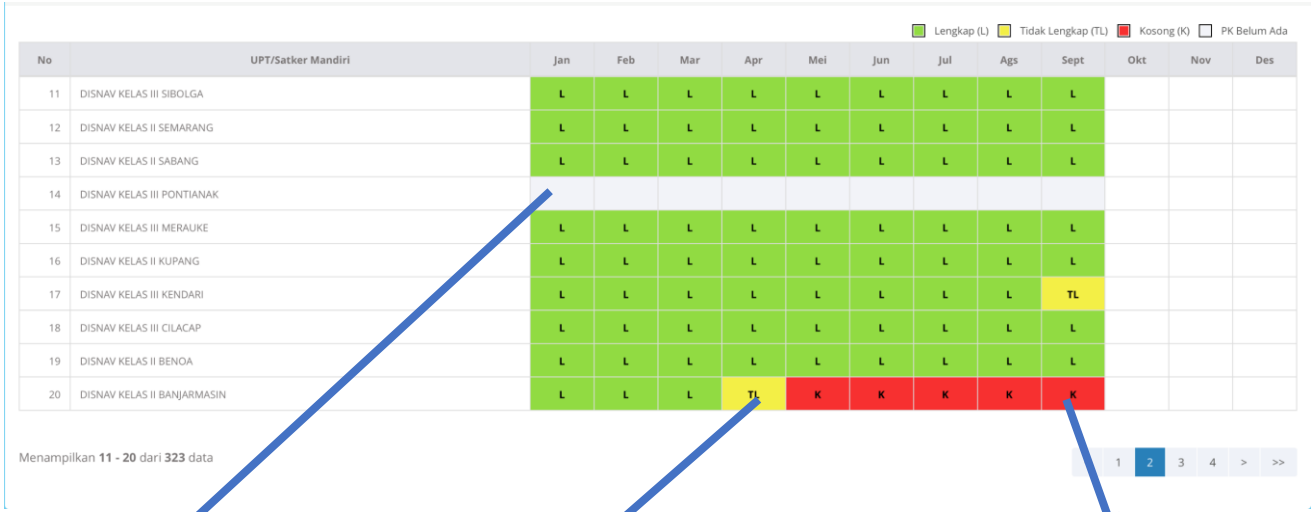

Lengkap (L) Tidak Lengkap (TL) Kosong (K) PK Belum Ada

No	UPT/Satker Mandiri	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
11	DISNAV KELAS III SIBOLGA	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
12	DISNAV KELAS II SEMARANG	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
13	DISNAV KELAS II SABANG	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
14	DISNAV KELAS III PONTIANAK												
15	DISNAV KELAS III MERAUKE	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
16	DISNAV KELAS II KUPANG	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
17	DISNAV KELAS III KENDARI	L	L	L	L	L	L	L	L	TL			
18	DISNAV KELAS III CILACAP	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
19	DISNAV KELAS II BENOA	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
20	DISNAV KELAS II BANJARMASIN	L	L	L	TL	K	K	K	K	K			

Menampilkan **11 - 20** dari **323** data

1 2 3 4 > >>

Belum ada PK

PK sudah ada tapi realisasi belum lengkap

PK sudah ada tapi tidak ada realisasi

Lanjutan…(DETAIL TIDAK LENGKAP)

CONTOH:

IKK belum ada realisasi

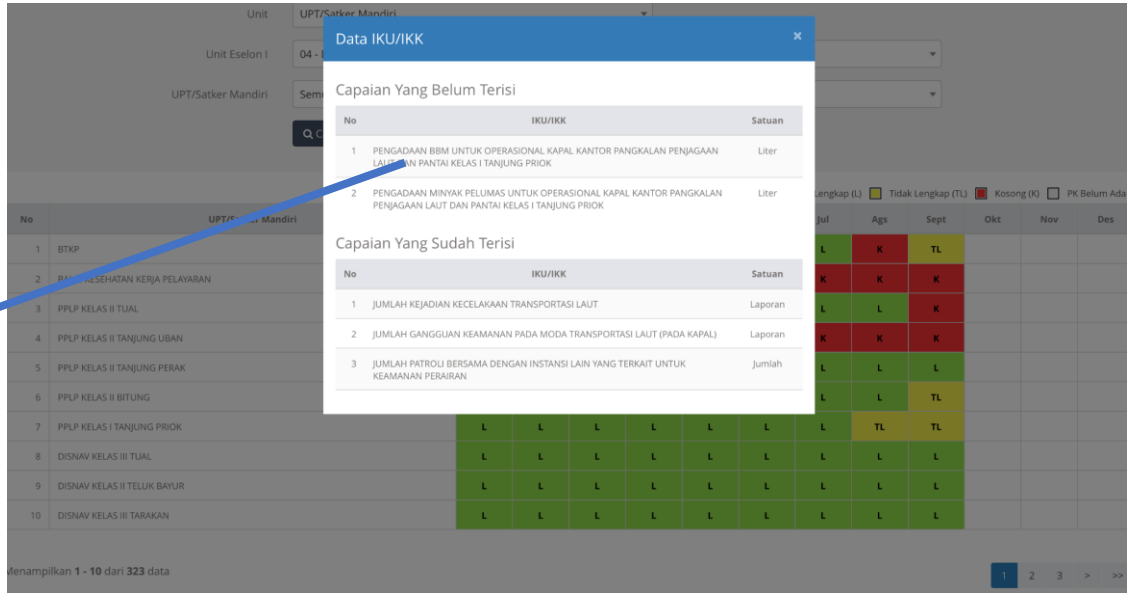

Lanjutan…(DETAIL KOSONG)

CONTOH:

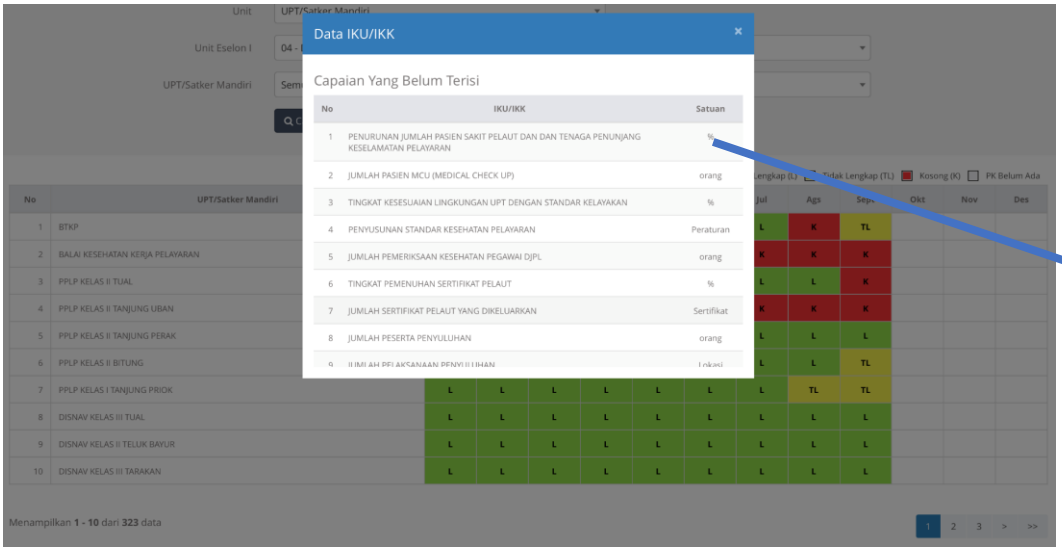

Detail Realisasi Masih Kosong

F. SISTEM PELAPORAN KINERJA (SILAKI) PADA PORTAL APLIKASI

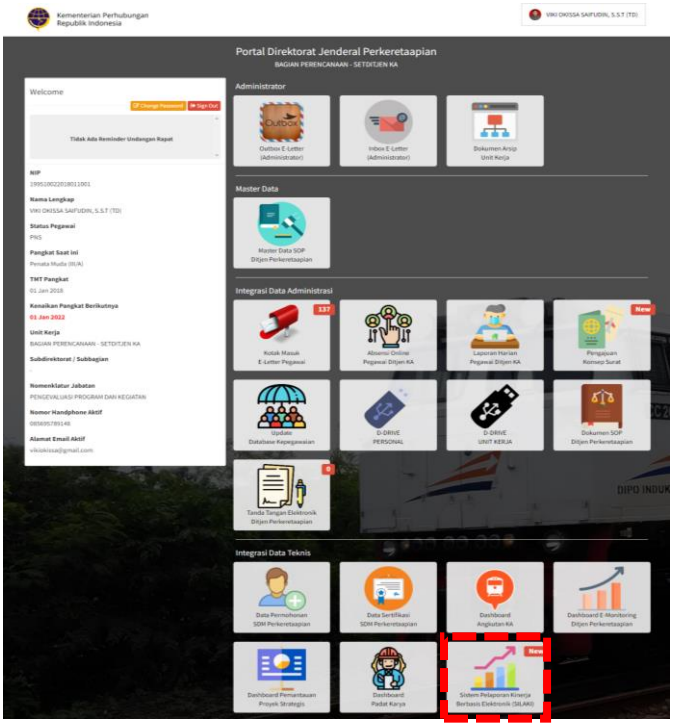

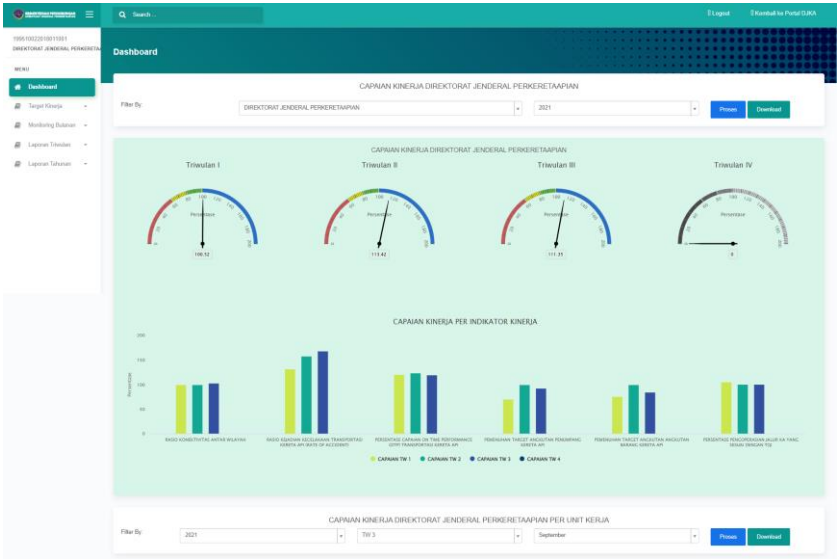

Login ke Portal Aplikasi DJKA (https://portal.djka.dephub.go.id) pilih modul **Sistem Pelaporan Kinerja Berbasis Elektronik (SILAKI)**

Lanjutan... (TAMPILAN *DASHBOARD*)

Tampilan grafik Capaian Kinerja per - Triwulan

Tampilan grafik Capaian Kinerja per – Indikator Kinerja

Lanjutan…

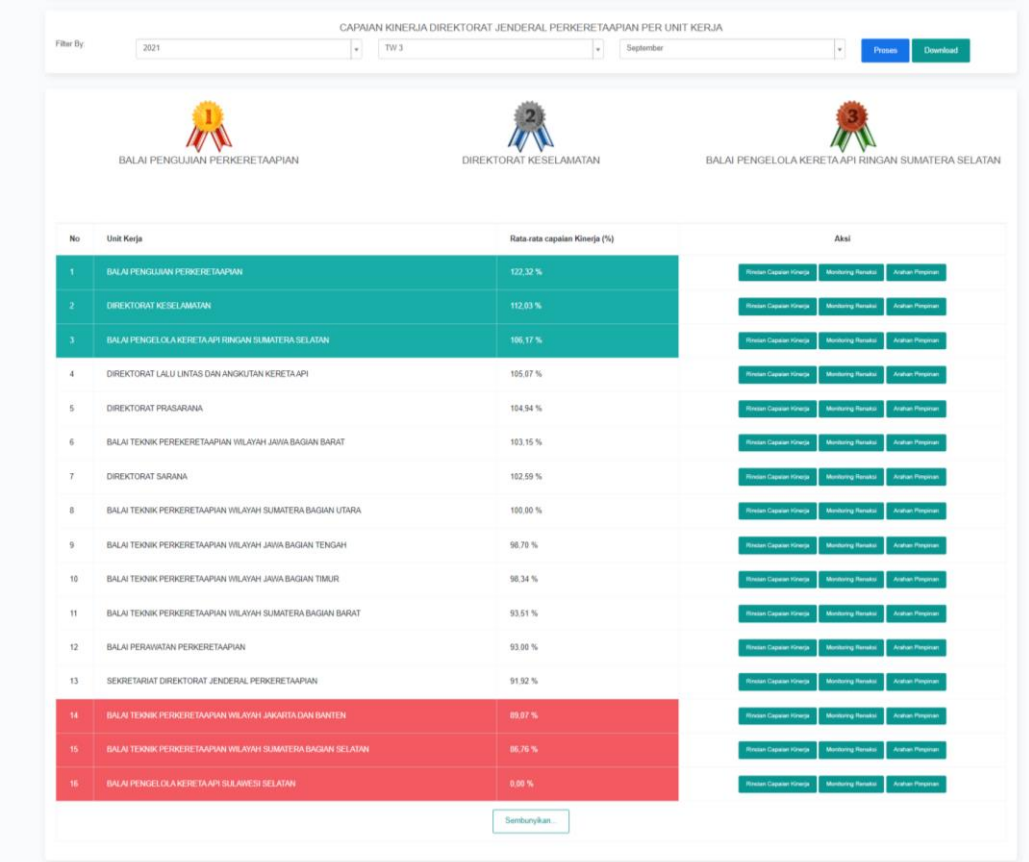

No	Unit Kerja	Rata-rata capaian Kinerja (%)	Aksi
1	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	122,32 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
2	DIREKTORAT KESELAMATAN	112,03 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
3	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	106,17 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
4	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	105,07 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
5	DIREKTORAT PRASARANA	104,94 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
6	BALAI TEKNIK PEREKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT	103,15 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
7	DIREKTORAT SARANA	102,59 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
8	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA	100,00 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
9	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH	98,70 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
10	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR	98,34 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
11	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT	93,51 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
12	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	93,00 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
13	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	91,92 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
14	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN	89,87 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
15	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN	86,76 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan
16	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	0,00 %	Rincian Capaian Kinerja · Monitoring Renaksi · Arahan Pimpinan

Sembunyikan...

Tampilan Ranking Capaian Kinerja per – unit kerja mulai dari peringkat tertinggi sampai terendah

Lanjutan…

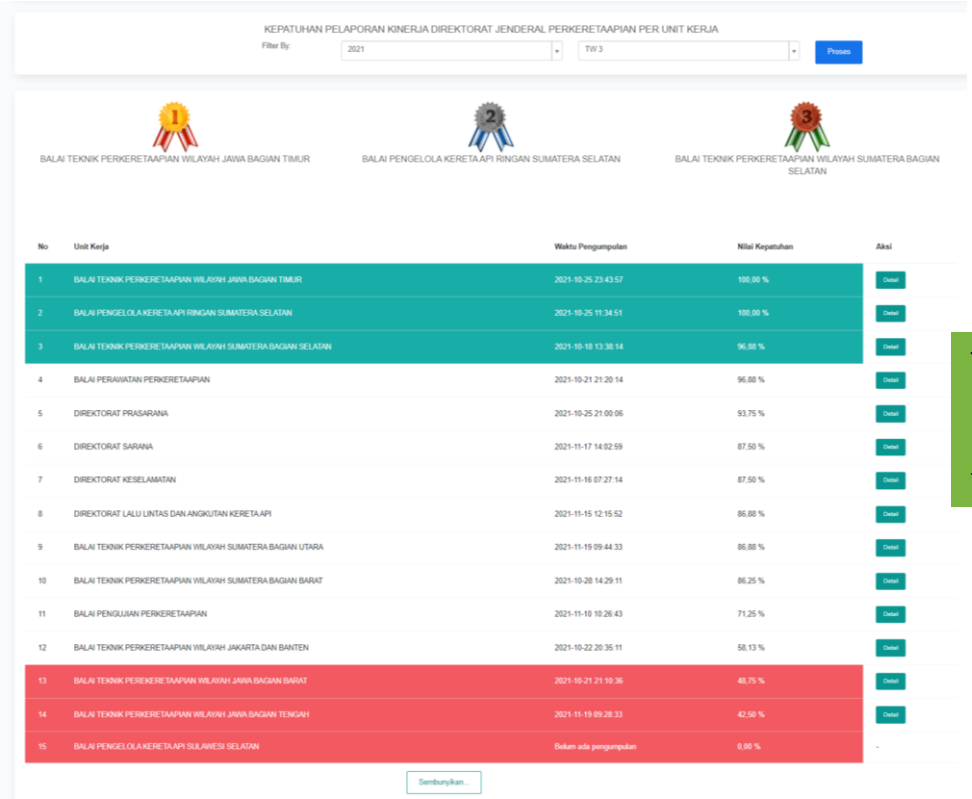

Tampilan Ranking Kepatuhan Pelaporan Kinerja per – unit kerja mulai dari peringkat tertinggi sampai terendah

Lanjutan …

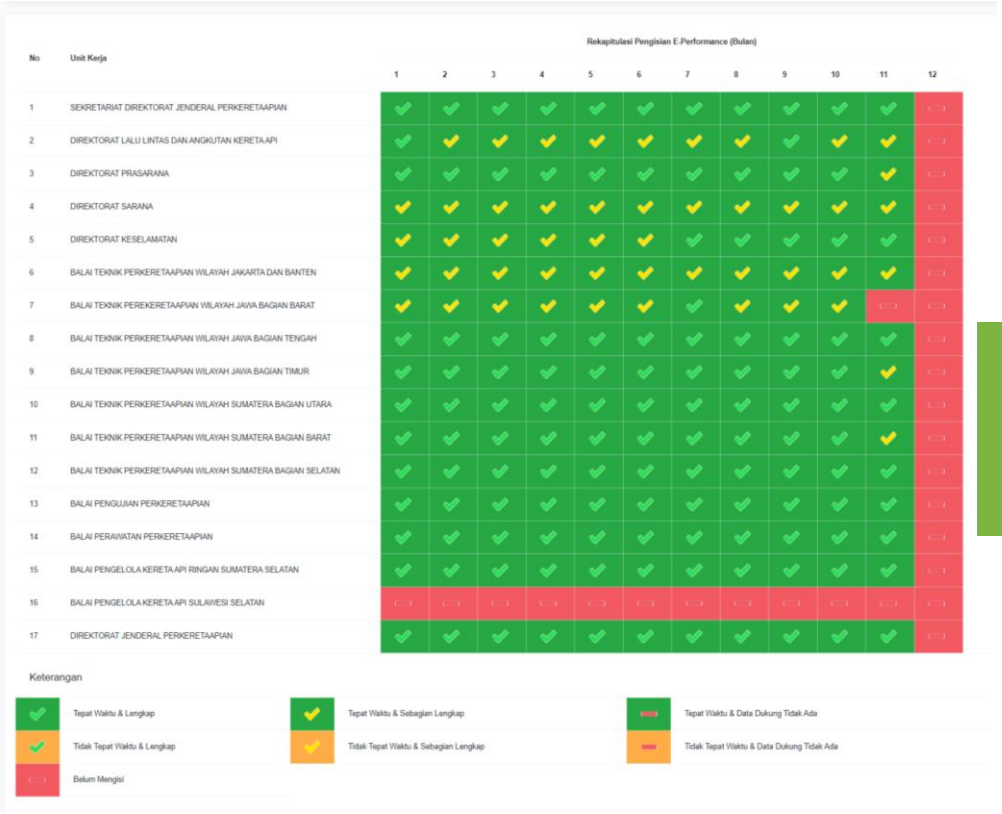

Rekapitulasi Pengisian e-Performance per – unit kerja, terintegrasi dengan aplikasi e-Performance Kementerian Perhubungan

Lanjutan …

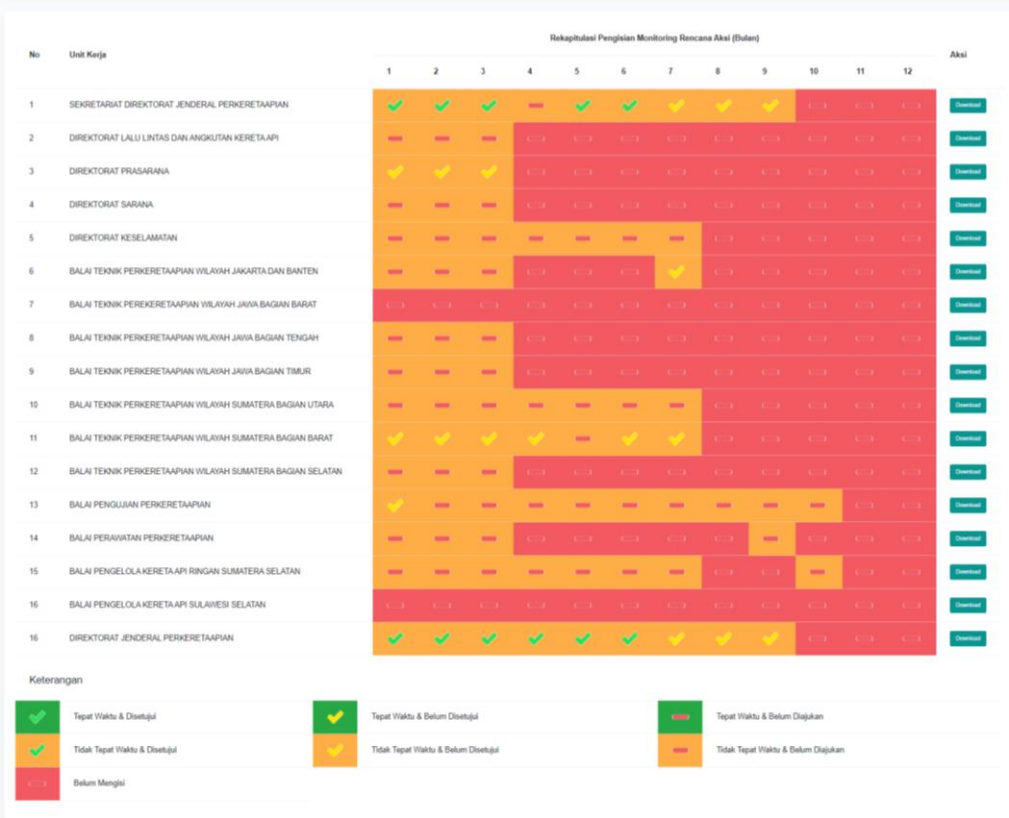

Rekapitulasi Pengisian Monitoring Rencana Aksi secara Bulanan per – unit kerja

Lanjutan... (TAMPILAN MENU TARGET KINERJA/TARGET RENSTRA)

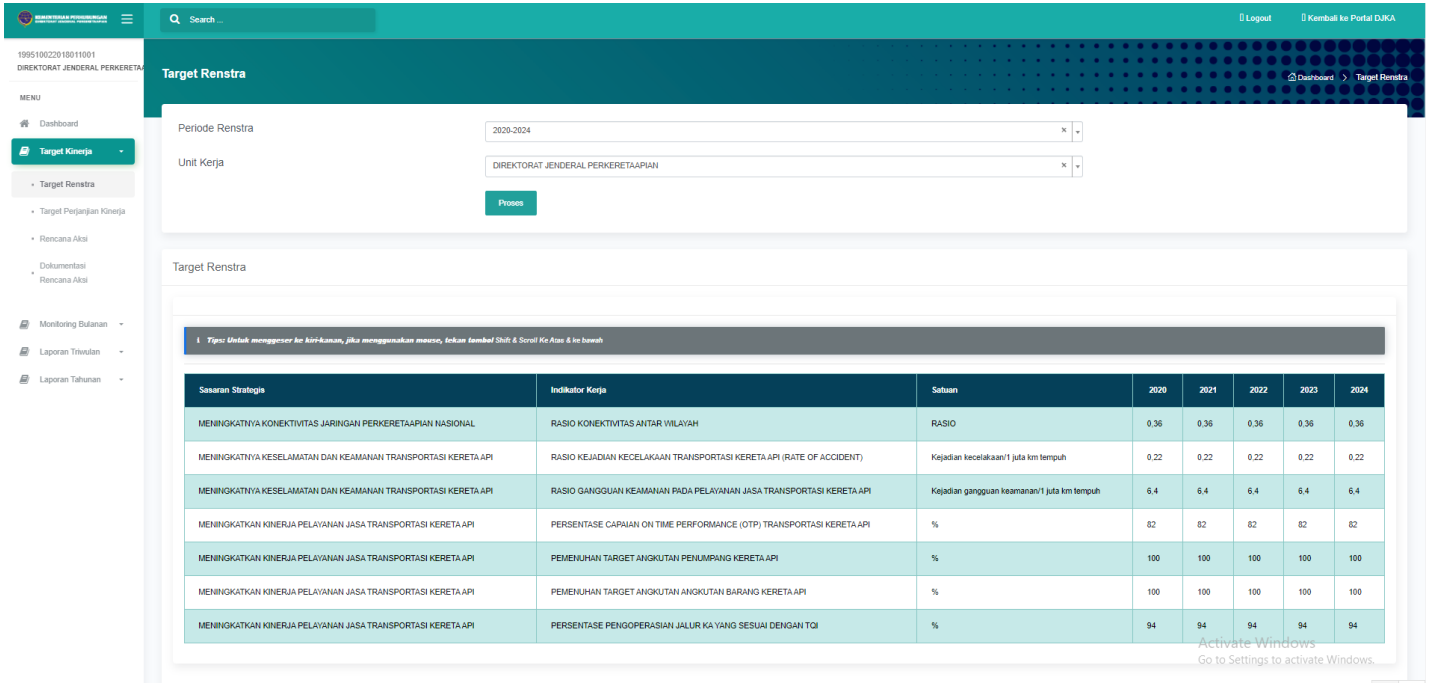

Data pada Menu Target Renstra terintegrasi dengan aplikasi e-Performance Kemenhub. Pada menu ini dapat menampilkan RENSTRA unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Lanjutan … (TAMPILAN MENU TARGET PERJANJIAN KINERJA)

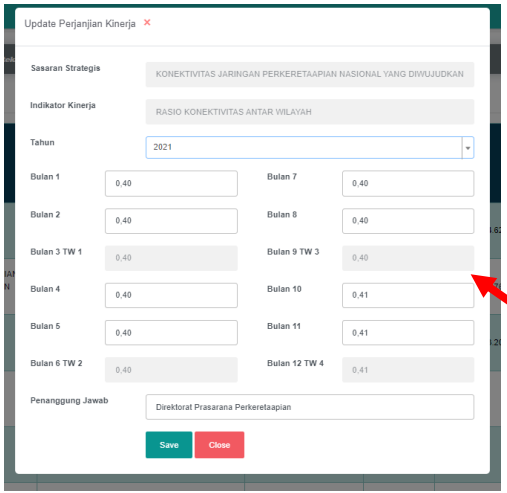

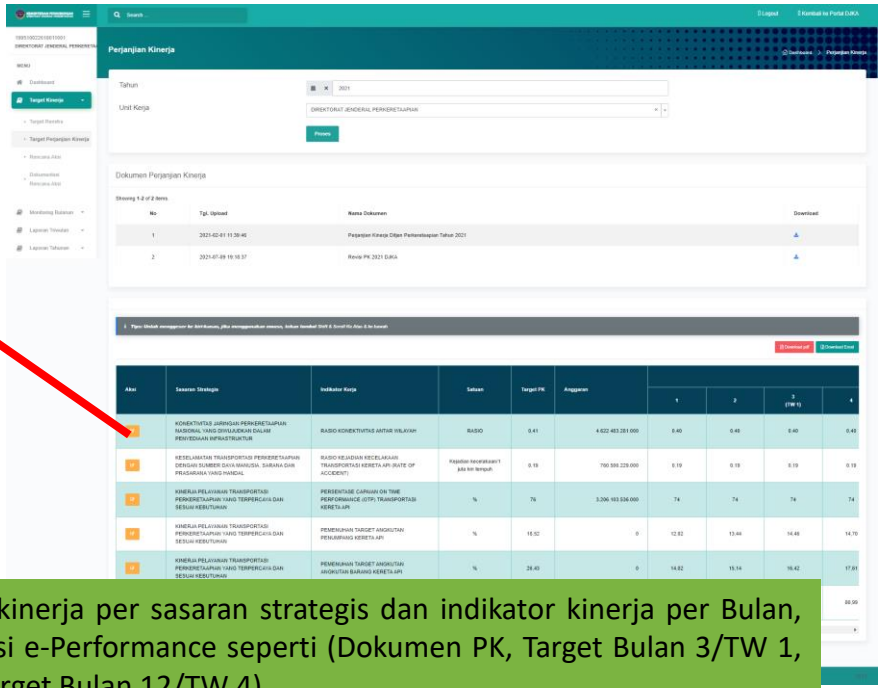

Menu ini menampilkan data target capaian kinerja per sasaran strategis dan indikator kinerja per Bulan, beberapa datanya terintegrasi dengan aplikasi e-Performance seperti (Dokumen PK, Target Bulan 3/TW 1, Target Bulan 6/TW 2, Target Bulan 9/TW 3, Target Bulan 12/TW 4)

Operator perlu menginput data target Bulan ke – 1,2,4,5,7,8,10,11 dan penanggung jawan indikator kinerja

Lanjutan … (TAMPILAN MENU RENCANA AKSI)

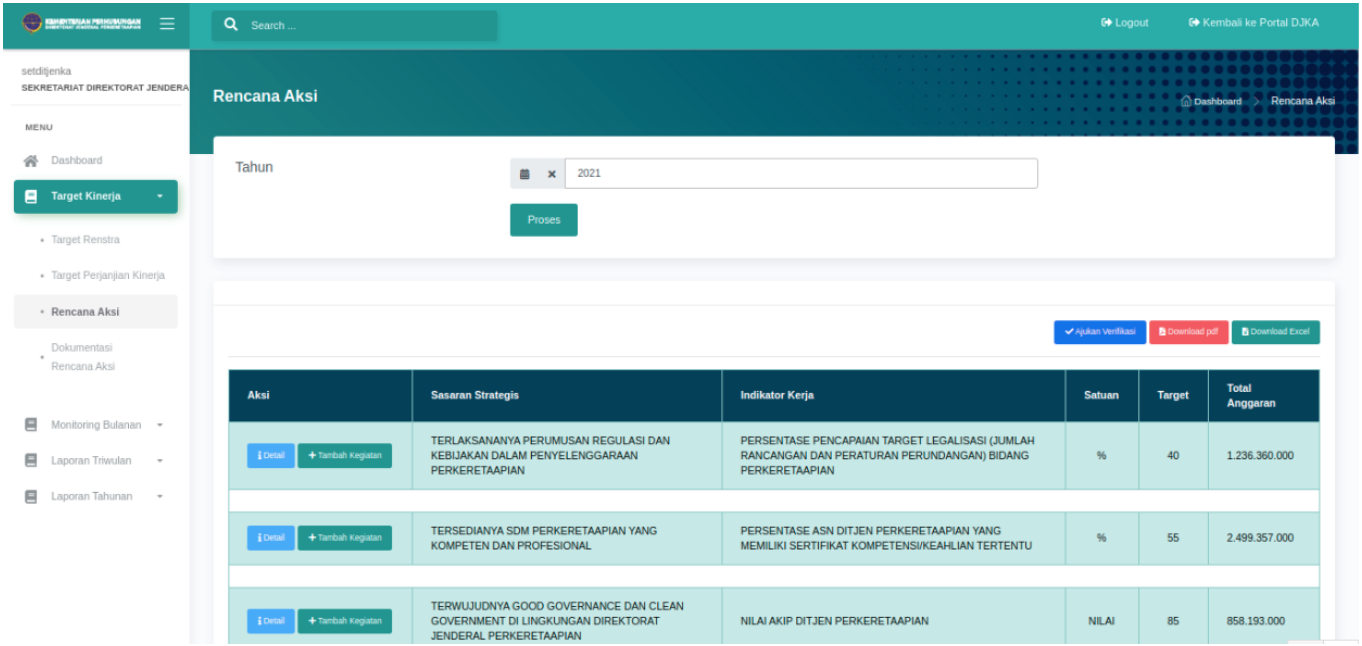

Menu ini menampilkan data target capaian kinerja per indikator kinerja serta target dari indikator kinerja output yang datanya terintegrasi dengan aplikasi e-Performance

Operator perlu menginput data kegiatan, anggaran per kegiatan dan penanggung jawab pada tiap indikator kinerja. Selanjutnya klik tombol Ajukan Verifikasi untuk di approval oleh Pimpinan.

Lanjutan … (TAMPILAN MENU DOKUMENTASI RENCANA AKSI)

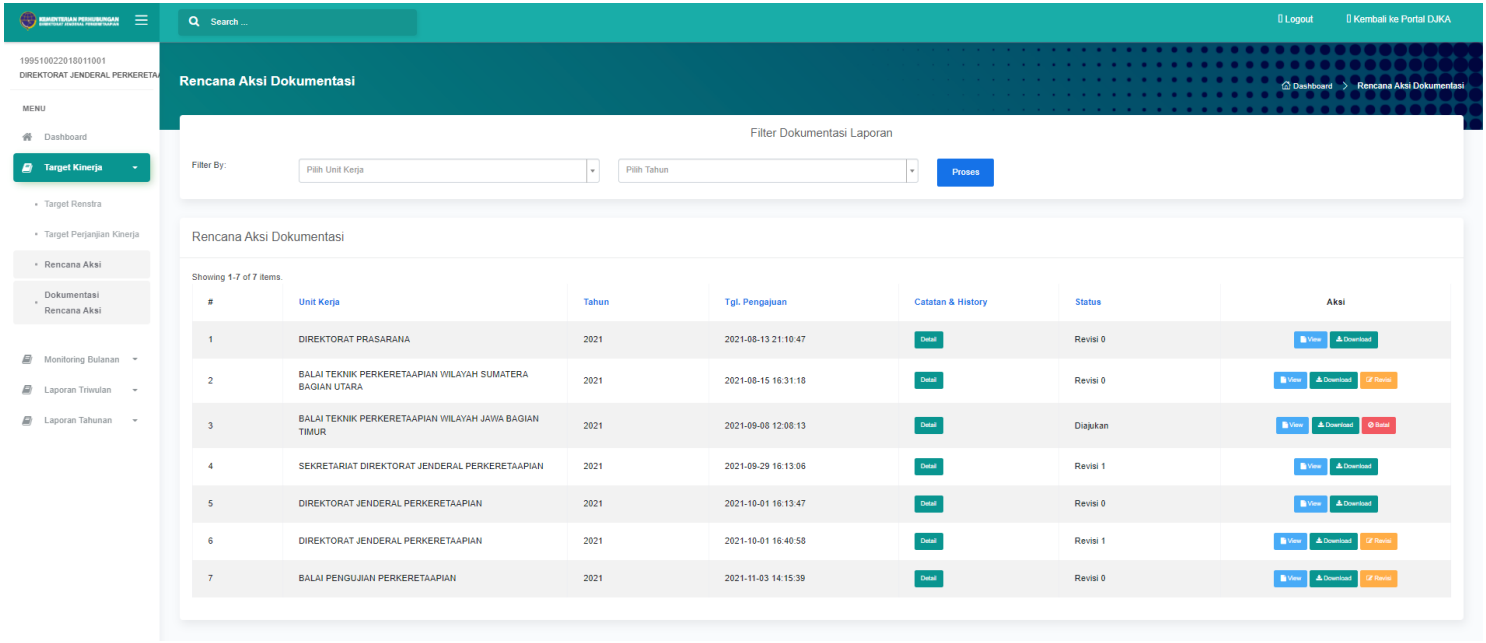

Menu ini menampilkan data rencana aksi yang telah diajukan/diterima/diverifikasi oleh pimpinan

Operator dapat melakukan revisi dokumen rencana aksi sebelum diverifikasi oleh pimpinan dengan cara klik tombol **Revisi**

Lanjutan... (TAMPILAN MENU MONITORING BULANAN/ MENU CAPAIAN KINERJA)

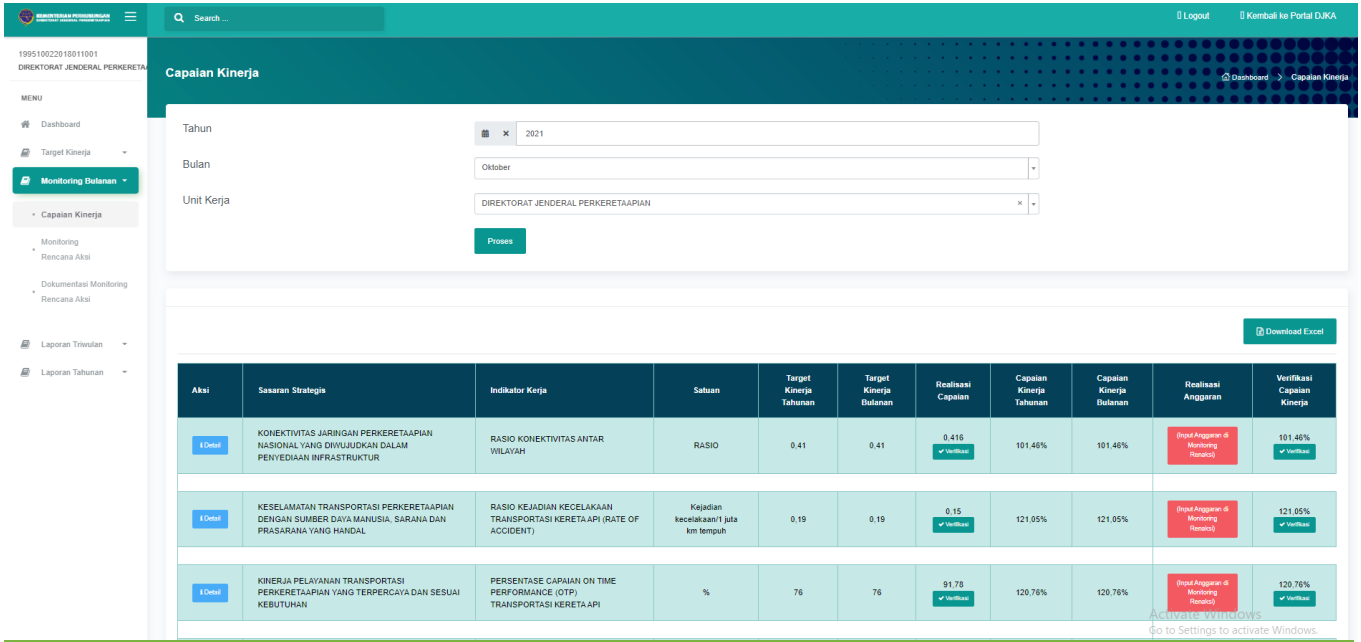

Menu ini menampilkan data capaian kinerja bulanan yang dikelompokkan berdasarkan indikator kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi e-Perfromance

Operator dapat melakukan update data capaian kinerja bulanan yang ada pada indikator kinerja dengan klik tombol **Edit** pada kegiatan

Lanjutan … (TAMPILAN MENU MONITORING RENCANA AKSI)

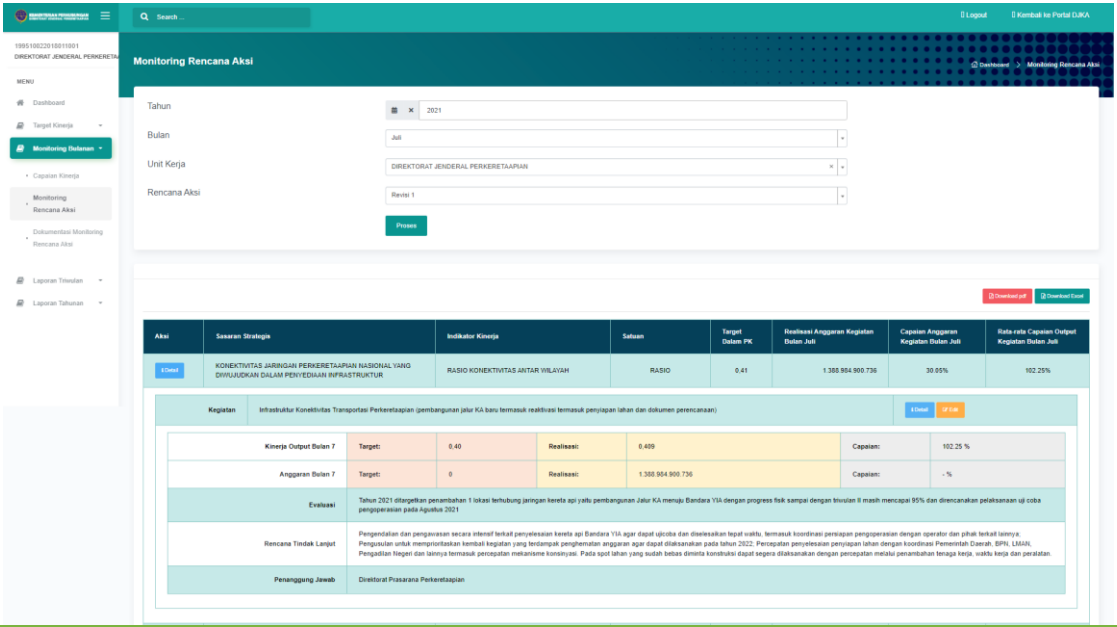

Menu ini menampilkan data realisasi kinerja kegiatan berdasarkan target rencana aksi bulan dan tahun yang asal data dari menu rencana aksi

Operator dapat melakukan pengisian data realisasi kinerja, realisasi anggaran, evaluasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan bulan yang telah dipilih dengan cara klik tombol **Edit** pada kegiatan. Selanjutnya melanjutkan permohonan verifikasi kepada pimpinan dengan cara klik tombol **Ajukan Verifikasi**.

Lanjutan … (TAMPILAN MENU DOKUMENTASI MONITORING RENCANA AKSI)

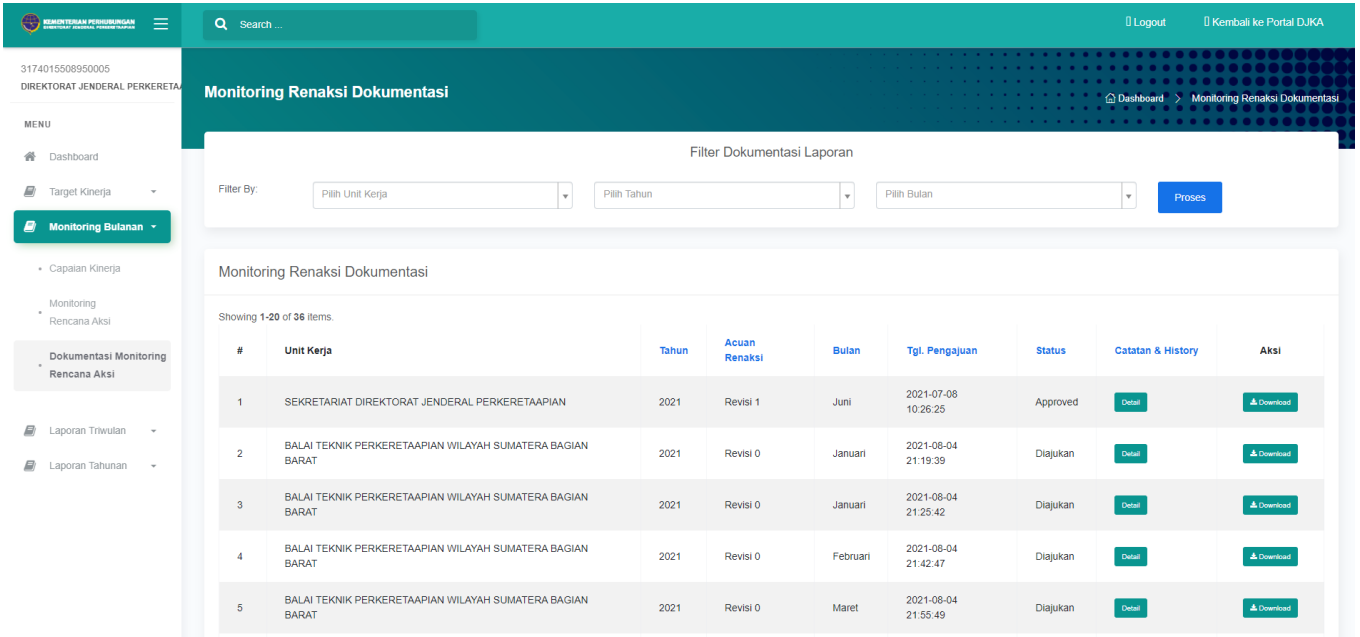

Menu ini menampilkan data monitoring rencana aksi yang telah final dan diajukan dan telah diverifikasi oleh pimpinan.

Lanjutan... (TAMPILAN MENU LAPORAN TRIWULAN/MENU TEMPLATE LAPORAN)

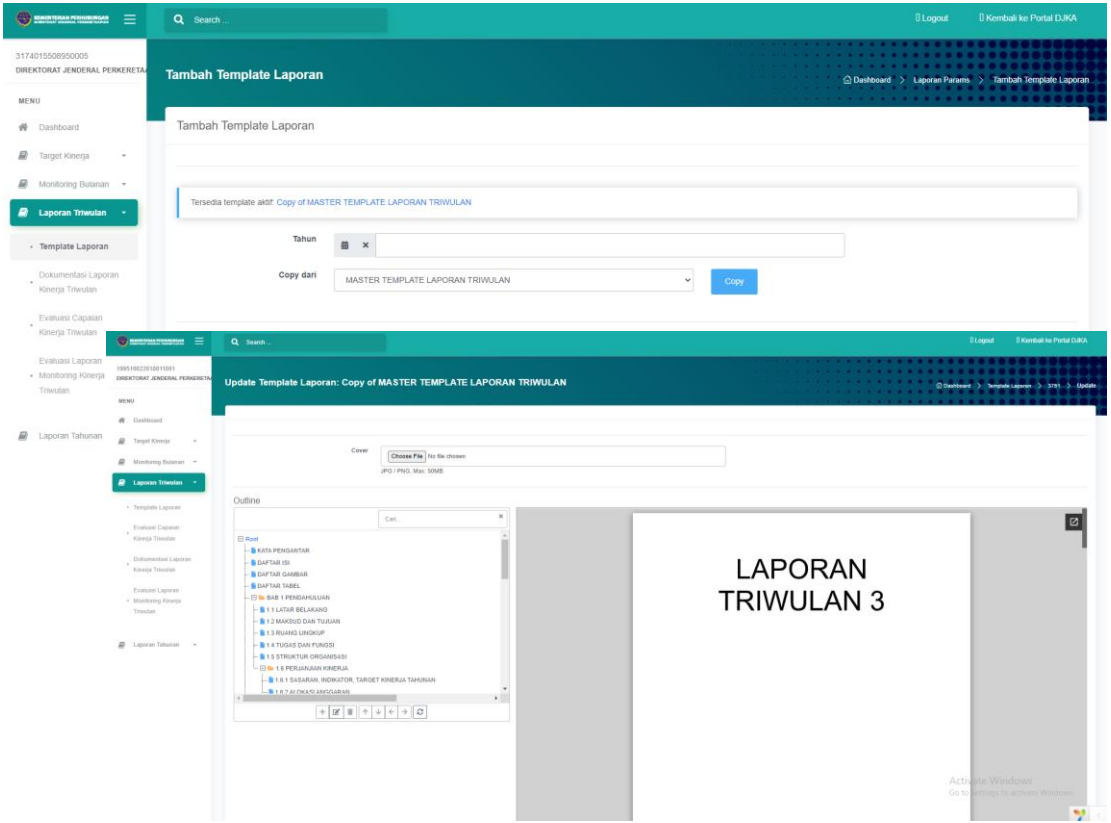

Menu ini mempermudah operator untuk menyusun laporan triwulanan, operator hanya mengisi setiap *outline* sebagaimana format pada PM No. 85 Tahun 2020

Lanjutan … (DOKUMENTASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN)

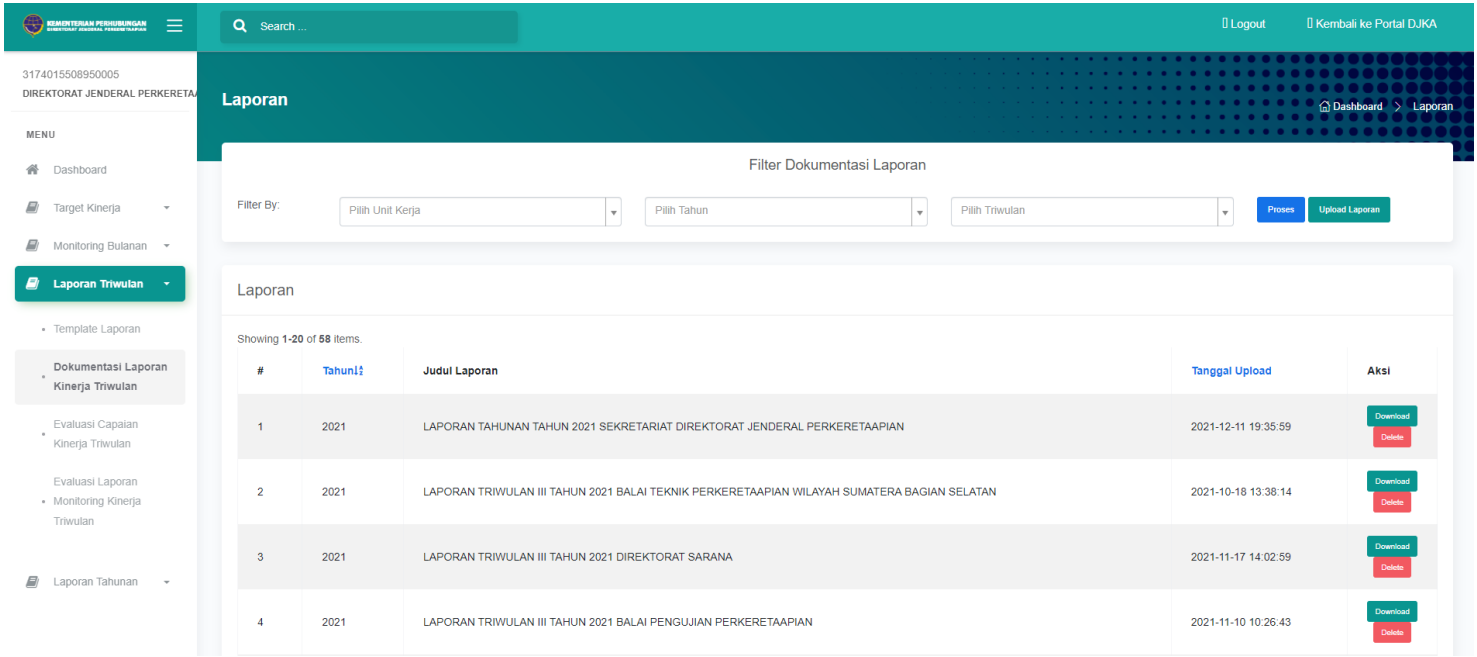

Menu ini menampilkan dokumen final laporan triwulanan unit kerja yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap laporan. Dokumen laporan triwulan dapat diupload dengan klik tombol **Upload Laporan**.

Lanjutan … (EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN)

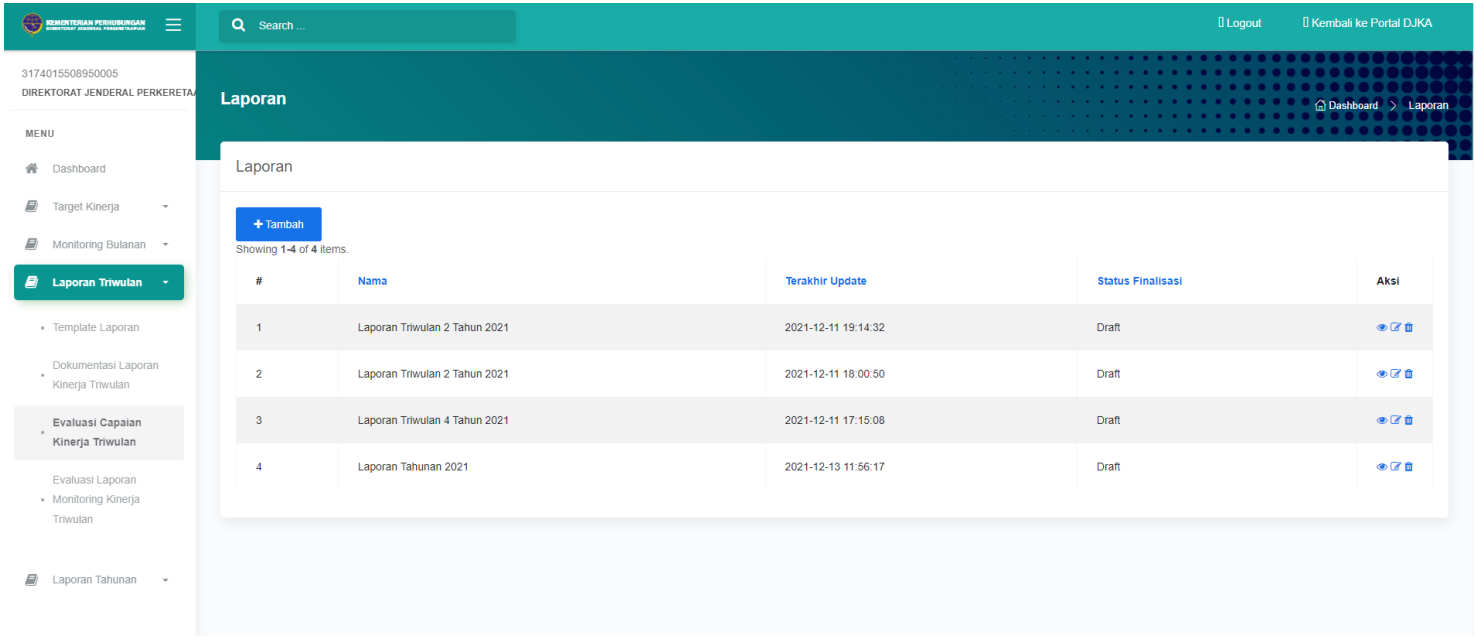

Menu ini digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja triwulanan pada dokumen laporan triwulan yang telah diupload. Evaluasi capaian kinerja triwulan dilakukan oleh Setditjen/ Verifikator.

Lanjutan… (EVALUASI LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN)

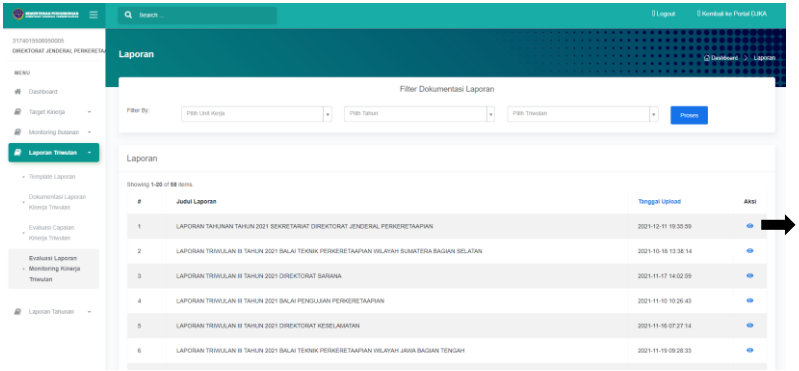

Menu ini menampilkan tools evaluasi terhadap dokumen laporan triwulan, dimana evaluasi kelengkapan laporan triwulan dilakukan oleh Setditjen/Verifikator. Hasil evaluasi laporan triwulanan akan ditampilkan pada *dashboard* untuk dilakukan perankingan.

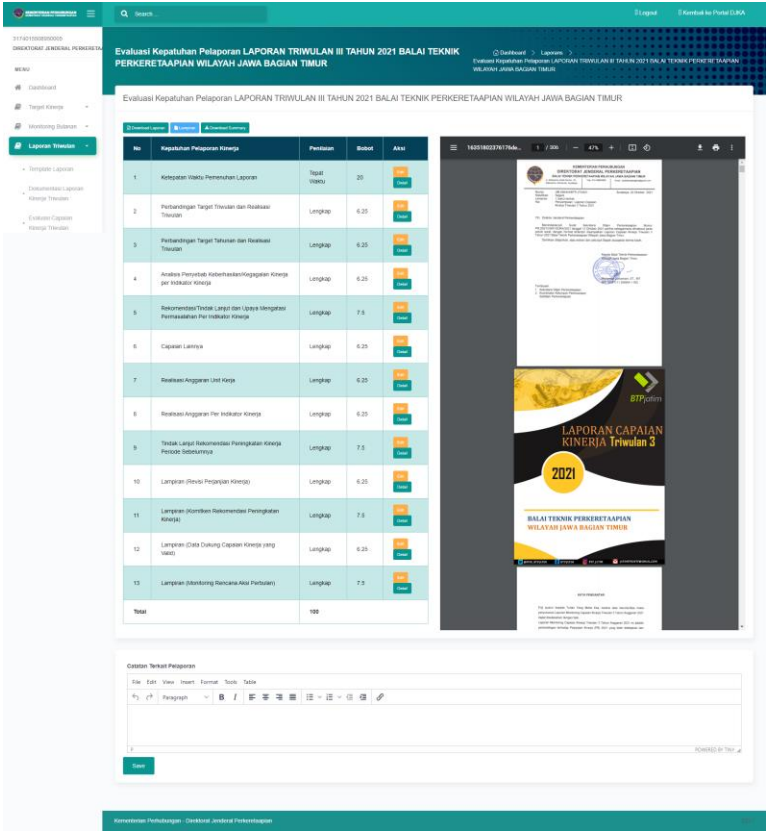

Lanjutan… (TAMPILAN MENU LAPORAN TAHUNAN/MENU TE*MPLATE* LAPORAN)

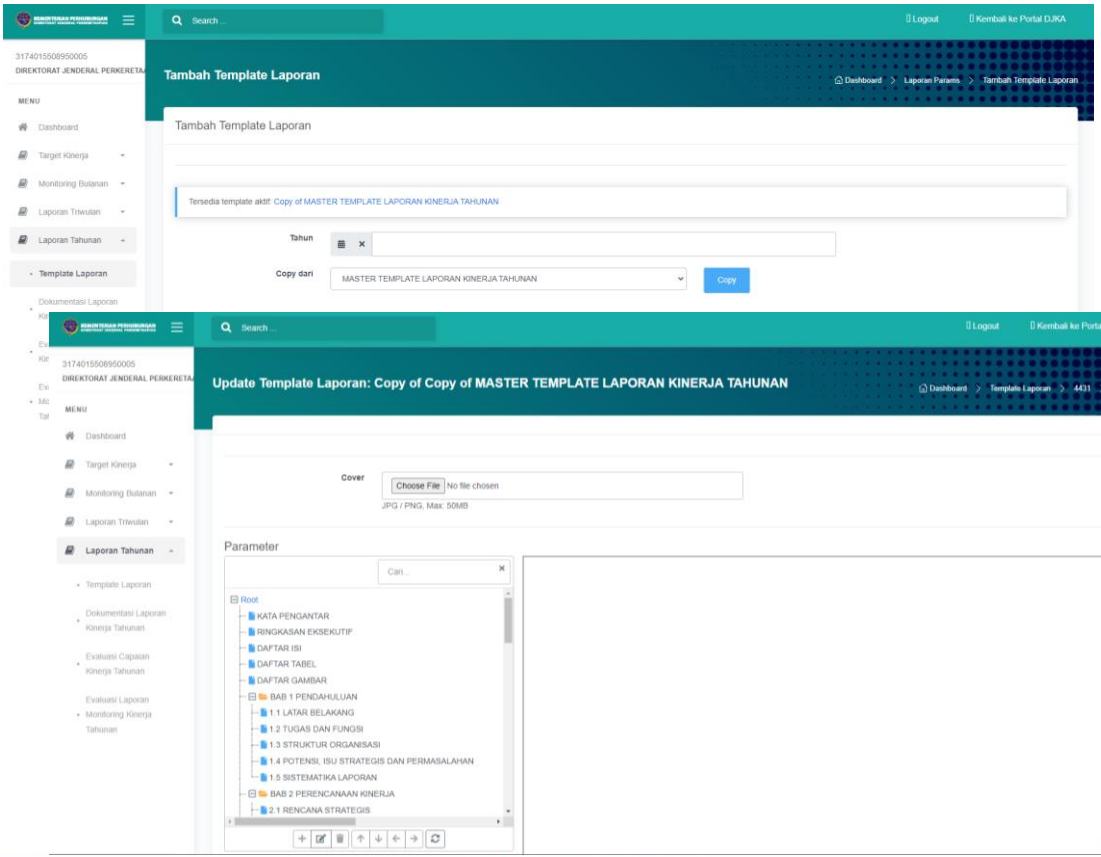

Menu ini mempermudah operator untuk menyusun laporan kinerja tahunan, operator hanya mengisi setiap *outline* sebagaimana format pada PM No. 85 Tahun 2020

Lanjutan … (DOKUMENTASI LAPORAN KINERJA TAHUNAN)

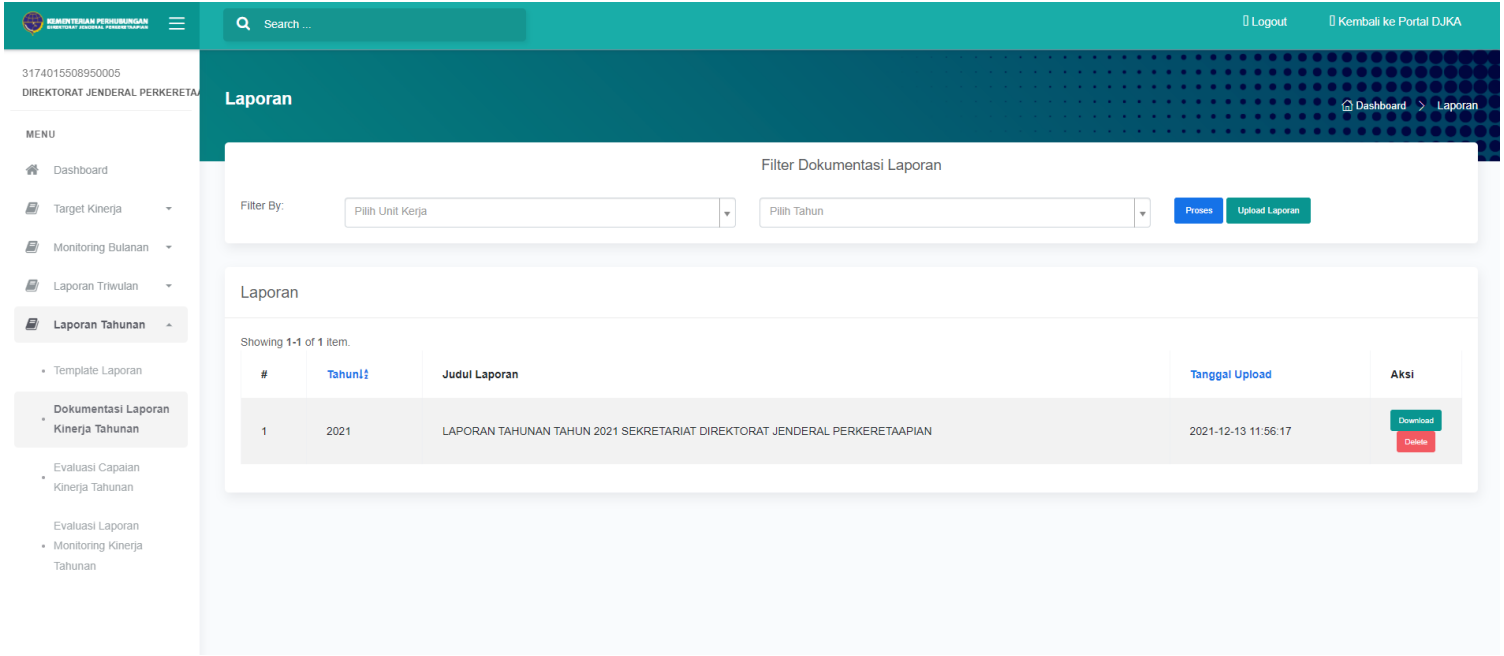

Menu ini menampilkan dokumen final laporan kinerja tahunan unit kerja yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap laporan. Dokumen laporan kinerja tahunan dapat diupload dengan klik tombol **Upload Laporan**.

Lanjutan … (EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUNAN)

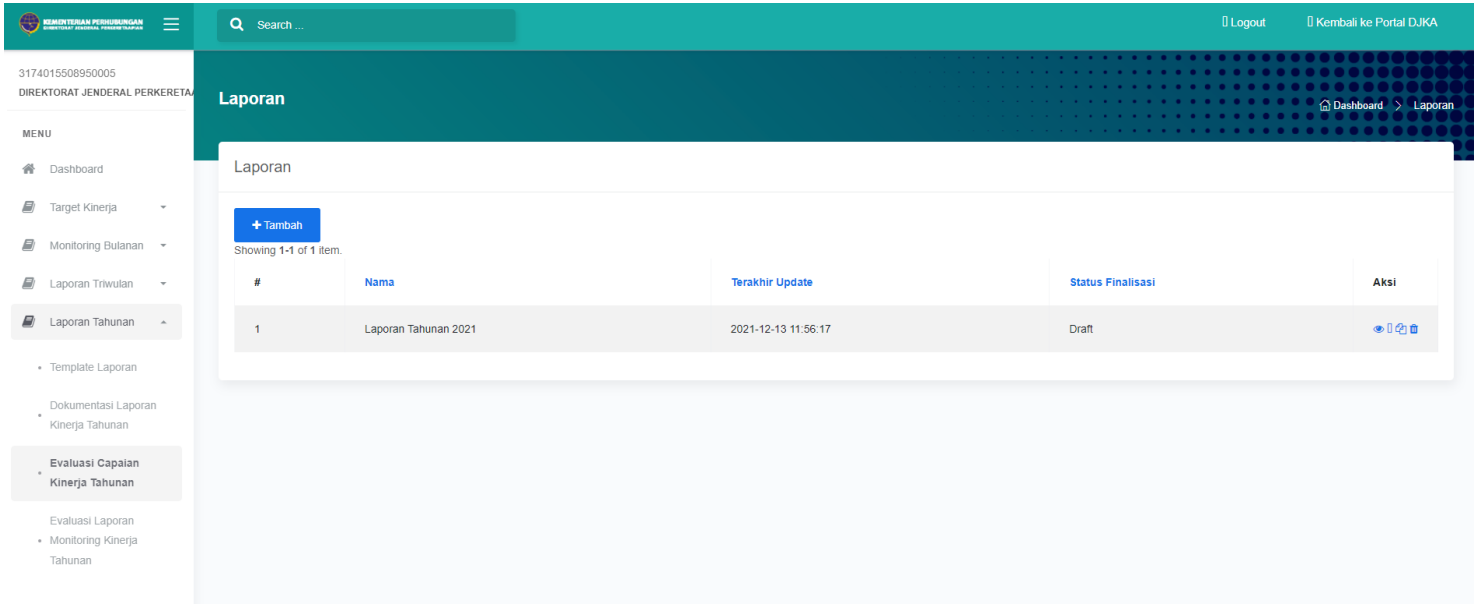

Menu ini digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja tahunan pada dokumen laporan tahunan yang telah diupload. Evaluasi capaian kinerja triwulan dilakukan oleh Setditjen/ Verifikator.

Lanjutan… (EVALUASI LAPORAN MONITORING KINERJA TAHUNAN)

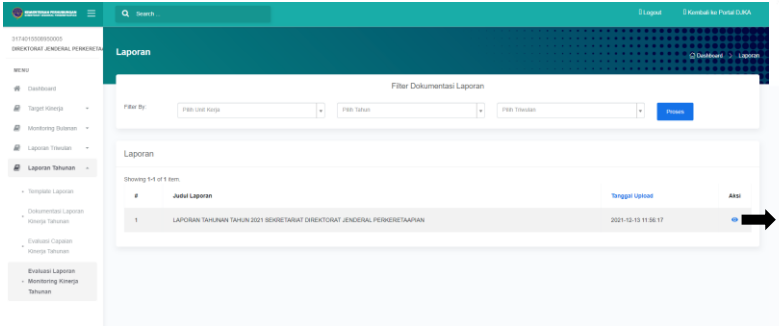

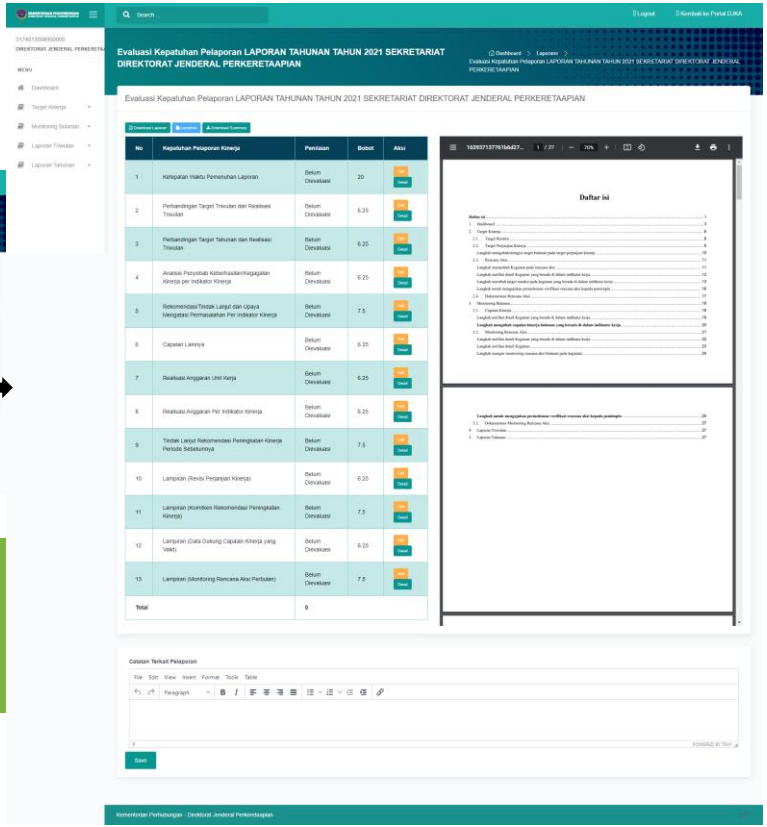

Menu ini menampilkan tools evaluasi terhadap dokumen laporan kinerja tahunan, dimana evaluasi kelengkapan laporan kinerja tahunan dilakukan oleh Setditjen/Verifikator.

BAB 05

PENUTUP

PENUTUP

1. Panduan penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Panduan penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian memuat informasi tentang penjelasan, alur dan tata cara penyelenggaraaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

3. Dengan tersedianya panduan penyelenggaraan SAKIP ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai, sehingga dapat mewujudkan tercapainya sistem pemerintahan yang baik / *good governance.*

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

KOORDINASI PENYELENGGARAAN SAKIP TAHUN 2022

DESEMBER 2021

- Pengisian *e-Performance* untuk capaian bulan November 2021
- Bimbingan Teknis/Pelatihan Penyelenggaraan SAKIP
- Penyusunan konsep PK unit kerja dan berjenjang 2022
- Penyusunan konsep LKIP 2021

JANUARI 2022

- Pengisian *e-Performance* & e-Monev untuk capaian bulan Desember 2021
- Penetapan SK Tim Penyusunan SAKIP & SK Tim Monev SAKIP
- Lanj. penyusunan & pengajuan PK unit kerja dan berjenjang 2022 (maks 20 Januari 2022)
- Lanj. penyusunan & penyampaian LKIP 2021 (maks 25/30 Januari 2022)

FEBRUARI 2022

- *Update* data *e-Performance* untuk tahun 2022 & pengisian capaian bulan Januari 2022
- Update dokumen SAKIP pada e-SAKIP Reviu
- Evaluasi LKIP 2021 Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

MARET 2022

- Pengisian *e-Performance* untuk capaian bulan Februari 2022

APRIL 2022

- Pengisian *e-Performance* untuk capaian bulan Maret 2022
- Pengisian e-Monev Bappenas periode Januari s.d Maret 2022
- Penyusunan Laporan Triwulan I 2022 (maks 25 April 2022)

MEI 2022

- Pengisian *e-Performance* untuk capaian bulan April 2022
- *Update* dokumen SAKIP pada e-SAKIP Reviu
- Evaluasi Laporan Triwulan I 2022 Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
- Revisi PK unit kerja dan berjenjang 2022 (apabila dibutuhkan, penyesuaian PK juga dibutuhkan apabila terdapat revisi Renstra)

LANJUTAN... (KOORDINASI PENYELENGGARAAN SAKIP TAHUN 2022)

JUNI 2022

- Pengisian *e-Performance* untuk capaian bulan Mei 2022
- Penyiapan data dukung evaluasi implementasi SAKIP oleh Itjen dan Kemenpan RB

JULI 2022

- Pengisian *e-Performance* untuk capaian bulan Juni 2022
- Pengisian e-Monev Bappenas periode April s.d Juni 2022
- Penyusunan Laporan Triwulan II 2022 (maks 25 Juli 2022)
- Penyiapan data dukung evaluasi SAKIP oleh Itjen dan Kemenpan RB

AGUSTUS 2022

- Pengisian *e-Performance* untuk capaian bulan Juli 2022
- *Update* dokumen SAKIP pada e-SAKIP Reviu
- Revisi PK unit kerja dan berjenjang 2022 (apabila dibutuhkan)

SEPTEMBER 2022

- Pengisian *e-Performance* untuk capaian bulan Agustus 2022

OKTOBER 2022

- Pengisian *e-Performance* untuk capaian bulan September 2022
- Pengisian e-Monev Bappenas periode Juli s.d September 2022
- Penyusunan Laporan Triwulan III 2022 (maks 25 Oktober 2022)
- Tindak Lanjut Evaluasi Implementasi SAKIP

NOVEMBER 2022

- Pengisian *e-Performance* untuk capaian bulan Oktober 2022
- Revisi PK unit kerja dan berjenjang 2022

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP

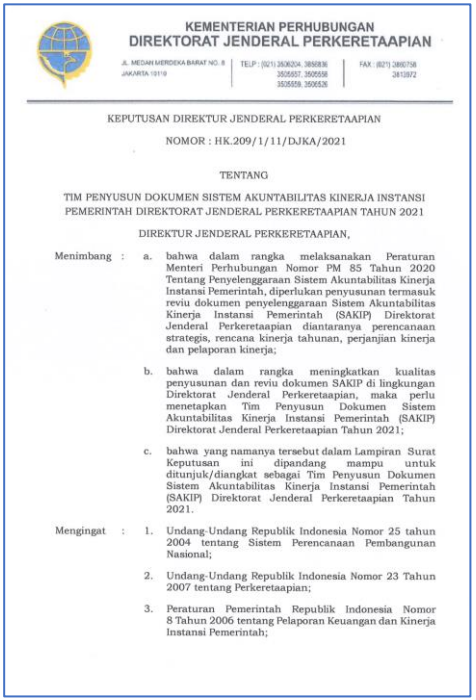

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 | TELP.: (021) 3506204, 3856836, 3505557, 3505558, 3505559, 3505535 | FAX.: (021) 3860758, 3810972

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR : HK.209/1/11/DJKA/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2021

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan penyusunan termasuk reviu dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dan reviu dokumen SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021;

c. bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk/diangkat sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

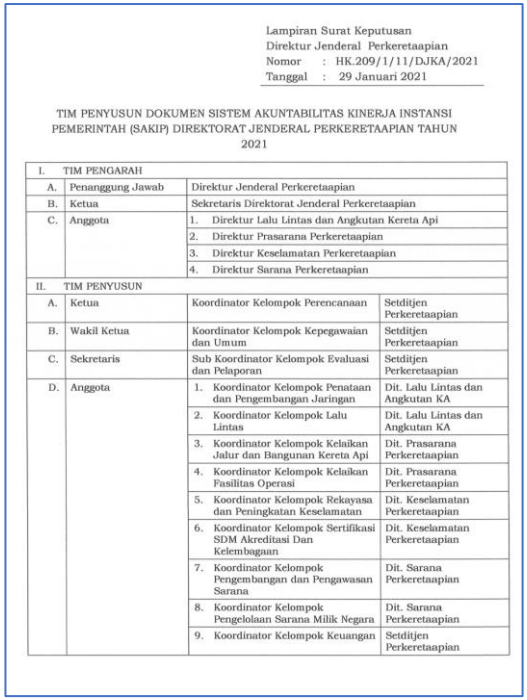

Lampiran Surat Keputusan
Direktur Jenderal Perkeretaapian
Nomor : HK.209/1/11/DJKA/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2021

I.	TIM PENGARAH			
A.	Penanggung Jawab	Direktur Jenderal Perkeretaapian		
B.	Ketua	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
C.	Anggota	1.	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	
		2.	Direktur Prasarana Perkeretaapian	
		3.	Direktur Keselamatan Perkeretaapian	
		4.	Direktur Sarana Perkeretaapian	
II.	TIM PENYUSUN			
A.	Ketua	Koordinator Kelompok Perencanaan		Setditjen Perkeretaapian
B.	Wakil Ketua	Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Umum		Setditjen Perkeretaapian
C.	Sekretaris	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan		Setditjen Perkeretaapian
D.	Anggota	1.	Koordinator Kelompok Penataan dan Pengembangan Jaringan	Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA
		2.	Koordinator Kelompok Lalu Lintas	Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA
		3.	Koordinator Kelompok Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	Dit. Prasarana Perkeretaapian
		4.	Koordinator Kelompok Kelaikan Fasilitas Operasi	Dit. Prasarana Perkeretaapian
		5.	Koordinator Kelompok Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
		6.	Koordinator Kelompok Sertifikasi SDM Akreditasi Dan Kelembagaan	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
		7.	Koordinator Kelompok Pengembangan dan Pengawasan Sarana	Dit. Sarana Perkeretaapian
		8.	Koordinator Kelompok Pengelolaan Sarana Milik Negara	Dit. Sarana Perkeretaapian
		9.	Koordinator Kelompok Keuangan	Setditjen Perkeretaapian

a. Tim Pengarah:

1) Memberikan arahan, masukan dan saran kepada Tim Penyusun dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

2) Menetapkan target dan capaian kinerja;

3) Mengesahkan dokumen SAKIP.

b. Tim Penyusun:

1) Mengkoordinasikan persiapan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

2) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen SAKIP;

3) Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

4) Melakukan reviu/perubahan dokumen SAKIP secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MONEV SAKIP

Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring Dan Evaluasi sebagai berikut :

1) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa serta mengevaluasi data kinerja sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi terhadap target dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021 secara berkala (bulanan dan triwulan);
2) Melakukan rapat dan koordinasi dengan unit kerja untuk monitoring dan evaluasi terhadap target dan capaian pada dokumen SAKIP terkait kebutuhan data/informasi dan sinkronisasi terkait capaian kinerja;
3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian Kinerja termasuk pengisian aplikasi pelaporan kinerja *(E-Performance, E-SAKIP Reviu* dan aplikasi lainnya);
4) Menginventarisasi dan memetakan permasalahan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen SAKIP;
5) Melaksanakan evaluasi indikator kinerja dan target apabila diperlukan;
6) Memberikan rekomendasi terkait dengan hasil evaluasi dan monitoring untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas dokumen SAKIP selanjutnya.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 | TELP : (021) 3506204, 3856836 3505557, 3505558 3505559, 3506526 | FAX : (021) 3860758 3813972

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR : HK. 209/1/10/DJKA/2021

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2021

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan capaian kinerja serta meningkatkan kualitas pengukuran dan pengelolaan data kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) termasuk capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan butir a, perlu ditetapkan tim monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

c. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk/diangkat sebagai tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Lampiran Surat Keputusan
Direktur Jenderal Perkeretaapian
Nomor : HK.209/1/10/DJKA/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2021

I.	TIM PENGARAH		
A.	Penanggung Jawab	Direktur Jenderal Perkeretaapian	
B.	Ketua	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
C.	Anggota	1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	
		2. Direktur Prasarana Perkeretaapian	
		3. Direktur Keselamatan Perkeretaapian	
		4. Direktur Sarana Perkeretaapian	
II.	TIM MONITORING DAN EVALUASI		
A.	Ketua	Koordinator Kelompok Perencanaan	Setditjen Perkeretaapian
B.	Wakil Ketua	Koordinator Kelompok Keuangan	Setditjen Perkeretaapian
C.	Sekretaris	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Setditjen Perkeretaapian
D.	Anggota	1. Koordinator Kelompok Angkutan	Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA
		2. Koordinator Kelompok Kerjasama dan Pengembangan Usaha	Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA
		3. Koordinator Kelompok Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	Dit. Prasarana Perkeretaapian
		4. Koordinator Kelompok Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	Dit. Prasarana Perkeretaapian
		5. Koordinator Kelompok Audit dan Inspeksi Keselamatan	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
		6. Koordinator Kelompok Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
		7. Koordinator Kelompok Kelaikan Sarana Wilayah I	Dit. Sarana Perkeretaapian
		8. Koordinator Kelompok Kelaikan Sarana Wilayah II	Dit. Sarana Perkeretaapian
		9. Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Umum	Setditjen Perkeretaapian
		10. Koordinator Kelompok Hukum	Setditjen Perkeretaapian